

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PERTANIAN BERBASIS TATA RUANG.

**(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

CINTANTYA ANDHITA DARA KIRANA

(115030601111004)



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2015**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata
Pertanian Berbasis Tata Ruang (Studi pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Batu)

Disusun oleh : Cintanty Andhita Dara Kirana

NIM : 115030601111004

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Malang, 1 April 2013

Komisi Pembimbing

Ketua

Mochammad Saleh Soeaidy, Dr, MA
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota

Minto Hadi, Drs, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003



TANDA PENGESAHAN

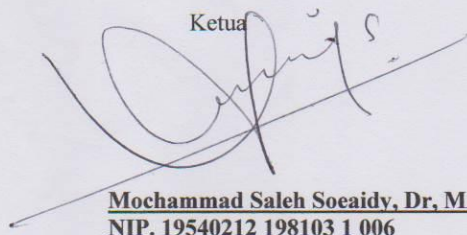
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 5 Mei 2015
 Jam : 10.00 WIB
 Skripsi atas nama : Cintanya Andhita Dara Kirana
 Judul : Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

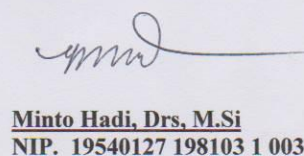
Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

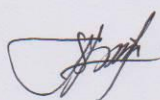
Ketua


Mochammad Saleh Soeaidy, Dr, MA
 NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota


Minto Hadi, Drs, M.Si
 NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota


Siswidiyanto, Drs, MS
 NIP. 19600717 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 2 April 2015



Nama : Cintantya Andhita Dara K.

NIM : 115030601111004

Karya ini aku persembahkan untuk kedua orang tua hebatku yang tak hentinya memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan anaknya...



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan".

(Al-Insyirah: 5)

"Bukan suatu masalah jika dalam suatu urusan kamu mengerjakan dengan perlahan, hal yang paling utama adalah ketika kendala datang kamu tidak dengan mudah berhenti menyelesaikan urusan tersebut. Do'a, semangat dan ikhtiar adalah kunci utama menggapai suksesmu". (DK, 2015)



RINGKASAN

Kirana, Cintantya Andhita Dara. 2015. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). Minat Perencanaan Pembangunan. Jurusan Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing: Mochammad Saleh Soeaidy, Dr, MA. Minto Hadi, Drs, M.Si.

Semenjak berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 2001, Kota Batu menetapkan dan memantapkan daerahnya menjadi Sentra Pariwisata dan Agropolitan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata dan Agropolitan, pada level kebijakan perlu dirumuskan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah. Hal ini untuk mewujudkan arah dan keterpaduan dalam program-program kepariwisataan dan sektor-sektor lain yang terkait. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Rencana induk pembangunan kepariwisataan di daerah (provinsi/ kabupaten/ kota dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Dengan adanya konsep pengembangan pariwisata pertanian yang dikembangkan Kota Batu dikhawatirkan akan terjadi ketidaksesuaian fungsi lahan yang digunakan dalam hal pengembangan pariwisata berbasis pertanian, seperti banyaknya investor yang tertarik untuk mendirikan usaha pariwisata di Kota Batu ke arah industri pariwisata yang nantinya dikhawatirkan terjadi ketimpangan antara lahan produktif yang semestinya dapat digunakan dalam pengembangan pariwisata pertanian menjadi kawasan wisata yang mengarah pada industri pariwisata, maka dari itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur zonasi ruang (zoning) agar pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang dapat optimal dan terarah, serta dibutuhkannya acuan berupa Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dalam pengembangan pariwisata pertanian di Kota Batu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 yang mengatur tentang pemanfaatan lahan berdasarkan *zonasi* serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu yang mengatur mengenai pengembangan kawasan agrowisata Kota Batu, serta strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu beserta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu serta untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat dari pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dokumentasi dan studi kepustakaan. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri, pedoman wawancara dan penunjang lainnya seperti alat perekam suara. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh John. W. Creswell.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pengembangan kawasan wisata pertanian telah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029 yang mengatur mengenai pembagian zona kawasan yaitu Kecamatan Bumiaji yang dioptimalkan untuk pengembangan kawasan agrowisata dengan dimulai dari tiga desa wisata yaitu desa Punten, desa Sumbergondo dan desa Bumiaji serta pihak swasta yang turut berperan dalam mengembangkan pariwisata pertanian di Kota Batu yaitu *Kusuma Agrowisata Convention Center* yang terletak di Desa Sisir. Strategi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam mengembangkan kawasan agrowisata di Kota Batu adalah dengan menetapkan pembagian kawasan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030, penyediaan sarana dan prasarana agrowisata, promosi atau pemasaran dan peningkatan koordinasi antara pemerintah kota Batu dengan pelaku industri pariwisata di Kota Batu serta faktor pendorong yang mempengaruhi berhasilnya pengembangan agrowisata di Kota Batu adalah otonomi daerah, kondisi geografis, komoditas unggulan, ketersediaan infrastruktur, kerjasama antar *stakeholder* dan pembentukan kelompok masyarakat sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan agrowisata adalah kapasitas sumber daya manusia di desa wisata yang masih rendah, faktor cuaca dan suhu udara serta dominasi pihak swasta terhadap lahan masyarakat.

Kata Kunci: *Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Strategi Pemerintah Daerah, Pengembangan Kawasan Agrowisata.*

SUMMARY

Kirana, Cintantya Andhita Dara. 2015. Local Government Strategy in the Development of Agricultural Tourism Based Spatial (a study of Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu and Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). Development Planning. The Department Of Public Administration. Brawijaya University. Supervisor: Mochammad Saleh Soeaidy, Dr , MA. Minto Hadi, Drs, M.si.

Kota Batu standing as autonomous regions since 2001, Kota Batu entrench its territory into centra tourism and agropolitan particularly in East Java. To embody as the center of tourism and agropolitan, on the level of policy formulated need to be planning the development of regional tourism .This to manifest the direction and integrity in tourism programs and other sectors related. The development of tourism is based on the development of tourism master plan consisting of the Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, and Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Provinsi/kabupaten/Kota) known as Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

The existence of the concept of development agricultural tourism which developed Kota Batu is feared will happen the discrepancy function of land use in terms of the development of agricultural tourism, such as the number of investors who are interested in establishing business tourism in the city of rocks towards the tourism industry who feared going on inequality between the productive land that should be used in the development of tourism agriculture became a tourist area that leads to the tourism industry. Thus, the need for Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) in the form of zoning to the development of tourism agriculture-based spatial optimally and directional, as well as the need for Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) in the development of tourism agriculture in Kota Batu.

This research aims to discover, describe, and analyze Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu 2010-2030 who set about land use based on zoning and Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu 2014-2029 who set about agriculture tourism, as well as the strategy of Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu and Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu rocks in the development of agriculture tourism based on spatial and to analyze the driving factors and inhibitor factor of restricting the development of tourism and agriculture-based of spatial in Kota Batu.

This type of research is used in the preparation of this thesis is the type of descriptive study with a qualitative approach. Data sources used are primary data and secondary data. The method of data collection with interviews, observation, documentation and library studies. Research instrument used by the researchers

themselves, guidelines and other supporting interviews such as sound recording device. In the study, researchers analyzed the data refers to the method put forward by John. W. Creswell.

The results of this research, pointed out that the development of the agriculture tourism has been referring to Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu 2010-2030 and Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu 2014-2029 who set about zoning for agriculture tourism area that Kecamatan Bumiaji optimized for development agriculture tourism starts of three villages, the village of Sumbergondo, Punten, and Bumiaji as well as private are contributing in developing agriculture tourism in Kota Batu namely *Kusuma Agrowisata Convention Center* located in Desa Sisir. The strategy of Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu and Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu in developing agriculture tourism in Kota Batu is by setting the zoning arranged in a Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu 2010-2030, agro tourism and infrastructure provision, promotion or marketing and improvement of coordination between the Government of the Kota Batu with the private sector. The driving factor that affect the successful development of agro-tourism in Kota Batu is the autonomous region, geographical conditions, commodity, the availability of infrastructure, cooperation between stakeholders and the establishment of community groups. As a factor affecting the success of a barrier to the development of agro-tourism is the capacity of human resources in the tourism village is still low, weather factors and air temperature, as well as the dominance of private sector to public land.

Keywords: *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA), Local Government Strategies, Development Of Agro-Tourism Area.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Gangsar Wasito dan Ibu Sandra Sawitrie juga saudara laki-laki ku, Bagaskara Andhita Dewa Noraga serta keluarga besar yang selalu mengucurkan doa serta dukungan dan semangat yang tidak ada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Hermawan, Dr. S. IP, M.Si selaku Koordinator Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Mochammad Saleh Soeaidy, Dr, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesabarannya untuk terus memberikan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Minto Hadi, Drs, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan saran-saran yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
9. Seluruh staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu yang telah membantu dalam memberi izin untuk melakukan penelitian di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

10. Seluruh narasumber yang telah membantu melancarkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian:

- a. Bapak Yudho Prasetyo dan Bapak Mangasa yang dengan sabar melayani peneliti untuk mendapatkan data berupa dokumen perencanaan sesuai yang dibutuhkan peneliti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu.
- b. Bapak Suwoko selaku Kepala Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM BAPPEDA Kota Batu, Bapak Saryono selaku Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata BAPPEDA Kota Batu dan Bapak Heru Julianto selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi BAPPEDA Kota Batu.
- c. Ibu Nurul selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- d. Bapak Saiful selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.
- e. Bapak Hariono selaku Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Desa Bumiaji dan Bapak Edy Suyanto selaku Kepala Desa Bumiaji.
- f. Bapak Sugiman selaku Kepala Kelompok Tani Makmur Abadi.

g. Bapak Nungky selaku staff bagian Personalia *Kusuma Agrowisata Convention Center* dan Bapak Fatur Rohman selaku staff bagian Manager dan Marketing *Kusuma Agrowisata Convention Center*.

11. Sahabat seperjuangan yang tak hentinya memberikan semangat, saran, masukan, koreksi dan tentunya dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Intan Nur Hidayati, Nanda Dayutami, Yolandari Gustira, Rohma Indriawati, Muetia Endriani, Tika Larasati, Fidan Safira, Cindy Praharasti, Dika Mulya Wardana, M. Jamhar Hamsa, Nasir Tongkonoo, Frisky Komaryan, dan Stanyslaus Audi.
12. Keluargaku di Kampus Abu-Abu, kakak-kakak dan adik-adik Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK) atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada peneliti.
13. Saudara serumah Griya Brawijaya yang dengan setia menemani di Malang, Amelia Krisdayanti, Meidina Rosyadah, Roudatul Innayah, Yuli Anggraeni, Ria Rizki, dan Linda Citra Amelia.
14. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik khususnya minat Perencanaan Pembangunan angkatan 2011 yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.
15. Serta semua pihak terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas

budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha memberikan hasil yang terbaik, tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis menagharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati, itu semata-mata datang dari penulis dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 7 April 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

RINGKASAN.....iv

SUMMARY.....vi

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....xiii

DAFTAR TABEL.....xvii

DAFTAR GAMBAR.....xviii

DAFTAR LAMPIRAN.....xix

BAB I. PENDAHULUAN.....1

- A. Latar Belakang.....1
- B. Rumusan Masalah.....8
- C. Tujuan Penelitian.....9
- D. Kontribusi Penelitian.....9
- E. Sistematika Pembahasan.....10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....12

- A. Administrasi Pembangunan.....12
 - 1. Pengertian Administrasi Pembangunan.....12
 - 2. Ciri Administrasi Pembangunan.....13
 - 3. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan.....14
- B. Perencanaan Pembangunan.....15
 - 1. Pengertian Perencanaan Pembangunan.....15
 - 2. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan.....17
 - 3. Jenis-jenis Perencanaan Pembangunan.....20
- C. Konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.....23
 - 1. Pengertian Perencanaan Wilayah.....23
 - 2. Pengertian Perencanaan Tata Ruang Wilayah.....24
 - 3. Landasan dan Manfaat Pengaturan Penggunaan Ruang Wilayah...25
 - 4. Definisi Kota.....27
 - 5. Zoning (Pembagian Zona).....28

D. Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata.....	31
1. Pengertian Strategi.....	31
2. Komponen dari Strategi.....	33
3. Tipe Strategi.....	34
4. Pemilihan Strategi.....	35
5. Pengertian Pengembangan.....	37
6. Implementasi Program.....	39
7. Pariwisata.....	41
a. Pengertian Pariwisata.....	41
b. Jenis-jenis Pariwisata.....	42
c. Pengembangan Kepariwisata.....	44
d. Potensi Pariwisata.....	44
e. Konsep Agrowisata.....	45
8. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).....	45
E. Pemerintah Daerah.....	48
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	48
2. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	50
3. Peran Pemerintah Daerah.....	51
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Fokus Penelitian.....	55
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	57
D. Jenis dan Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Instrumen Penelitian.....	63
G. Metode Analisis Data.....	64
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Gambaran Umum.....	70
1. Profil Kota Batu.....	70
a. Sejarah Berdirinya Kota Batu dan Pemerintahan Kota Batu.....	70
b. Visi dan Misi Kota Batu.....	72
c. Bentuk dan Arti Lambang Kota Batu.....	73
d. Keadaan Geografis dan Wilayah Administrasi.....	76
e. Rencana Pemanfaatan Ruang.....	81
2. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu.....	82
a. Gambaran Umum BAPPEDA Kota Batu.....	82
b. Lokasi BAPPEDA Kota Batu.....	84
c. Sejarah BAPPEDA Kota Batu.....	85
d. Visi dan Misi BAPPEDA Kota Batu.....	85
e. Tujuan BAPPEDA Kota Batu.....	86
f. Sasaran BAPPEDA Kota Batu.....	87
g. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kota Batu.....	89

h. Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Kota Batu.....	91
i. Susunan Organisasi BAPPEDA Kota Batu.....	92
3. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.....	100
a. Lokasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.....	100
b. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.....	101
c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.....	101
d. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.....	104
B. Penyajian Data Fokus.....	106
1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 yang Mengatur Pembagian Zona (<i>Zoning</i>).....	106
2. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029 yang Mengatur tentang Pariwisata Berbasis Pertanian.....	107
3. Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang.....	109
a. Lokasi serta Penempatan.....	109
b. Fungsi dan manfaat.....	110
c. Pengelolaan.....	112
4. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu beserta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang.....	118
a. Pembagian Kawasan.....	118
b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Agrowisata.....	122
c. Promosi atau Pemasaran.....	125
d. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Kota Batu dengan Pelaku Industri Pariwisata di Kota Batu	128
5. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang di Kota Batu.....	129
a. Faktor Pendorong.....	129
1) Otonomi Daerah.....	129
2) Kondisi Geografis.....	130
3) Komoditas Unggulan.....	130
4) Ketersediaan Infrastruktur.....	131
5) Kerjasama antar <i>Stakeholder</i>	133
6) Kelompok Masyarakat.....	135
b. Faktor Penghambat.....	137
1) Kapasitas SDM yang Masih Rendah.....	137
2) Faktor Cuaca dan Suhu Udara.....	138
3) Dominasi Pihak Swasta terhadap Lahan Masyarakat.....	139

C. Pembahasan.....	141
1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 yang Mengatur Pembagian Zona (<i>Zoning</i>).....	141
2. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029 yang Mengatur tentang Pariwisata Berbasis Pertanian.....	143
3. Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang.....	146
a. Lokasi serta Penempatan.....	146
b. Fungsi dan manfaat.....	147
c. Pengelolaan.....	151
4. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu beserta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang.....	155
a. Pembagian Kawasan.....	156
b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Agrowisata.....	162
c. Promosi atau Pemasaran.....	167
d. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Kota Batu dengan Pelaku Industri Pariwisata di Kota Batu.....	173
5. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang di Kota Batu.....	178
a. Faktor Pendorong.....	179
1) Otonomi Daerah.....	179
2) Kondisi Geografis.....	180
3) Komoditas Unggulan.....	182
4) Ketersediaan Infrastruktur.....	183
5) Kerjasama antar <i>Stakeholder</i>	185
6) Kelompok Masyarakat.....	187
b. Faktor Penghambat.....	188
1) Kapasitas SDM yang Masih Rendah.....	188
2) Faktor Cuaca dan Suhu Udara.....	190
3) Dominasi Pihak Swasta terhadap Lahan Masyarakat.....	192
BAB V. PENUTUP.....	194
A. Kesimpulan.....	194
B. Saran.....	196
DAFTAR PUSTAKA.....	198

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
Tabel 1.	Peran Pemerintah Daerah.....	51
Tabel 2.	Luas Wilayah Kota Batu menurut Kecamatan (Ha) Tahun 2009.....	77
Tabel 3.	Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Batu.....	81
Tabel 4.	Data Pegawai Negeri Sipil di BAPPEDA Kota Batu.....	91
Tabel 5.	Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Batu menurut Kecamatan.....	107
Tabel 6.	Komoditas Unggulan di Kawasan Agrowisata Kota Batu.....	110
Tabel 7.	Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Kecamatan di Kota Batu.....	117



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
	Gambar 1. Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.....	66
	Gambar 2. Lambang Kota Batu.....	73
	Gambar 3. Peta Lokasi BAPPEDA Kota Batu.....	85
	Gambar 4. Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Batu.....	100
	Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu....	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 2. Disposisi Ijin Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

Lampiran 3. Disposisi Ijin Penelitian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Lampiran 4. Program Pengembangan Pariwisata Jawa Timur

Lampiran 5. Pusat Kegiatan Sektor Pariwisata

Lampiran 6. Rencana Struktur Wilayah Kota Batu

Lampiran 7. Persebaran Daya Tarik Wisata

Lampiran 8. Rencana Wisata Desa Holtikultura Apel

Lampiran 9. Rencana Kawasan Strategis Sektor Unggulan Pertanian

Lampiran 10. Rencana Kawasan Pengembangan Kegiatan Perkotaan dan Agropolitan

Lampiran 11. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan BWK I

Lampiran 12. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan BWK II

Lampiran 13. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan BWK III

Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 15. Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik (Tjokroamidjojo,1994:222). Suatu pembangunan bisa dikatakan optimal ketika potensi daerah serta sumber daya yang ada seperti sumberdaya manusia, sumber daya alam dan juga teknologi dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merata, baik secara materiil maupun non materiil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan dinamis.

Pembangunan nasional memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pembangunan daerah. Pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera serta adil dan makmur dan menciptakan kemajuan di berbagai bidang kehidupan baik fisik maupun non fisik seperti kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, industri serta penyediaan jasa dan juga sarana prasarana ternyata sangat menunjang dalam pengelolaan tata ruang kota. Pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mampu mengembangkan dan

menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, pembangunan ekonomi memprioritaskan pengembangan sektor ekonomi potensial yang menjadi unggulan daerah. Potensi ekonomi unggulan daerah secara umum merupakan sektor yang menjadi komoditas utama, memiliki pertumbuhan yang paling tinggi atau mempunyai kontribusi besar pada *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan berdampak luas bagi penyerapan tenaga kerja (sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja). Berbagai potensi yang dapat dikembangkan antara lain dari sektor pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lain-lain.

Di beberapa daerah, salah satu potensi ekonomi yang dikembangkan yaitu pariwisata. Kepariwisataan memiliki peran penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, mendorong pembangunan dan memperbesar pendapatan daerah, memperkaya kebudayaan daerah, melestarikan lingkungan hidup, dan dapat menanamkan rasa cinta tanah air terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Selama ini, pariwisata telah memberikan kontribusi dalam pemasukan devisa negara dan APBD di beberapa daerah. Pariwisata yang berkembang dan maju akan menarik wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Dampaknya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang lain seperti perhotelan, perdagangan, dan restoran; angkutan dan komunikasi; jasa; pertanian, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (peningkatan PDRB).

Indonesia sebagai negara yang terkenal memiliki banyak potensi wisata baik alam ataupun budaya juga menjadikan pariwisata sebagai salah satu industri yang berperan dalam menambah devisa negara. Banyak obyek wisata yang ada di Indonesia yang telah dikenal tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di mancanegara. Untuk itu pengembangan pariwisata merupakan suatu hal yang diperlukan bagi daerah-daerah yang menjadikan sektor pariwisata menjadi unggulan dan andalan daerah. Pembangunan (pengembangan) pariwisata merupakan peran yang sangat penting bagi pengembangan suatu wilayah, peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya berbagai misi, kebijakan, dan program kepariwisataan, maka daerah yang memiliki potensi pariwisata cenderung mengembangkan potensi daerah yang ada. Pariwisata yang berkembang dan maju menjadi kegiatan ekonomi yang berskala besar di suatu daerah, yang berbasis pada sumber daya alam, sumber daya budaya, obyek daya tarik buatan dan sumber daya lain yang mendukung; dengan melibatkan mobilitas dan pendayagunaan kapital, investasi, dan tenaga kerja serta didukung oleh infrastruktur dan sektor ekonomi lain.

Semenjak berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 2001, Kota Batu menetapkan dan memantapkan daerahnya menjadi Sentra Pariwisata dan Agropolitan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sejalan dengan latar belakang kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Kota Batu yaitu : **Pertama**, kondisi alam yang mendukung berupa daerah dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan yang dilengkapi oleh pemandangan alam yang indah, keadaan suhu udara yang relatif sejuk, potensi alam yang mendukung seperti hutan, air terjun,

perkebunan, sawah dan ladang yang terhampar. Kondisi dan potensi alam Kota Batu serta didukung budaya lokal menjadi potensi **Eco-tourism**. **Kedua**, terdapat beberapa obyek daya tarik wisata (ODT) yang sangat potensial dikelola dan dikembangkan untuk menopang Kota Pariwisata Batu, diantaranya : Wisata Alam (*Air Terjun/ Coban Talun dan Coban Rais, Pemandian Air Panas Cangar dan Songgoriti, Tahura*, dsb); Wisata Agro dan Wisata Bunga (*Kusuma Agro Wisata, Sidomulyo*); Wisata Sejarah dan Budaya (*Candi Songgoriti, Goa Jepang, Heritage, Sedekah Bumi, Kesenian Tradisi, Masjid An-Nur, Gereja Tua Jago, Vihara Budha Kertarajasa, Klenteng Dewi Kwam Im Thong, Makam Mbah Wastu*, dsb); Wisata Rekreasi (*Jatim Park 1 dan 2, BNS, Songgoriti, Selecta*, dsb); Wisata Minat Khusus/ Hobbies (*Paralayang, Arung Jeram, Sepeda Gunung*); dan Wisata Kuliner. **Ketiga**, terdapat potensi pertanian berupa tanaman buah, tanaman sayur dan tanaman bunga yang mendukung **Agro-tourism**. **Keempat**, berkembangnya industri pariwisata dan jasa-jasa pendukung pariwisata seperti restoran/rumah makan, hotel /penginapan, travel agency. Potensi ekonomi masyarakat yang mendukung industri pariwisata contohnya kerajinan, makanan dan minuman khas Kota Batu seperti keripik apel, sari buah, dan sebagainya. **Kelima**, Infrastruktur yang terus dibangun. Sehingga dapat dikatakan, bahwa Kota Batu merupakan Daerah tujuan wisata (Destinasi Pariwisata) yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan; dengan didukung industry pariwisata, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan, serta mendukung bagi upaya untuk menciptakan suatu daerah sentra pariwisata, agropolitan, perdagangan, dan jasa yang terintegrasi.

Untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata dan Agropolitan, pada level kebijakan perlu dirumuskan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah. Hal ini untuk mewujudkan arah dan keterpaduan dalam program-program kepariwisataan dan sektor-sektor lain yang terkait. Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah; mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya; mengembangkan industri, destinasi, pemasaran dan promosi pariwisata; bersifat memberdayakan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah; memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sinergi lintas sektor dan kerjasama antar daerah; serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan dan budaya. Selain itu diperlukan profil terpadu pariwisata sebuah daerah, sehingga dapat memberikan sebuah informasi pariwisata daerah dan membantu dalam perencanaan arah perkembangannya di masa yang akan datang.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Rencana induk pembangunan kepariwisataan di daerah (provinsi/ kabupaten/ kota dikenal dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Pembangunan kepariwisataan di Kota Batu tidak terlepas dengan arah pembangunan kepariwisataan regional yaitu Provinsi Jawa Timur dan daerah-

daerah di wilayah Malang Raya. Dalam rangka pengembangan kepariwisataan provinsi Jawa Timur, Kota Batu diposisikan sebagai salah satu sentra pariwisata, khususnya wisata alam dan agro-wisata. Di lingkup Malang Raya, pengembangan pariwisata Kota Batu perlu disinergikan dengan pengembangan pariwisata Kota Malang dan Kabupaten Malang, di mana kedua daerah ini juga mempunyai banyak potensi wisata.

SWP (Satuan Wilayah Pembangunan) Malang Raya meliputi Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, dengan pusat SWP di Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan perkembangan wilayah Jawa Timur, wilayah Malang Raya termasuk ke dalam wilayah yang didominasi oleh kegiatan industri, pariwisata, perdagangan dan jasa. Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri transportasi, dan sumberdaya energi dengan fungsi pusat SWP (Satuan Wilayah Pembangunan) sebagai pusat pelayanan wilayah, pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan, dan prasarana wisata. Kota Batu yang merupakan SWP (Satuan Wilayah Pembangunan) dari wilayah Malang Raya lebih dioptimalkan dalam pengembangan pariwisata daerah berupa pengembangan agrowisata. Dengan adanya konsep pengembangan pariwisata pertanian yang dikembangkan Kota Batu dikhawatirkan akan terjadi ketidaksesuaian fungsi lahan yang digunakan dalam hal pengembangan pariwisata berbasis pertanian, seperti banyaknya investor yang tertarik untuk mendirikan

usaha pariwisata di Kota batu ke arah industri pariwisata yang nantinya dikhawatirkan terjadi ketimpangan antara lahan produktif yang semestinya dapat digunakan dalam pengembangan pariwisata pertanian menjadi kawasan wisata yang mengarah pada industri pariwisata, maka dari itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur zonasi ruang (zoning) agar pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang dapat optimal dan terarah, serta dibutuhkannya acuan berupa Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dalam pengembangan pariwisata pertanian di Kota Batu. Dalam hal ini tentunya pemerintah daerah Kota Batu khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu yang mempunyai fungsi melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta program yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tata ruang kota memiliki strategi dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peruntukan lahan di Kota batu, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang telah merumuskan strategi pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang memiliki peran aktif dalam mengarahkan peruntukan ruang dalam hal pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata Kota Batu harus mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029 sehingga pelaksanaan tata ruang dapat berjalan secara optimal.

Dalam pembahasan mengenai pengembangan pariwisata penulis memfokuskan pembahasan dalam perspektif pengembangan pariwisata pertanian Kota Batu berbasis tata ruang yang meliputi implementasi dari pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029 serta strategi pemerintah daerah kota batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang. Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang **“STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PERTANIAN BERBASIS TATA RUANG (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang ada adalah:

1. Apakah pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029?
2. Apa strategi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang?
3. Bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang ini dilakukan atas dasar rasa ingin tahu peneliti terhadap pengembangan pariwisata serta kelola tata ruang Kota Batu tahun 2012-2017 baik dari segi pemanfaatan, pengelolaan, serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029. Secara khusus tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis strategi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang.
3. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu

D. Kontribusi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian yang dilakukan penulis terhadap strategi pemerintah daerah dalam

pengembangan pariwisata kota Batu ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap seluruh pihak-pihak yang terkait. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan dapat memberikan wawasan keilmuan yang holistik-integratif sesuai dengan keberadaannya sebagai kajian ilmu sosial khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran maupun landasan pemikiran berkenaan dengan pelaksanaan tata ruang kota serta pembangunan wilayah sehingga mampu menciptakan kelola tata ruang kota yang baik dan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I : Menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

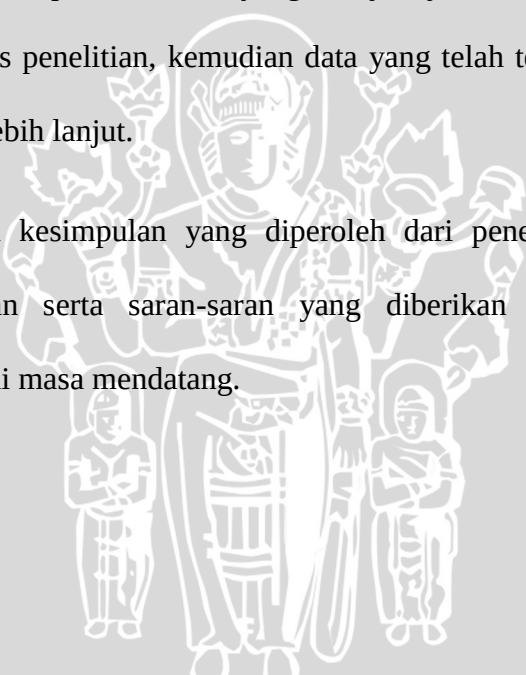
Bab II : Menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat penulis agar nantinya dapat dijadikan landasan dan

pedoman dalam penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan.

Bab III : Berisikan tentang rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

Bab IV : Berisikan gambaran umum Kota Batu beserta data-data yang dapat dihimpun dari permasalahan yang dikaji sejak awal yang tercantum dalam fokus penelitian, kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis lebih lanjut.

Bab V : Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran-saran yang diberikan guna melakukan perbaikan di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi negara. Administrasi pembangunan ini mempunyai fokus analisis berupa proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman (Siagian: 2005)

Selanjutnya, Siagian (2005) menyebutkan definisi dari administrasi pembangunan yaitu sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Selain itu, Tjokroamidjojo dalam Siagian (2005) menyebutkan bahwa administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Dari definisi tersebut dapat diketahui tentang ide pokok dari administrasi pembangunan, yaitu: (1) adanya suatu proses yang berkelanjutan; (2) usaha sistematis yang dilakukan melalui perencanaan; (3) orientasi pada perubahan yang

signifikan dari keadaan sebelumnya, (4) memiliki arah yang lebih modern dan maju dalam segala bidang dalam artian luas mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (5) memiliki tujuan utama untuk membina bangsa.

Dalam tulisan lainnya, Kristiadi (2008) menyebutkan tentang administrasi pembangunan yang melihat dari sisi tujuan administrasi pembangunan itu sendiri, yaitu bahwa tujuan administrasi pembangunan adalah untuk mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan melakukan kegiatan investasi (mengganti atau menambah aktiva tetap), dari sini administrasi pembangunan tersebut akhirnya akan dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan administrasi pemerintahan.

2. Ciri Administrasi Pembangunan

Ciri pokok pertama adalah orientasinya kepada usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong ke arah perubahan-perubahan besar (*basic changes*) di berbagai kegiatan atau bidang kehidupan yang saling terkait dan akan memberikan hasil akhir melalui proses pembangunan. Administrasi pembangunan tidak saja menghendaki suatu administrasi kepegawaian yang rapi tetapi juga menuntut suatu perubahan sistem administrasi kepegawaian yang lebih memungkinkan diperolehnya pegawai-pegawai yang diperlukan pada sektor-sektor prioritas serta yang lebih berorientasikan kepada prestasi.

Ciri pokok kedua pendekatan administrasi pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek

perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain (Bintoro, 1995:11). Dapat disimpulkan bahwa ciri administrasi pembangunan adalah suatu usaha dalam rangka menjadikan suatu kondisi ataupun keadaan dapat lebih baik serta berkelanjutan kemanfaatannya dari waktu ke waktu.

3. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian administrasi oleh negara untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih baik di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dalam proses tersebut diperlukan pengetahuan mengenai ruang lingkup administrasi pembangunan. Ruang lingkup administrasi pembangunan menurut Tjokroaminoto (1988:15), yaitu:

1. Penyempurnaan administrasi negara, meliputi:
 - a. Kepemimpinan, koordinasi, pengawasan.
 - b. Administrasi fungsional kepegawaian, keuangan, sarana-sarana lain, dan kelembagaan dalam arti sempit.
2. Penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meliputi:
 - a. Proses perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan. Sering tercermin dalam suatu rencana pembangunan atau suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten.
 - b. Tata pelaksanaan yang efektif.

B. Perencanaan Pembangunan

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Melihat definisi dasar dari sebuah perencanaan yang mana diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Tjokroamidjojo, 1989: 12), demikian halnya dengan definisi dari perencanaan pembangunan. Selanjutnya,

Tjokroamidjojo juga mengartikan perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan efektif.

Albert Waterson dalam Tjokroamidjojo (1989: 12), juga menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah “melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dan kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan”. Dengan mengambil berbagai pilihan alternatif yang dianggap merupakan alternatif terbaik, maka dalam hal ini akan menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan sangat erat kaitannya dengan perumusan kebijakan (*policy formulation*) pembangunan.

Perencanaan pembangunan merupakan satu tahapan awal dari proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan akan dijadikan sebagai bahan, pedoman, atau acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan perencanaan (action plan). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya bersifat riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik data-data yang bersifat konseptual/dokumentasi maupun data-data eksperimental. Data-data riil lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Dalam Riyadi dan Bratakusumah (2003: 7) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dari berbagai penjelasan mengenai pengertian perencanaan pembangunan, dapat disimpulkan mengenai definisi dari suatu perencanaan pembangunan, yaitu adalah yang menyangkut usaha-usaha untuk menggunakan sumber-sumber pembangunan yang tersedia, dengan mengupayakan berbagai alternatif untuk kemudian dipilih yang terbaik dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang lebih baik pada waktu (masa) yang akan datang.

Perencanaan pembangunan yang sifatnya komprehensif atau menyeluruh membutuhkan kemampuan yang baik agar tercapai tujuan yang diinginkan, atau paling tidak menyentuh daripada kebutuhan masyarakat. Menurut Poppe dalam Riyadi dan Bratakusumah (2002: 26), perencanaan pembangunan mencakup tiga bidang utama, yaitu:

- a. Perencanaan sumber daya alam
- b. Perencanaan sosial ekonomi
- c. Perencanaan fisik dan infrastruktur

2. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan

Mengingat akan begitu luasnya mengenai definisi dari suatu perencanaan, yang mana seringkali terjadi perbedaan di dalam mendefinisikannya, karena perbedaan perspektif (cara pandang), kajian ilmu, dan juga beberapa faktor lainnya. Maka dengan ini dapat ditegaskan bahwa setiap kegiatan perencanaan belum tentu merupakan perencanaan pembangunan, karena ruang lingkup dari perencanaan yang sangat luas tersebut.

Untuk memudahkan dalam memahami mengenai apakah suatu perencanaan termasuk dalam lingkup perencanaan pembangunan, maka perlu diperhatikan karakteristik berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan, yaitu:

- a. Suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady economic growth*) ;
- b. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita ;
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi ;
- d. Perluasan kesempatan kerja ;
- e. Usaha pemerataan pembangunan ;
- f. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan ;
- g. Kemampuan membangun lebih didasarkan pada kemampuan sosial ;
- h. Terdapatnya usaha secara terus menerus dalam menjaga stabilitas ekonomi ;
- i. Ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental/ideal atau yang bersifat jangka panjang. (Tjokroamidjojo, 1989: 49-52).

Pertama, suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady economic growth*). Ini dicerminkan dari usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif. *Kedua*, adalah usaha yang dicerminkan dalam suatu perencanaan pembangunan yaitu untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ini adalah kelanjutan dari ciri yang pertama yaitu tingkat

pertumbuhan ekonomi yang positif, setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk maka akan meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita, kesejahteraan masyarakat akan semakin membaik. *Ketiga*, adalah bahwa perencanaan pembangunan menyangkut usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Ini disebabkan karena pada umumnya di negara-negara dunia ketiga (*under developing country*) struktur ekonominya cenderung ke arah sektor agraris. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan ketimpangan yang cukup besar antar sektor. Oleh karena itu, lebih diusahakan agar lebih seimbang antara perkembangan sektor agraris dengan sektor lainnya, sehingga akan membawa implikasi terhadap keseimbangan struktur ekonomi. *Keempat*, ciri dari perencanaan pembangunan adalah adanya perluasan kesempatan kerja. Hal ini sering menjadi tantangan yang sangat berat yang dialami oleh negara-negara berkembang. Karena perluasan kesempatan kerja bukan berarti hanya usaha untuk menanggulangi pengangguran dan pengangguran tak kentara, tetapi juga menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam dunia kerja dan kehidupan ekonomi. Kelima, usaha pemerataan pembangunan (sering disebut dengan *distibutive justice*), adalah pemerataan yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan antar golongan-golongan dalam masyarakat dan juga pemerataan pendapatan antar daerah.

Ciri selanjutnya adalah menyangkut usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. Berbagai lembaga ekonomi perlu dikembangkan, misalnya koperasi, lembaga keuangan dan lain-lain. Berikutnya yaitu perencanaan pembangunan adalah usaha

sedemikian rupa supaya kemampuan membangun secara vertahap lebih didasarkan pada kemampuan nasional. Peningkatan kemampuan tidak hanya dilihat dari segi modal saja, tetapi juga dari segi kapasitas sumberdaya manusianya. Ciri lainnya adalah usaha yang berkesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dan ciri yang terakhir adalah bahwasannya ada pada beberapa negara yang mencantumkan beberapa aspek fundamental dalam perencanaan pembangunan, misalnya pembangunan bangsa (*nation building*) dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Selanjutnya Riyadi dan Bratukusumah menyebutkan ciri-ciri dari perencanaan pembangunan daerah yang membedakannya dengan jenis perencanaan lainnya adalah:

- a. Menghasilkan program-program yang bersifat umum
- b. Analisis perencanaan bersifat makro/luas
- c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang
- d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas
- e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan) (2003: 9).

3. Jenis-jenis Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dapat dilihat pembedaan-pembedaannya dari segi jangka waktu rencana. Dalam hal ini terdapat tiga jenis perencanaan yaitu:

- a. Perencanaan Jangka Panjang (*Long Term Plan*)

Perencanaan jangka panjang meliputi jangka waktu 10 tahun ke atas.

Perencanaan seperti ini sifatnya ada dua macam yakni:

- Perencanaan jangka panjang yang bersifat studi perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan dengan jangka waktu yang cukup panjang
- Perencanaan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangan dalam masyarakat yang bersifat fundamental dan struktural dalam jangka panjang.

b. Perencanaan Jangka Menengah (*Medium Term Plan*)

Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun. Perencanaan jangka menengah ini akan lebih baik bila dikaitkan dengan perspektif rencana jangka panjang.

c. Perencanaan Jangka Pendek (*Short Term Plan*)

Perencanaan ini meliputi jangka waktu yang cukup singkat, yakni antara setengah sampai dua tahun. Mengenai rencana jangka pendek ini terdapat dua macam rencana, yaitu:

- Rencana memang jangka pendek, yaitu setengah, satu atau dua tahun
- Rencana tahunan

Selanjutnya, Tjokroamidjojo (1998: 24) mengkalifikasikan perencanaan jika dilihat dari segi luas atau kurang luasnya wilayah yang diliputi oleh suatu rencana adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kota

Perencanaan kota adalah suatu perencanaan yang hanya meliputi suatu wilayah kota

- b. Perencanaan Regional
Perencanaan regional adalah perencanaan yang meliputi wilayah yang lebih luas, mungkin suatu daerah administratif tertentu tetapi mungkin juga meliputi daerah administratif, atau suatu wilayah pembangunan.
- c. Perencanaan Sektor Publik
Perencanaan sektor publik, walaupun meliputi seluruh wilayah dari suatu negara, namun hanya menyangkut sektor publik saja
- d. Perencanaan Nasional
Perencanaan nasional adalah perencanaan yang meliputi seluruh wilayah negara (sektor publik) maupun juga sektor masyarakatnya.

Dari aspek wilayah berdasarkan suatu batas tertentu yang hasilnya diberikan dan dialokasikan untuk daerah tersebut dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang ada dalam wilayah tersebut. Maka dalam hal ini jenis perencanaan meliputi:

- a. Perencanaan nasional
- b. Perencanaan daerah, yaitu:
 - Perencanaan nasional
 - Perencanaan pedesaan (Aji dan Sirait, 1982: 28-29)

Dari berbagai pengelompokan mengenai jenis-jenis perencanaan seperti yang telah diungkapkan dalam penjelasan di atas, maka secara keseluruhan, Ginanjar Kartasmita dalam Riyadi dan Bratakusumah (2003: 31) mengklasifikasikan mengenai jenis-jenis perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ruang lingkup tujuan dan sasarannya
 - Perencanaan yang bersifat nasional, sketoral spasial
 - Perencanaan yang bersifat agregatif (komprehensif) dan parsial
- b. Berdasarkan jangkauan dan hierarkinya
 - Perencanaan tingkat pusat
 - Perencanaan tingkat daerah
- c. Berdasarkan jangka waktu

- Perencanaan jangka pendek
- Perencanaan jangka menengah
- Perencanaan jangka panjang
- d. Berdasarkan arus informasi/proses hierarki penyusunannya
 - Perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning*)
 - Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*)
- e. Berdasarkan segi ketepatan atau keluwesan proyeksi ke depannya
 - Perencanaan yang bersifat indikatif
 - Perencanaan yang bersifat preskriptif
- f. Berdasarkan sistem politiknya
 - Perencanaan yang bersifat alokatif
 - Perencanaan yang bersifat inovatif
 - Perencanaan yang bersifat radikal

C. Konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

1. Pengertian Perencanaan Wilayah

Pengertian perencanaan dapat ditinjau dari keinginan subyek-subyek yang mengartikannya. Namun demikian perencanaan oleh berbagai subyek dan disiplin ilmu memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip yang membentuknya.

Perencanaan berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *non-controllable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan sasaran tersebut. (Tarigan, 2002:3)

Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan rumusan perencanaan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu terdapat pada semua jenis usaha manusia;

- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif;
- c. Perencanaan adalah suatu cara penentuan tujuan yang akan dicapai atau akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. (Tjokroamidjojo, 1990:12)

Definisi yang telah disebutkan baru merupakan definisi dari perencanaan namun belum menyentuh unsur wilayah. Yang dimaksud dengan perencanaan wilayah adalah:

Mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut dan menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut. (Tarigan, 2002:4)

2. Pengertian Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Dalam kerangka perencanaan wilayah, maka yang dimaksud dengan ruang wilayah adalah ruang pada permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Kata “ruang” selalu terkait dengan wilayah sedangkan kata “wilayah” terkait dengan batas dan fungsi yang ingin diberikan terhadap ruang tersebut. Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Dirjen Cipta Karya Dep. P.U. dalam Tarigan (2002:54) memberikan definisi tentang ruang sebagai berikut:

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Termasuk di dalamnya lahan/tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan, sebagai suatu kesatuan wilayah

tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Definisi perencanaan tata ruang wilayah memiliki pengertian sedikit berbeda dengan definisi perencanaan wilayah. Definisi dari perencanaan tata ruang wilayah menurut Tarigan (2002:54) adalah:

Perencanaan penggunaan lahan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Penetapan bagian-bagian wilayah yang dengan tegas diatur penggunaannya dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang/ tidak diatur penggunaannya.

Dari definisi tersebut disebutkan bahwa ada bagian-bagian yang tidak/kurang diatur penggunaannya. Hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak memperdulikan bagian-bagian tersebut. Namun untuk masalah pemanfaatannya diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi tidak semua harus diatur pemerintah, namun masyarakat khususnya pemilik modal dapat menggunakan bagian tersebut dengan bebas.

Perencanaan tata ruang wilayah, jika dibagi berdasarkan materi yang dicakup dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu (Tarigan, 2002:55):

1. Perencanaan yang mencakup keseluruhan wilayah yaitu perkotaan dan non-perkotaan (wilayah belakang). Fokus utamanya menciptakan hubungan-hubungan yang serasi antar kota dengan wilayah belakangnya. Misalnya: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
2. Perencanaan khusus wilayah perkotaan. Fokus utamanya adalah keserasian hubungan antara berbagai kegiatan di dalam kota untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan itu sendiri plus kebutuhan masyarakat yang datang dari luar kota. Misalnya: Rencana Tata Ruang Kota (dulu disebut master Plan), Rencana Tata Ruang Ibukota Kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan (IKK).

3. Landasan dan Manfaat Pengaturan Penggunaan Ruang Wilayah

Adanya pengaturan penggunaan ruang wilayah oleh pemerintah bisa membuat masyarakat menjadi pihak yang dirugikan. Masyarakat dirugikan karena lahan yang dikuasai/dimilikinya tidak dapat dengan bebas dipergunakan, sehingga perlu dipertanyakan apa landasan yang dipakai sehingga negara berhak mengatur penggunaan pengaturan ruang. Di Republik Indonesia hak negara untuk mengatur penggunaan ruang secara jelas diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tetapi di negara yang kapitalis sekalipun dimana hak perseorangan sangat dijunjung tinggi, terdapat kesadaran di dalam masyarakatnya bahwa penggunaan lahan memang perlu diatur. Hal ini tidak lain karena manfaat yang akan didapat oleh seluruh masyarakat jauh lebih besar dibanding kerugian yang mungkin akan dirasakan sebagian kecil masyarakat. Selain itu, Whitehead dalam Tarigan (2002:56) menulis “*The market mechanism is unlikely, on its own, to produce on efficient allocation of land uses*”. Mekanisme pasar saja tidak cukup untuk menghasilkan suatu alokasi penggunaan lahan yang efisien. Dan di sinilah diperlukan peran pemerintah untuk campur tangan dalam pengaturan lahan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan Whitehand dalam Tarigan (2002:56-58) mengapa pemerintah perlu campur tangan dalam penggunaan lahan:

1. Pemerintah perlu menyediakan lahan untuk kepentingan umum (*public goods*), dimana apabila diserahkan pada mekanisme pasar maka ketersediannya tidak akan sebanyak yang dibutuhkan.

2. Adanya faktor eksternalitas (externalities) dalam kegiatan manusia, yaitu adanya dampak dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya yang bisa merugikan atau menguntungkan masyarakat, tetapi tidak mempengaruhi penerimaan/pengeluaran institusi yang melakukan kegiatan tersebut.
3. Informasi yang tidak sempurna, menyangkut kondisi saat ini maupun tentang apa yang direncanakan orang saat ini untuk dilakukan dimasa yang akan datang. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dilakukan orang lain atas lahannya padahal penggunaan lahan itu dapat mempengaruhi nilai/kegunaan lahan masyarakat di sekitarnya. Apabila informasi tidak sempurna, maka pasar tidak merespon secara wajar sehingga apa yang dilakukan masyarakat menjadi tidak optimal.
4. Daya beli masyarakat yang tidak merata, sehingga ada pihak-pihak yang dapat menguasai lahan secara berlebihan tetapi ada pihak lain yang sulit mendapatkan lahan.
5. Perbedaan penilaian individu/ masyarakat antara manfaat jangka pendek dengan manfaat jangka panjang. Masyarakat cenderung menilai manfaat jangka pendek lebih penting daripada manfaat jangka panjang. Hal ini cenderung merugikan kepentingan dari generasi yang akan datang. Apabila dibiarkan masyarakat cenderung mengkonsumsi secara berlebihan seluruh potensi alam termasuk mengkonsumsi energi yang tidak terbarukan.

4. Definisi Kota

Sebagaimana dikemukakan oleh Bintarto (1984: 36), kota dapat diartikan sebagai:

Suatu sistem jaringan kehidupan manusia ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.

Memang diakui dan disadari bahwa suatu definisi tentang kota tidak selalu tepat dan hal ini tergantung dari fokus pendekatannya. Dalam hal ini Marbun (1990: 10) menyebutkan ada tiga fokus pendekatan:

- a. Pendekatan geografis-demografis, melihat kota sebagai tempat pemusatan pendidikan walaupun berapa jumlah penduduk tersebut tidak dapat dinyatakan secara pasti.
- b. Pendekatan dari segi ekonomis, melihat kota sebagai pusat pertemuan lalu lintas ekonomi, perdagangan, dan kegiatan industri serta tempat

perputaran uang yang bergerak dengan cepat dan dalam volume yang besar.

- c. Pendekatan dari segi sosio-antropologis melihat hubungan antar manusia yang tinggal di kota sudah renggang dan heterogen, tidak seperti keadaan masyarakat yang terdapat di desa yang biasanya masih akrab dan homogen. Digambarkan bahwa pola saling hubungan masyarakat di kota telah mengarah rasional, logis, impersonal, dan kurang intim.

Sedangkan Hordoy memberikan 10 (sepuluh) kriteria untuk menentukan sebuah kota, yaitu: (Hordoy dalam Gani, 1994: 2)

1. Memiliki ukuran dan penduduk yang besar dilihat dari zaman dan lokasi
2. Bersifat umum
3. Mencapai kepadatan tertentu
4. Jelas struktur dan tata ruangnya
5. Merupakan tempat manusia tinggal dan bekerja
6. Memiliki fungsi minimum seperti adanya pasar, pusat administrasi dan politik, pusat militer, pusat keagamaan, dan pusat cendekiawan
7. Mempunyai penduduk heterogen yang diklasifikasikan secara hierarkis
8. Merupakan suatu pusat ekonomi yang memiliki lembaga
9. Merupakan suatu pusat pelayanan bagi daerah-daerah sekitarnya
10. Merupakan suatu pusat penyebaran falsafah hidup yang dimiliki/sesuai dengan zaman dan lokasi.

Dari beberapa pengertian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kota adalah suatu wilayah geografis dalam batas-batas tertentu yang didiami penduduk dengan kepadatan tertentu dengan corak kehidupan yang bersifat: heterogen, materialistis, individualistis, dan non agraris.

5. Zoning (Pembagian Zona)

Definisi dari pembagian zona atau yang juga disebut sebagai *zoning* menurut Gallion (1992: 147) adalah:

Zoning merupakan peraturan yang sah bagi penggunaan lahan. *Zoning* merupakan penerapan kewenangan pemeliharaan ketertiban bagi perlindungan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan umum. Peraturan tersebut mencakup ketentuan-ketentuan bagi penggunaan lahan dan pembatasan-pembatasan pada bentuk dan isi bangunan yang akan menempati lahan tersebut.

Adapun menurut Silberstein (2000: 33), *Zoning was a way of protecting lower impact uses from higher impact uses. It was also an attempt to protect property values and create certain efficiencies in terms of delivery of services.* Pada intinya Silberstein mengatakan bahwa *zoning* merupakan suatu usaha untuk melindungi lahan dari penggunaan lahan yang merugikan dan juga sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi dalam pemberian layanan.

Adapun kriteria dari peraturan *zoning* seperti yang disebutkan oleh Gallion (1992: 148) adalah:

- a. Rencana itu (peraturan dan peta) harus komprehensif.
- b. Peraturan yang sama berlaku di semua kawasan dengan klasifikasi zona yang sama.
- c. Rencana tersebut harus memperlihatkan perlindungan terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan.
- d. Tidak boleh ada diskriminasi maupun maksud yang berubah-ubah dalam rencana tersebut.
- e. Pengelolaan peraturan tersebut harus baik dan bebas dari keputusan-keputusan yang sewenang-wenang.

Di Amerika Serikat dan hampir setiap negara di dunia, *zoning* telah diakui sebagai salah satu cara untuk mengatur penggunaan lahan. *Zoning* dipakai sebagai landasan dalam menyusun rencana tata ruang mulai dari jenjang rencana yang paling tinggi (rencana makro) sampai kepada rencana yang sifatnya operasional (rencana mikro) di samping juga akan berfungsi sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pembangunan kota. Ketiadaan *zoning* dapat membuat rencana kota bersifat multi tafsir sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang. Tanpa adanya peraturan zonasi juga akan sangat sulit menyiapkan suatu rencana kota yang sifatnya operasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam pelaksanaan pengelolaannya, dapat dilakukan suatu perubahan dalam *zoning*. Namun perubahan *zoning* tidak dapat dilakukan begitu saja, sehingga ada prosedur dan kondisi khusus yang dapat menyebabkan suatu *zoning* dapat diubah. Beberapa prosedur perubahan menurut Gallion (1992: 148) adalah sebagai berikut:

1. Pemindahan Kepadatan

Dalam kasus di mana terdapat penguasaan lahan luas yang mengandung kawasan-kawasan berpotensi banjir atau bahaya lainnya, beberapa peraturan *zoning* memperbolehkan pemindahan seluruh kepadatan yang diizinkan dari lahan yang berbahaya itu ke lokasi yang aman. Proses ini dimaksudkan sebagai perangkat perencanaan yang bermanfaat bila lahan yang berbahaya tadi dapat diubah menjadi ruang terbuka yang berharga atau kawasan rekreasi selama masa-masa tidak berbahaya.

2. Perubahan Zona

Perubahan paling sering terjadi bila pemilik lahan meminta perubahan klasifikasi tanah mereka dari satu kawasan *zoning* lainnya, biasanya untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi. Perubahan-perubahan pada peta *zoning* dapat dilakukan hanya bila perubahan tersebut sesuai dengan rencana komprehensif. Bila tidak, meskipun menguntungkan individu perubahan-perubahan tadi dapat merusak dan menimbulkan biaya yang mahal kepada pemerintah yang dampaknya pada utilitas dan fasilitas umum. Prosedur juga mensyaratkan adanya forum pendapat umum dan pembahasan sebelum perubahan-perubahan itu dilaksanakan.

3. Penyimpangan *Zoning*

Suatu penyimpangan dapat diizinkan sebagai jalan keluar dari beberapa kesulitan tertentu dan luar biasa yang diakibatkan oleh penafsiran peraturan tersebut secara ketat. Penyimpangan ini diizinkan untuk menyesuaikan standar pengembangan lahan dalam peraturan tersebut, yang dengan alasan lokasi, topografi, bentuk, atau ukuran tidak mungkin ditepati. Karena secara diskriminatif mudah dikelola dan perencanaannya yang kurang baik, maka penyimpangan mungkin merupakan yang paling banyak disalahgunakan dari semua prosedur *zoning*.

4. Izin Penggunaan Bersyarat

Ada kesempatan-kesempatan di mana suatu penggunaan khusus yang diperlukan bagi kesejahteraan suatu daerah, tetapi tidak diizinkan dalam zona yang bersangkutan. Izin semacam itu dapat diberikan dengan izin penggunaan bersyarat. Tidak seperti penyimpangan, bukti kesulitan yang luar biasa dalam pengembangan tanah tidak diperlukan. Izin

diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus komunitas berdasarkan bukti bahwa lokasi yang diusulkan akan memenuhi fungsi khusus ini. Perlindungan akan dampak negatif terhadap lahan yang bersebalahan harus dijamin dan tindakan-tindakan untuk ini harus tercakup dalam izin tersebut.

5. Panitia Administratif

Peraturan *zoning* mengandung berbagai macam ketentuan yang untuk memenuhinya bisa memerlukan beberapa bentuk pengkajian dan persetujuan. Di antaranya adalah lokasi dan ukuran tanda-tanda atau rancangan rekayasa dan arsitektur serta pengaturannya. Oleh karena itu, peraturan tadi membutuhkan panitia administratif yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengeluarkan rencana-rencana yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Panitia semacam itu akan bekerja efektif bila anggotanya terdiri dari pejabat pemerintah dan para penyusun rencana.

Dalam rencana *zoning*, suatu wilayah dibagi menjadi kawasan-kawasan di mana penggunaan lahan dibatasi pada penggunaan-penggunaan tertentu saja. Ukuran, bentuk, dan lokasi kawasan-kawasan ini harus dibentuk untuk mengundang perkembangan lingkungan secara alamiah.

D. Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata

1. Pengertian Strategi

Kata strategi yang berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *strategus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* berarti jenderal, namun dalam Yunani Kuno sering berarti perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas (Salusu 2003: 85). Hamel dan Prahalad dalam Umar (2002) menyebutkan kompetensi inti sebagai suatu hal yang penting. Mereka mendefinisikan strategi menjadi:

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dengan apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen

memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Pengertian strategi kemudian berkembang dengan adanya pendapat John Von Neumann seorang ahli matematika dan Oskar Morgenstern seorang ahli ekonomi. Mereka memasukkan istilah *games* dan adanya faktor yang sama dalam *games* yang sesungguhnya. Mereka pun mengakui bahwa teori *games* sesungguhnya adalah teori strategi (Mc Donald dalam Salusu 2003: 87). Teori strategi menyebutkan dua atribut utama yang harus senantiasa diingat yaitu ketrampilan dan kesempatan dimana keduanya merupakan kontribusi bagi setiap situasi strategik. Situasi strategik merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang masing-masing mendasarkan tindakannya pada harapan tentang tindakan orang lain yang tidak dapat ia kontrol, dan hasilnya akan tergantung pada gerak-gerik perorangan dari masing-masing pemeran (Salusu 2003: 87)

Kata strategi dulunya dipakai oleh orang-orang Yunani untuk istilah para jenderal pemimpin pasukan. Dikalangan militer, pengertian strategi adalah metode operasional yang dipergunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan perang secara keseluruhan, dalam suatu pertempuran yang luas atau dalam suatu tenggang waktu yang lama. (Wahab, 1997: 226).

Sedangkan menurut (Bintoro, 1982: 33-35) strategi dapat diartikan :

“Keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan-kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti, guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan. Strategi merupakan “perhitungan” mengenai rangkaian kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan. Dimana dalam strategi itu terdapat metode dan teknik. Selain itu juga Bintoro menjelaskan bahwa startegi merupakan rangkaian

kebijaksanaan dan pelaksanaan dalam rangka memecahkan persoalan tertentu.”

Selain perlunya mengetahui pengertian strategi, ada tiga hal yang tidak boleh dilupakan dan harus menjadi perhatian dalam merumuskan suatu strategi secara efektif, yaitu: (Bintoro, 1982)

1. Mandat

Mandat merupakan suatu keharusan yang memiliki landasan hukum yang secara formal yuridis harus dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Secara organisatoris mandat meliputi berbagai kewajiban, tugas atau fungsi yang harus dilakukan oleh organisasi yang menjadi titik tolak untuk menilai kesiapan organisasi dalam merealisasi visi yang ada

2. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang masih abstrak, tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang. Berarti visi merupakan suatu pikiran yang melampaui realita sekarang, sesuatu atau keadaan yang diciptakan yang belum pernah ada sebelumnya dan akan diwujudkan oleh seluruh anggota organisasi. Visi memberi gambaran kondisi yang akan dicapai oleh organisasi dimasa yang akan datang.

3. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditetapkan. Misi menyatakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diungkapkan dalam bentuk output dan pelayanan yang optimal untuk memenuhi tuntutan, kebutuhan dan keinginan masyarakat yang ada.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana untuk mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah secara sistematis yang harus dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan.

2. Komponen dari Strategi

Secara teoritis Salusu (1996, h.99) menyatakan bahwa konsep strategi berkaitan dengan komponen atau determinan sebagai berikut:

- a. Tujuan dan sasaran: tujuan orang merupakan keinginan yang secara umum hendak dicapai pada waktu yang akan datang. Sedangkan sasaran orang adalah pernyataan yang secara operasional mengarahkan kita pada pencapaian tujuan dalam waktu tertentu, secara periodik bulanan atau tahunan dan terperinci secara jelas.
- b. Lingkungan: tidak dapat disangkal antara orang dengan lingkungan merupakan simbiosis mutualisme, yang berarti keduanya terjadi interaksi yang saling mempengaruhi dan menguntungkan.
- c. Kemampuan internal: kemampuan organisasi untuk melaksanakan rencana kerjanya bertolak dengan tersedianya sumber daya.
- d. Kompetisi: yaitu suasana persaingan yang menyebabkan orang harus mengukur kemampuan internal dengan melihat tantangan dan peluang yang mungkin diraih.
- e. Komunikasi: penyusunan strategi jelas harus dikomunikasikan karena komunikasi akan banyak memberikan informasi mengenai tuntutan lingkungan (internal maupun eksternal) yang tidak kita ketahui dan tidak pernah diramalkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dapat berjalan lancar jika didukung dengan komponen-komponen strategi yang tepat. Diharapkan komponen strategi ini dapat diterapkan bagi perusahaan agar bisa bertahan di lingkungan bisnis yang semakin kompetitif.

3. Tipe Strategi

Perencanaan strategi melibatkan analisis yang mendalam terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Penilaian tersebut harus sesuai dengan visi, misi, tujuan dan kebijakan perusahaan. Dengan kesesuaian tersebut, maka strategi yang ditetapkan akan sinergis dengan perusahaan dan bukannya menghambat pencapaian tujuan dari perencanaan strategi tersebut. Berikut strategi menurut Wheelen dan Hunger (2001, h.24) dibagi menjadi:

- a. Strategi tingkat korporasi adalah, strategi yang menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dari manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.
- b. Strategi tingkat bisnis adalah, strategi yang biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk atau jasa perusahaan dalam industri khususnya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis divisi menekankan pada peningkatan laba dalam produksi dan penjualan produk dan jasa yang dihasilkan. Strategi bisnis sebaiknya juga mengintegrasikan berbagai aktivitas fungsional untuk mencapai tujuan divisi. Strategi bisnis merupakan salah satu dari *overall cost leadership* atau *diferensiasi*.
- c. Strategi fungsional adalah, strategi yang menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas. Dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada disekitar mereka, departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja.

4. Pemilihan Strategi

Pemilihan strategi merupakan proses mengambil keputusan untuk memilih sejumlah alternatif strategi utama yang memungkinkan untuk dipilih.

Menurut Pearce and Robinson (1997, h.362) faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi yaitu :

- a. Peran strategi lalu, penyusunan strategi yang sekarang seringkali juga merupakan arsitek strategi yang lalu. Strategi masa lalu sangat mempengaruhi pilihan strategi sekarang. Makin tua dan makin berhasil suatu strategi maka sukar untuk diganti. Demikian pula, setelah suatu strategi dimulai, sangat sukar diubah karena momentum organisasi terus membuatnya berjalan.
- b. Tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar, jika suatu perusahaan sangat bergantung pada satu atau beberapa elemen lingkungan, alternatif strateginya dan pilihan strateginya harus mempertimbangkan perusahaan pada pihak luar, makin kecil ragam dan fleksibilitasnya dalam pemilihan strategi.
- c. Pertimbangan resiko, sikap terhadap resiko sangat mempengaruhi pemilihan strategi. Jika sikap perusahaan menyukai resiko, kisaran pilihan strategi bertambah luas dan strategi resiko tinggi dapat diterima dan disukai. Bila manajemen bersikap menghindari resiko, ragam pilihan

strategi terbatas dan alternatif yang berisiko tinggi akan dihilangkan sebelum pemilihan strategi dilakukan.

- d. Pertimbangan internal, faktor kekuasaan/politisi mempengaruhi pemilihan strategi. Penggunaan kekuasaan/politisi untuk mendesak kepentingan kelompok merupakan hal yang lazim dalam kehidupan berorganisasi.
- e. Saat (timing), strategi yang baik dapat berbahaya jika dilaksanakan pada waktu yang salah. Oleh karena itu, timing sangat berpengaruh dalam pemilihan strategi.
- f. Reaksi pesaing, dalam mempertimbangkan pilihan strategi, perusahaan seringkali memasukkan persepsi pesaing yang mungkin terjadi terhadap pilihan strategi. Dalam mempertimbangkan pilihan, perusahaan juga harus memperhitungkan dampak yang mungkin terjadi dari reaksi pesaing atas keberhasilan strategi yang dipilih.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, pemilihan strategi merupakan proses yang sangat penting. Karena pada dasarnya memang membutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Disisi lain, terkadang suatu perusahaan juga mendatangkan konsultan yang ahli dibidangnya, dengan tujuan untuk mengetahui apakah strategi tersebut pantas diterapkan atau tidak, serta risiko apa saja yang akan dihadapi.

5. Pengertian Pengembangan

Istilah “Pengembangan” berasal dari kata “Kembang” dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994: 473). Pengembangan berarti “Proses, cara, perbuatan,

mengembangkan, pemerintah berusaha dalam pengembangan secara bertahap dan teratur yang menjerumus ke sasaran yang dikehendaki. Definisi lain menurut (Yoeti, 2008: 273) pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada.

Terkait dengan penelitian ini, pengembangan dimaksud atau diartikan sebagai peningkatan mutu terhadap fasilitas pendukung dalam kegiatan kepariwisataan.

“Alasan utama pengembangan pariwisata suatu daerah, adalah tujuan wisata pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan daerah atau negara tersebut. Dengan kata lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak.” (Yoeti, 2008: 77).

Kita menyadari bahwa bila suatu daerah tujuan wisata pariwisatanya berkembang dengan baik, dengan sendirinya akan memberikan dampak positif bagi daerah itu, karena itu dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup luas bagi penduduk setempat. Secara langsung dengan dibangunnya sarana dan prasarana kepariwisataan di daerah itu amak tenaga kerja akan banyak disedot oleh proyek-proyek: pembuatan tempat-tempat rekreasi, angkutan wisata, pusat perbelanjaan, *souvenirshop*, dan tempat-tempat hiburan lainnya.

Terkait dengan definisi tersebut, pengembangan atau pembangunan merupakan suatu cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu sasaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kepariwisataan sangat erat kaitannya dengan Administrasi Pembangunan, karena dengan berkembangnya tempat wisata di suatu daerah, akan dapat memberikan dampak positif bagi daerah tersebut,

misalnya membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat, mendorong pembangunan dan memperbesar pendapatan daerah, memperkaya kebudayaan daerah, serta dapat melestarikan lingkungan hidup.

6. Implementasi Program

Menurut Grindle dalam Sabu (2012: 39) menyatakan bahwa, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Sabu (2012: 39), terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien.

Pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis. Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus pada pertanyaan

dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.

Sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012: 34) mengemukakan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi-implementasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dukungan dan koordinasi dengan instansi lain sangat dibutuhkan dalam implementasi program. Maka dari itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik agen pelaksana

Agar pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

7. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Ditinjau dari sudut bahasa atau dikaji secara etimologis, maka kata pariwisata bersal dari bahasa sanskerta, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yoeti (1996: 112) bahwa:

“Pariwisata terdiri dari dua suku kata “pari” dan “wisata”. Pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar lengkap, dan wisata berarti perjalanan, bepergian. Atas dasar dasar itulah maka pariwisata diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lainnya.”

b. Jenis-jenis Pariwisata

Pemahaman mengenai jenis-jenis pariwisata perlu dilakukan sebagai salah satu dasar bagi identifikasi yang nantinya akan banyak membantu dalam

menyusun data atau informasi yang akan banyak berguna dalam pengambilan keputusan. Pemahaman terhadap karakteristik tiap jenis pariwisata juga perlu dimiliki demi mendapatkan pengetahuan tentang pola kecenderungan yang terjadi bila dilihat dari beberapa hal misalnya bila dilihat dari kesesuaiannya dengan suatu daerah tujuan wisata tertentu, prospek ke depannya, dan sebagainya. Pendit (1999: 42-48) menyebutkan jenis-jenis pariwisata sebagai berikut:

- 1) **Wisata Budaya**
Wisata yang berhubungan dengan kebudayaan atau unsur-unsur budaya di daerah tujuan wisata yang dikunjungi misalnya melakukan kunjungan wisata untuk mempelajari keadaan masyarakat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat, cara hidup, budaya dan seni masyarakat yang dikunjungi.
- 2) **Wisata Kesehatan**
Wisata jenis ini ditandai dengan perjalanan dan tinggal sementara di suatu tempat demi kepentingan istirahat dan meninggalkan rutinitas padat sehari-hari yang terjadi di tempat tinggalnya atau di tempat dia bekerja. Jenis wisata ini misalnya wisata yang lebih banyak mengandung aktivitas relaksasi atau pengobatan seperti mengunjungi peristirahatan mata air panas yang mengandung mineral yang bisa menyembuhkan, suhu dan kesegaran udara yang menyembuhkan dan lain-lain.
- 3) **Wisata Olahraga**
Wisata ini memiliki daya tarik utama berupa pelaksanaan suatu *event* olahraga dimana wisatawan-wisatawan yang berkunjung untuk melakukan permainan atau pertandingan olahraga atau sekedar menonton suatu perhelatan olahraga, misalnya Asean Games, olimpiade, piala dunia dan lain-lain.
- 4) **Wisata Komersial**
Meski banyak pihak yang menyebutnya bukan suatu kunjungan wisata namun belakangan ini jenis wisata komersial masuk dalam kategori wisata dikarenakan para pengunjung wisata komersial ini juga menggunakan dan membutuhkan sarana atau fasilitas pendukung sebagaimana wisatawan pada umumnya, seperti akomodasi, keperluan transportasi dan sering juga di dalamnya disertakan pertunjukan seni khusus sebagaimana terdapat dalam kunjungan wisata lainnya.
- 5) **Wisata Industri**
Kegiatan utamanya berupa peninjauan atau penelitian ke bengkel-bengkel industri besar oleh mahasiswa atau pelajar juga ilmuwan.
- 6) **Wisata Politik**

Ditandai dengan aktivitas utama berupa kunjungan atau peran aktif dalam kegiatan politik perayaan kemerdekaan suatu negara, inagurasi pelantikan presiden, konverensi atau kongres politik, dan lain-lain.

7) Wisata Konvensi

Masih berkaitan dengan wisata politik, menyediakan fasilitas konvensi, konverensi, musyawarah misalnya *International Congress Center*, di Berlin atau Balai Sidang Senayan di Jakarta dengan fasilitas akomodasi dan perjalanan.

8) Wisata Sosial

Wisata ini didesain untuk tidak memberikan pelayanan yang mewah, biasanya diperuntukkan bagi pelajar, mahasiswa atau pihak lain dengan anggaran yang terbatas.

9) Wisata Pertanian

Pengaturan suatu perjalanan menuju kawasan pertanian atau perkebunan, ladang pembibitan dan lain-lain.

10) Wisata Marina atau Wisata Bahari

Berupa kegiatan olah raga air atau pemandangan air baik danau, laut, sering juga disebut *wisata tirta*.

11) Wisata Cagar Alam

Berupa kunjungan wisata ke lokasi cagar alam, hutan lindung, taman nasional, safari yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.

12) Wisata Buru

Wisata ini dilakukan di negeri atau kawasan yang memang telah diijinkan oleh pihak yang berwenang setempat untuk melakukan olah raga perburuan terhadap binatang-binatang tertentu.

13) Wisata Pilgrim

Wisata ini berkaitan dengan agama, sejarah, adat istiadat, kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat bisa dilakukan ke tempat-tempat peribadatan suci, makam tokoh tertentu yang diagungkan atau tempat tertentu yang dianggap keramat.

14) Wisata Bulan Madu

Wisata ini diarahkan bagi pengantin baru dengan fasilitas khusus bulan madu.

c. Pengembangan Kepariwisata

Istilah “*pengembangan*” berasal dari kata “*kembang*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan berarti “*proses, cara, perbuatan mengembangkan*” pemerintah selalu berusaha dalam pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki (Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, 1991: 473). Sedangkan menurut Johara T. Joyadinata

(1992: 2), pengembangan adalah : *“usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada”*.

Terkait dengan penelitian ini, pengembangan dimaksud diartikan sebagai peningkatan mutu terhadap fasilitas pendukung dalam kegiatan kepariwisataan.

d. Potensi Pariwisata

Menurut W.J.S Poerwadarminta (1989: 776) potensi diartikan sebagai: *“kesanggupan, kekuatan, kemampuan”*

Sajogja (1990: 151) mengartikan potensi sebagai *“kemampuan yang mungkin dapat diaktifkan dalam pembangunan yang mencakup alam, dan manusia serta hasil kerja manusia itu sendiri.*

Dengan demikian potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang dapat diaktifkan dalam pembangunan yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta hasil kerja dari pengolahan manusia dengan alam.

e. Konsep Agrowisata

Menurut undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang Kepariwisata, wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Agrowisata, secara umum didefinisikan sebagai konsep yang mengandung suatu kegiatan perjalanan atau wisata yang dipadukan dengan aspek – aspek kegiatan

pertanian. Agrowisata bila ditinjau dari aspek substansinya lebih dititikberatkan pada upaya menampilkan kegiatan pertanian dan suasana pedesaan sebagai daya tarik utama wisatanya serta dengan tidak mengabaikan sisi kenyamanan. Pengertian ini mengacu pada ciri kegiatan wisata yang rekreatif, ditambah lagi dengan unsur pendidikan dalam kemasan paket wisatanya dan unsur sosial ekonomi (Chamdani, 2008).

8. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)

Pembangunan pariwisata perlu dipersiapkan secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan agar tujuan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Penerapan otonomi daerah yang memberi kewenangan bagi daerah untuk mengoptimalkan segenap potensi yang dimiliki termasuk dalam pariwisata, menjadi dasar pembangunan pariwisata di daerah agar manfaat sebesar-besarnya dapat dirasakan dan digunakan untuk pembangunan daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pariwisata merupakan salah satu sektor yang telah mengambil peran penting dan cukup strategis dalam perekonomian dan saat ini terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari waktu ke waktu, bersamaan dengan peningkatan konsumsi komoditas wisata sebagian masyarakat di negara-negara maju. Pertumbuhan tersebut, salah satunya dapat dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan internasional dari tahun 1950 sampai 2010, yang telah mencatat 25 juta sampai 490 juta orang dengan pertumbuhan setiap tahunnya rata-rata 6,2% (UNWTO, 2011). Bahkan pada tahun 2020 diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 1,6 miliar kunjungan wisatawan

dunia, dengan sebagian besar, yaitu 1,2 milyar, merupakan wisatawan regional dan hanya 378 juta orang yang merupakan wisatawan jarak jauh (*long houl*).

Perkembangan tersebut telah berimplikasi positif terhadap kemajuan pariwisata Indonesia, dimana hingga saat ini pariwisata telah berkontribusi cukup signifikan untuk pembangunan perekonomian dan peningkatan devisa negara.

Kota Batu merupakan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan kekayaan alam dan budaya yang sangat besar dan beragam. Selain letak geografisnya cukup strategis, sangat dimungkinkan untuk terus dikembangkan menjadi sebuah destinasi pariwisata yang berkualitas, bertaraf internasional, dan bisa dijual kepada wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara dengan sentuhan pengelolaan yang professional.

Kota Batu mendapatkan julukan “*De Klein Switzerland*” atau Swiss kecil di Pulau Jawa yang memiliki banyak obyek dan daya tarik wisata unik dan khas. Beberapa obyek wisata tersebut tersebar di 3 (tiga) kecamatan di wilayah Kota Batu, yaitu: obyek dan daya tarik wisata alam, obyek dan daya tarik wisata budaya dan sejarah, obyek dan daya tarik wisata buatan. Selain beberapa obyek dan daya tarik wisata tersebut, juga terdapat desa-desa wisata yang mulai tumbuh berkembang. Desa-desa tersebut menawarkan suasana khas dan unik, sehingga banyak diminati wisatawan untuk rehat. Disamping keberadaan obyek dan daya tarik wisata sebagai magnet bagi wisatawan berkunjung, juga terdapat fasilitas akomodasi, mulai berbentuk penginapan *homestay* hingga hotel berbintang, yang dapat menunjang kegiatan pariwisata di Kota Batu.

Dalam konteks tersebut, maka pengembangan kepariwisataan di Kota Batu harus digarap secara serius dan terarah agar pengembangan pariwisata dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Pembangunan kepariwisataan Kota Batu yang terarah tersebut, perlu menjadi komitmen semua stakeholder pariwisata terutama pemerintah Kota Batu. Hal ini dapat dilihat bahwa sektor kepariwisataan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan Kota Batu, sehingga mengindikasikan bahwa potensi tersebut perlu dikembangkan dan dikelola secara professional. Pemerintah Kota Batu menyadari akan pentingnya menyiapkan *grand design* pembangunan kepariwisataan Kota Batu yang dapat berfungsi sebagai pondasi dan dasar penting dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan di wilayah Kota Batu.

Penyiapan *grand design* tersebut dilakukan dengan menyusun dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa setiap daerah wajib menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Dokumen ini pada dasarnya mencakup materi pokok ketentuan program kepariwisataan, yang meliputi: destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

RIPPDA Kota Batu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepariwisataan Propinsi Jawa Timur yang didasarkan pada kondisi kepariwisataan secara internal dan eksternal, yaitu : a) tantangan pengembangan kepariwisataan

yang semakin ketat pada tataran lokal, regional, nasional maupun Internasional, dan b) keinginan kuat seluruh *stakeholders* pariwisata, terutama pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan keunggulan saing dan keunggulan banding kepariwisataan Kota Batu sekaligus menjadikan Kota Batu sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional.

Atas dasar kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Batu menganggap penting untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengembangan kepariwisataan Kota Batu di masa yang akan datang, sekaligus memberikan arahan (*guidance*) bagi *stakeholders* terkait, baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

E. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan adalah tindakan atau pola dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kepranataan penyelenggaraan pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi dan menjunjung tinggi keinginan rakyat melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan yang efektif. Pemerintahan juga diartikan sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan negara atau pengelolaan (*management*), dimana intinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan

pemerintah. Pemerintahan adalah sistem yang dijalankan oleh pemerintah dalam menjalankan suatu negara (www.wikipedia.org/wiki/pemerintahan).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah sendiri ialah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Secara teoritis keberadaan pemerintahan daerah dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Dalam ilmu politik, keberadaan pemerintahan daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah (Maas dalam Muluk, 2007). Dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan individu melalui kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran *public goods* (Smith dalam Muluk, 2007). Dalam ilmu administrasi, pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam disetiap lokasi berbeda (Littere dalam Muluk, 2007). Dalam bidang administrasi pembangunan, pemerintahan daerah mencerminkan strategi integrasi nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sekaligus partisipasi.

2. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, selalu diperhatikan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya di era otonomi daerah sekarang ini. Prinsip-prinsip ini perlu diperhatikan karena dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pada suatu daerah otonom tingkat kesejahteraan masyarakat beserta pembangunan daerah setempat harus lebih diperhatikan dengan seksama. Seperti yang dipaparkan oleh Jimung (2005:80), terdapat lima prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, yaitu:

- a. Prinsip Kesatuan
Pelaksanaan pemberian otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, memperkuat Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.
- b. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab
Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.
- c. Prinsip Pemencaran
Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif membangun daerahnya. Artinya, pemerintahan bukan sebagai raja, melainkan pelayan untuk dan bersama rakyat membangun daerahnya.
- d. Prinsip Keserasian
Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
- e. Prinsip Pemberdayaan
Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam aspek pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

3. Peran Pemerintah Daerah

World Bank (1997) menjelaskan bahwa fungsi pemerintah daerah secara umum terdiri dari peran minimal, peran antara dan peran aktif. Peran tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

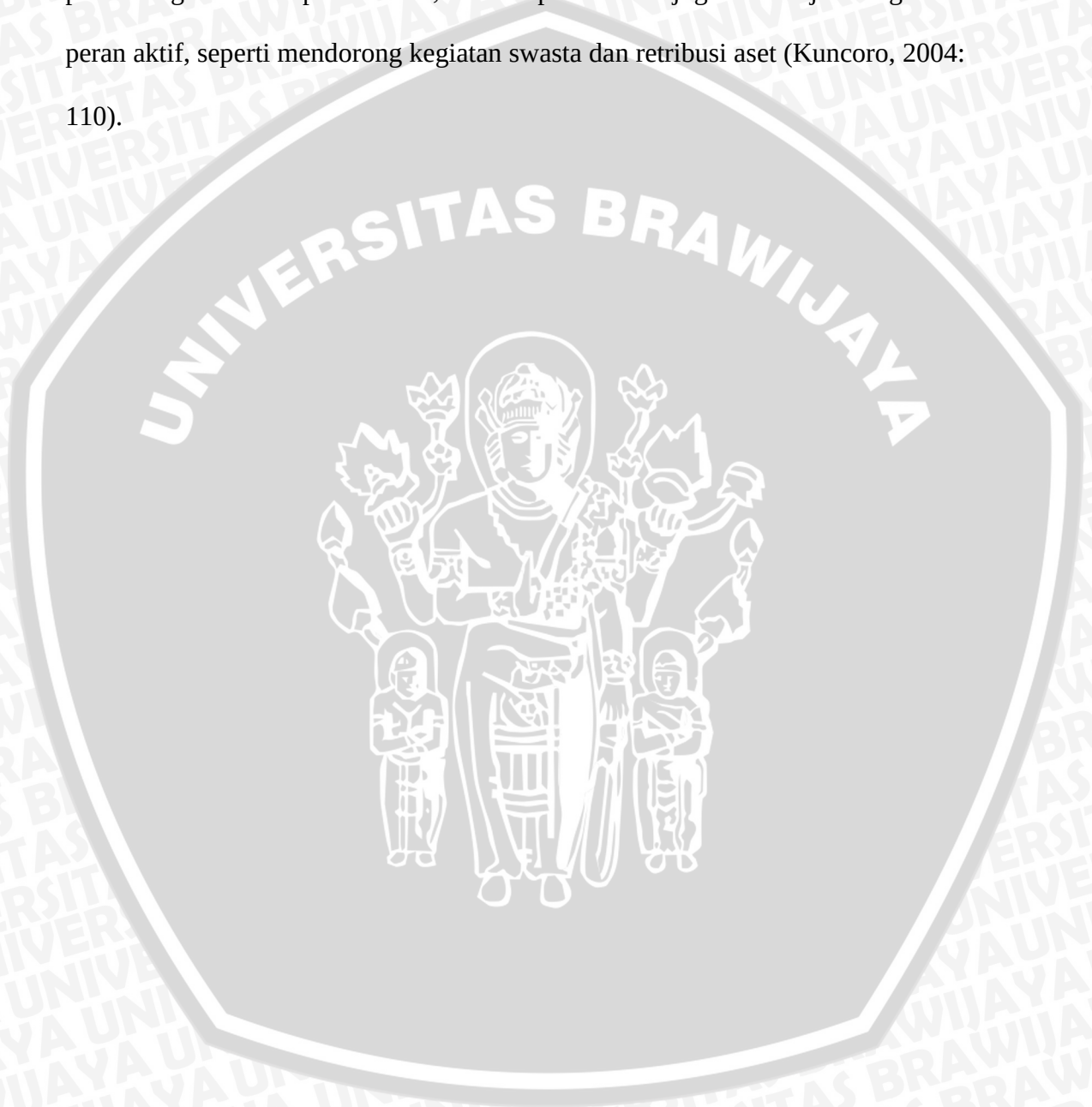
Tabel. 1 Peran Pemerintah Daerah menurut World Bank 1997

	Menanggulangi Kegagalan Pasar	Meningkatkan Pemerataan
Peran Minimal	Menyediakan barang-barang publik	Program pengentasan kemiskinan, Bantuan Bencana
	Pertahanan	
	Keamanan	
	Manajemen Ekonomi Mako	
	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Publik	
Peran Antara	Menanggulangi Eksternalitas	Menyediakan Asuransi Sosial: Pemerataan Pensiun, Dana Pensiun, Tunjangan, Pengangguran
	Mengatur Monopoli	
	Mengatasi Informasi yang Tidak Sempurna	
Peran Aktif	Mengkoordinasi Kegiatan Swasta: Mendukung Fungsi Pasar dan Memberikan Inisiatif	Redistribusi Aset

Sumber: World bank (1997)

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa peran pemerintah tidak hanya ditujukan pada pemenuhan aspek kebutuhan dasar masyarakat, namun pemerintah juga berperan dalam penanganan isu kemiskinan, kesehatan dan pemerataan ekonomi. Hal ini dimaksudkan karena dalam era otonomi daerah khususnya pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatasi isu-isu yang berkenaan dengan permasalahan masyarakat yang mendasar, sehingga diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Jika ditinjau dari konteks Indonesia, peran pemerintah setidaknya mencakup peran minimal yang meliputi penyediaan barang-barang publik dan perlindungan terhadap si miskin, namun pemerintah juga bisa saja mengambil peran aktif, seperti mendorong kegiatan swasta dan retribusi aset (Kuncoro, 2004: 110).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, peneliti dapat memilih satu alternatif dari berbagai macam metode penelitian yang ada. Metode penelitian ini dapat digunakan dalam penemuan, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data sehingga dapat dikatakan bahwa metode penelitian dapat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan untuk memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan. Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena merupakan salah satu unsur vital yang menunjang tercapainya hasil suatu penelitian. Pada dasarnya, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dalam rangka mengetahui strategi pemerintah daerah Kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasari anggapan bahwasannya metode ilmiah yang dianggap paling tepat untuk menjangkau, menjelaskan dan menggambarkan segala permasalahan dan data yang ada dengan lebih mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4) memberikan penjelasan tentang pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesa, tetapi perlu memandangnya sebagai dari sesuatu keutuhan.

Melalui metode kualitatif peneliti pada tahap awal melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala dalam hal ini dengan memberikan gambaran dan analisis secara mendalam terkait strategi pemerintah Kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang. Moleong (2011:6) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Sedangkan penelitian deskriptif adalah pilihan peneliti karena tujuan peneliti yaitu ingin mendapatkan data untuk mendeskripsikan keadaan atau fenomena secara menyeluruh berkenaan dengan strategi pemerintah Kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029. Penelitian deskriptif sendiri lebih mengarah pada data yang berbentuk olahan kata, serta hasilnya berupa sajian ataupun kutipan-kutipan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang akan dijadikan sebagai wilayah penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Penetapan fokus penelitian juga sebagai upaya pencegahan terjadinya pembiasan didalam mendeskripsikan dan membahas masalah yang sedang diteliti. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong,2011:97).

Menurut Moleong (2011:94), dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan fokus penelitian untuk membatasi studi sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan juga dapat menyaring informasi yang lebih relevan. Selain itu dalam penelitian kualitatif juga menghendaki batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh moleong sebelumnya, dengan adanya fokus penelitian yang tepat dan jelas maka akan memudahkan peneliti untuk memilah data yang sekiranya perlu ataupun tidak untuk digunakan.

Dengan penjelasan tersebutlah, maka peneliti merasa penting untuk menentukan fokus penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti berusaha membuat suatu fokus penelitian dari seluruh objek penelitian yang akan diteliti. Fokus penelitian ini secara umum didefinisikan sebagai “hal-hal yang dijadikan fokus atau pusat perhatian dalam penelitian sehingga dapat membatasi studi yang dilakukan”. Dengan demikian peneliti dapat memasukkan data yang tepat dan relevan sehingga penelitiannya lebih akurat dan sesuai dengan disiplin ilmu dan tema yang dipilih.

Berdasarkan judul dari penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu, Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang, dengan rumusan masalah tentang kesesuaian pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029, strategi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang serta faktor pendorong dan faktor penghambat pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota batu tahun 2010-2030 yang mengatur mengenai pembagian zona kawasan.

2. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029 yang mengatur mengenai pengembangan pariwisata pertanian di Kota Batu.
3. Pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang.
 - a. Lokasi serta penempatan
 - b. Fungsi dan manfaat
 - c. Pengelolaan
4. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Batu dengan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang.
5. Faktor pendorong dan faktor penghambat pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Moleong (2011:128) mengemukakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan. Sementara itu, Bogdan dan Taylor (1992:34) berpendapat bahwa lokasi yang layak dipilih untuk diteliti adalah lokasi yang didalamnya terdapat persoalan substantif dan teoritik. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek

yang akan diteliti. Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batu. Hal ini dikarenakan pariwisata pertanian berbasis tata ruang sedang dikembangkan di Kota Batu .

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah menunjukkan dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari obyek yang akan diteliti, sehingga keakuratan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian dapat diperoleh (Henny,2014:86). Maka yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu, Jalan Bukit Berbunga 13a Batu – Jawa Timur serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, Jalan Sultan Agung 7B Batu, Jawa Timur. Pemilihan situs ini dikarenakan pada lokasi tersebut terdapat data dan informasi yang akurat dan relevan berkenaan dengan pengembangan pariwisata pertanian Kota Batu berbasis tata ruang.

Penetapan lokasi dan situs penelitian di atas juga didasari atas pertimbangan-pertimbangan pribadi peneliti sebagai berikut:

1. Peneliti ingin mengetahui strategi pemerintah kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang, karena kota Batu yang merupakan kota wisata sedang mengembangkan pariwisatanya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya alam serta potensi yang ada disana khususnya di bidang pertanian.
2. Peneliti memahami wilayah, kondisi, dan posisi lokasi penelitian kota Batu khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan magang sehingga dalam proses

penelitian lebih dapat dimudahkan dengan pengamatan diawal sewaktu melakukan kegiatan magang serta dimudahkan dalam pencarian data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi peneliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, jenis dan sumber data dipilih secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dan bersifat *snowball sampling* yaitu dimana unit sample yang dipilih makin lama semakin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian (Henny,2014:68). Sementara itu, Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (2011:157) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini karena menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti tidak menggunakan kuesioner, namun menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer, sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan. Sedangkan untuk data sekunder peneliti langsung mendatangi situs penelitian yang menurut peneliti bisa memberikan data-data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada lokus dan situs penelitian di atas.

Oleh karena itu maka peneliti membagi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan, peneliti dalam menentukan informan awal melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian peneliti memilih informan secara *purposive*, pada subyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti “*key informan*”

baik di pemerintahan maupun masyarakat. Kemudian untuk mendapatkan informan selanjutnya, peneliti meminta kepada informan awal untuk menentukan siapa aktor selanjutnya yang kompeten dan bisa memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Cara seperti ini dikenal dengan istilah “snowball” yang dilakukan secara sejalan atau berurutan sampai peneliti mencapai titik jenuh. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informasi kunci sesuai dengan bidangnya dan jumlah informan ditetapkan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan waktu dan tempat di mana untuk meneliti informan, selain itu juga tingkat pemahaman informan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Dokumen, yakni teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan atau kebijakan-kebijakan yang lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah Kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang. Selain itu peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian. Teknik ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi informasi peneliti dan untuk mendapatkan data yang akurat.
3. Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang.

Berdasarkan sumber, penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

1. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan yang berkaitan serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti (Henny,2014:70).
2. Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data yang diperoleh dari buku-buku literatur, dan dokumen-dokumen, dalam hal ini yang berhubungan dengan strategi pemerintah daerah Kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang. Data sekunder yang diperlukan serta dikumpulkan dalam penelitian ini adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta berbagai literatur dan artikel yang berhubungan dengan strategi pemerintah daerah kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono,2008:224). Sugiyono (2012:225) membedakan teknik pengumpulan data menjadi empat bagian yaitu

observasi, interview, dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Hasan dalam Emzir (2012:50) mendefinisikan wawancara sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan. Salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari narasumber terkait strategi pemerintah daerah kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang. Wawancara/ interview ini dilakukan pada waktu dan saat yang tepat untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dan dapat mengungkap tentang strategi pemerintah daerah kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang.

2. Observasi

Ketika peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia perlu memerhatikan sendiri berbagai fenomena, atau

kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai ‘perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu’ (Emzir,2012:37). Pengamatan dilakukan untuk melihat interaksi nyata antara objek penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan pariwisata pertanian kota Batu berbasis tata ruang.

3. Dokumentasi

Metode ini bertujuan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Dokumentasi dapat dijadikan bukti tambahan untuk keakuratan penelitian. Dan untuk memberikan gambaran tentang kondisi empiris dilapangan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto dalam Hasan (2002:76) adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2012: 222). Sedangkan menurut Arikunto (2006 : 136), Instrumen penelitian adalah alat fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah:

1. Peneliti, dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya.
3. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa peralatan penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui HP peneliti, serta buku saku kecil.

G. Metode Analisis

Analisis data menurut Patton (1980) dalam Basrowi (2008:268) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan

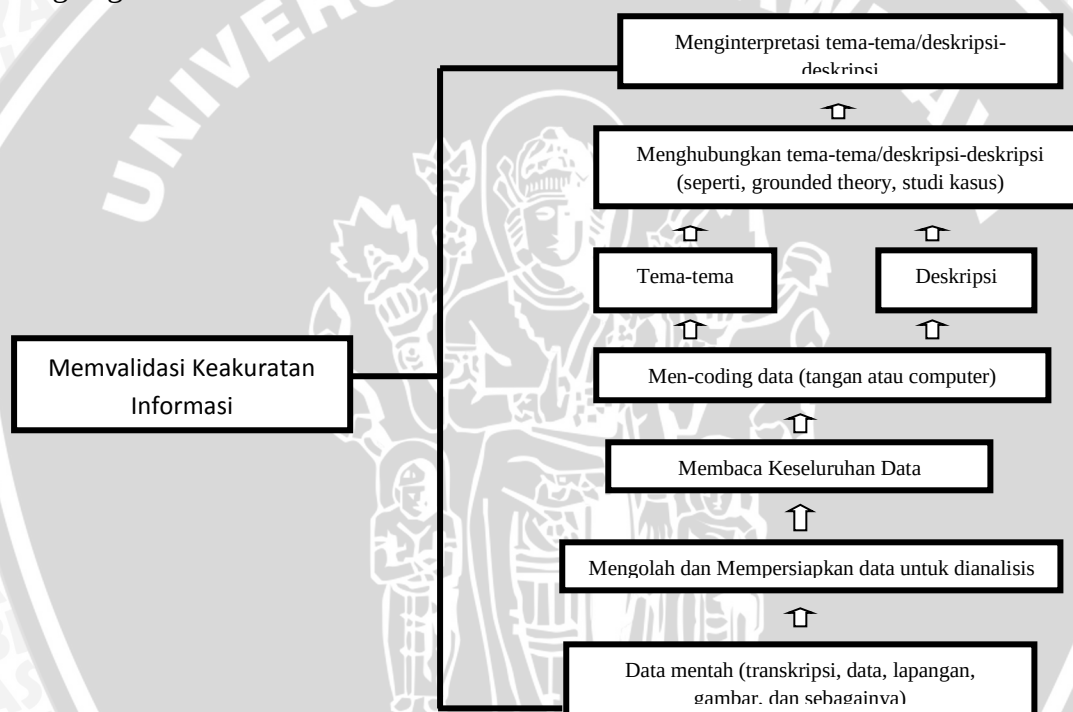
satuan uraian dasar. Analisa data merupakan bagian yang penting, maka data-data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder akan diolah disusun secara kualitatif, setelah itu disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, kemudian dianalisis dengan mengadakan data-data yang bersifat umum menjadi data-data yang bersifat khusus dan logis.

Sementara itu, Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2011:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis-analisis berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah. Peneliti berlandaskan pada pernyataan Creswell (2012) yang mengungkapkan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara

berlangsung, misalnya, peneliti sambil melakukan analisis terhadap data-data yang baru saja diperoleh dari hasil wawancara, menulis catatan-catatan kecil yang dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan memikirkan susunan laporan akhir.

Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh John W. Creswell. Untuk lebih jelasnya, dapat dijabarkan dengan gambar berikut :



Gambar 1. Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif (Sumber: Creswell,2012:277)

Pendekatan diatas dapat dijelaskan lebih mendalam dan detail dalam langkah-langkah analisis berikut :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-

jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Dalam tahap ini, tentunya peneliti akan mempersiapkan data yang relevan dengan strategi pemerintah daerah kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang.

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas Informasi yang diperoleh dan me-refleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan, Bagaimana inti gagasan-gagasan tersebut, Bagaimana kesan yang timbul, kredibilitas, dan penuturan informasi itu. Pada tahap ini, peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh mengenai strategi pemerintah daerah kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang.

3. Menganalisis lebih detail dengan *men-coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossman & Rallis, 1998:171). Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf) atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan (disebut istilah *in vivo*). Pada tahap ini, peneliti memilah-milah mana data penelitian yang termasuk dalam sub tema 1) Strategi pemerintah daerah kota Batu dalam pengembangan

pariwisata pertanian berbasis tata ruang, 2) Pengembangan pariwisata pertanian kota Batu berbasis tata ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2010-2020 serta, 3) Faktor pendorong dan faktor penghambat pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu.

4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. *Deskripsi* ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* tertentu yang ada di dalam proses penelitian tentang strategi pemerintah daerah kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini akan disajikan kembali dalam laporan penelitian sebagaimana peneliti lakukan dalam analisis data. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan hasil analisis melalui pendekatan naratif terkait dengan strategi pemerintah daerah kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang.
6. Langkah terakhir adalah meng-interpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari proses penelitian akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan (Lincoln & Guba, 1985). Hal tersebut dapat berupa interpretasi pribadi

peneliti, dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian. Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Pada tahap terakhir ini, peneliti tentunya akan memberikan interpretasi pribadi dan mengkaitkannya dengan teori/literatur terkait strategi pemerintah daerah kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Kota Batu

a. Sejarah Berdirinya Kota Batu dan Pemerintahan Kota Batu

Sejak abad ke 10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayahnya berada di daerah pegunungan dengan udara yang sejuk, didukung oleh keindahan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan.

Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa pemerintahan Hindia Belanda masih ada dan menjadi aset serta menjadi kunjungan wisata hingga saat ini. Bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Batu dengan sebuah negara di Eropa yaitu Switzerland dan memberikan predikat sebagai De Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa.

Berdasarkan sejarah, sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu.

Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya

lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur.

Masa Pemerintahan Kota Batu sampai dengan tahun 1993 secara administratif Kota Batu dahulu merupakan salah satu bagian (kecamatan) dari Kabupaten Malang. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1993 tepatnya tanggal 6 Maret – berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 1993 tentang Peningkatan Status Kecamatan Batu menjadi Kotatiff Batu maka berubahlah status dari Kecamatan Batu menjadi Kota Adminsitratif Batu.

Pada tahun 1993-2001, dengan berubahnya status Batu menjadi kota Administratif (1993) yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo, dan pejabat walikota pertama yaitu Drs. Chusnul Arifin Damuri. Seiring perkembangan otonomi daerah dan semangat masyarakat Batu untuk mandiri, maka pada tahun 2001 tepatnya per tanggal 17 Oktober, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, maka secara resmi jadilah Kota Batu sebagai daerah Otonom baru.

Pada tahun 2001 tepatnya tanggal 17 Oktober 2001 merupakan hal yang bersejarah khususnya bagi masyarakat Kota Batu, karena pada hari itu merupakan hari lahirnya Pemerintah Kota Batu sebagai Kota Otonom. Pada tanggal 22 Oktober 2002 Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Otonomi Daerah melantik Drs. Imam Kabul sebagai walikota Batu untuk masa jabatan 2002-2007.

b. Visi dan Misi Kota Batu

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2012-2017, arah kebijakan pembangunan Kota Batu adalah untuk visi dan misi tahun 2012-2017. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke arah mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Hakikat visi Kota Batu adalah gambaran secara proyektif dan rasional tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Batu dalam kurun waktu tertentu. Dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan Kota Batu, visi Kota Batu tahun 2012-2017 adalah “Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional Ditunjang Oleh Pendidikan yang Tepat Guna dan Berdaya Saing Ditopang Sumberdaya (Alam, Manusia dan Budaya) yang Tangguh Diselenggarakan oleh Pemerintahan yang Baik, Kreatif, Inovatif Dijiwai oleh Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Kota Batu menggambarkan secara jelas tahapan-tahapan yang penting dalam proses pembangunan. Guna mewujudkan visi pembangunan Kota Batu tersebut, maka dibutuhkan misi pembangunan Kota Batu. Adapun misi pembangunan Kota Batu tahun 2012-2017 adalah (1) Peningkatan Kualitas Hidup antar Umat Beragama, (2) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, (3) Mengembangkan Pertanian Organik dan

Perdagangan Hasil Pertanian Organik, (4) Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan Internasional, (5) Optimalisasi Pemerintahan Daerah, (6) Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan, (7) Peningkatan Kualitas Kesehatan, (8) Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, (9) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat, (10) Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis, serta (11) Pemberdayaan Masyarakat melalui Koperasi dan UKM.

c. Bentuk dan Arti lambang Kota Batu



Gambar 2. Lambang Kota Batu (Peraturan daerah Kota batu Nomor 11 Tahun 2001

1) Gambar Keris

Berwarna keemasan dengan posisi tegak yang melambangkan jiwa ksatria, kekuatan, ketajaman pikir, batin dan perjuangan yang pantang menyerah serta kepribadian yang berbudaya untuk mencapai kota Batu ke depan

2) **Gambar Candi**

Melambangkan sistem pemerintahan kota Batu yang tertib, rapi dan teratur

3) **Gambar Rantai**

Warna hitam yang melambangkan persatuan dan kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. Rantai berjumlah tiga diartikan bahwa manusia dengan Tuhan serta alam dan sesamanya adalah unsur yang tidak terpisahkan

4) **Gambar Bintang**

Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna meskipun berbeda suka, agama, dan pandangan hidup tetap menjunjung tinggi kerukunan umat beragama

5) **Gambar Gunung**

Melambangkan kekuatan dan kebesaran yaitu kota Batu berada di lereng Gunung Panderman, Gunung Arjuno dan Gunung Welirang yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar terutama mata air yang menyatu menjadi Sungai Brantas, serta beranekaragam flora dan fauna sehingga menjadi daya tarik wisata

6) **Warna Dasar Hijau**

Dengan gambar petak-petak sawah melambangkan Kota Batu adalah daerah agraris, mengandung arti filosofi “*Gemah Ripah Loh Jinawi*” (daerah yang subur) dan sebagian besar masyarakatnya bertani .

7) Gambar Air

Melambangkan sumber kehidupan yang lestari

8) Gambar Padi dan Kapas

Melambangkan pangan dan sandang yang terdiri dari padi berjumlah 17 dan kapas berjumlah 10 mempunyai makna tanggal dan bulan peresmian kota Batu

9) Bentuk Perisai

Memiliki 5 sisi yang melambangkan Pemerintah Kota Batu berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia

10) Warna Merah Putih

Melambangkan bendera Indonesia

11) Tulisan Kota Batu

Menunjukkan sebutan bagi kota dan Pemerintah Kota Batu

12) Hakaryo Guno Mamayu Bawono

Merupakan makna Condro Sengkolo yang mengandung arti Berkarya Guna Membangun Negara. Condro Sengkolo 1934, adalah Tuhan Jawa yang merupakan peresmian Pemerintah Kota Batu dengan nilai kata, HAKARYO=4, GUNO=3, MAMAYU=9, BAWONO=1, berjumlah 17, sebagai tanggal peresmian kota Batu, 11 bermakna Dasar Hukum Peresmian Kota Batu diatur dalam UUN 11 Th.2001.

d. Keadaan Geografis dan Wilayah Administrasi

Secara umum, Kota Batu dapat dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu daerah lereng/bukit dengan proporsi lebih luas dan daerah dataran. Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19.908,72 ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan sebagainya. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin.

Secara administrasi, Kota Batu terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Sedangkan rincian luas wilayah masing-masing kecamatan di Kota Batu dapat dilihat sebagai berikut.

1) Kecamatan Batu

- a) Luas wilayah Kecamatan Batu : 4.545,81 Ha
- b) Jumlah Desa/Kelurahan : 4 kelurahan dan 4 desa
- c) Jumlah RW/RT : 96 RW dan 453 RT.

2) Kecamatan Junrejo

- a) Luas wilayah Kecamatan Junrejo : 2.565,02 Ha
- b) Jumlah Desa/Kelurahan : 1 kelurahan dan 6 desa
- c) Jumlah RW/RT : 59 RW dan 240 RT.

3) Kecamatan Bumiaji

- a) Luas wilayah Kecamatan Bumiaji : 12.797,89 Ha
- b) Jumlah Desa/Kelurahan : 9 desa
- c) Jumlah RW/RT : 82 RW dan 429 RT

Tabel 2.

Luas Wilayah Kota Batu menurut Kecamatan (Ha)

Tahun 2009

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1.	Batu	4.545,81	64,28 %
2.	Bumiaji	12.797,89	22,83 %
3.	Junrejo	2.565,02	12,80%
	JUMLAH	19.908,72	100,00%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, 2009

Kota Batu dapat dibagi menjadi 4 jenis tanah. Pertama jenis tanah Andosol, berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua jenis Kambisol, berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 ha. Ketiga tanah alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo 199,93 ha dan Kecamatan Bumiaji 376,48 ha. Dan yang terakhir jenis

tanah Latosol meliputi Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan Junrejo 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji 408,61 ha.

Ditinjau dari letak astronomi, Kota Batu terletak diantara $122^{\circ} 17'$ sampai dengan $122^{\circ} 57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44'$ sampai dengan $8^{\circ} 26'$ Lintang Selatan.

Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah **Utara**: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- 2) Sebelah **Timur**: Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
- 3) Sebelah **Selatan**: Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang
- 4) Sebelah **Barat** : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Ditinjau dari keadaan iklim, seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kota Batu mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi antara bulan Nopember sampai dengan April, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai dengan Oktober.

Secara umum wilayah Kota Batu merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Diantara gunung-gunung yang ada di Kota Batu, ada tiga gunung yang telah diakui secara nasional, yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter). Sedangkan kemiringan lahan (slope) di Kota Batu berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtanal 2001 diketahui bahwa, sebagian besar wilayah perencanaan Kota Batu mempunyai kemiringan lahan sebesar 25 – 40% dan kemiringan > 40.

Berdasarkan ketinggiannya, Kota Batu diklasifikasikan kedalam 6 (enam) kelas, yaitu:

1) 600 – 1.000 DPL dengan luas 6.019,21 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah:

- a) Kecamatan Batu (terutama Desa Sidomulyo secara keseluruhan, sebagian besar Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik dan Desa Sumberejo serta sebagian kecil Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan dan Kelurahan Songgokerto.
- b) Kecamatan Junrejo (terutama Desa Junrejo, Torongrejo, Pendem, Beji, Mojorejo, Dadaprejo dan sebagian Desa Tlekung)
- c) Kecamatan Bumiaji (terutama pada sebagian kecil desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Bumiaji)

2) – 1.500 DPL dengan luas 6.493,64 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah: sebagian besar desa-desa yang ada di Kecamatan Bumiaji dan sebagian dari desa-desa yang ada di Kecamatan Batu (terutama wilayah Kelurahan Songgokerto, Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan) serta di sebagian kecil Desa Tlekung yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo.

3) 1.500 – 2.000 DPL dengan luas 4.820,40 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah: sebagian kecil Desa Tlekung Kecamatan Junrejo. Selain itu juga terdapat di sebagian kecil Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan, terutama di sekitar kawasan Gunung Panderman, Gunung Bokong serta Gunung Punuksari.

Sedangkan di wilayah Kecamatan Bumiaji, seluruh bagian desa mempunyai ketinggian ini, terutama kawasan-kawasan di sekitar Gunung Rawung, Gunung Tunggangan, Gunung Pusungkutuk.

4) 2.000 – 2.500 DPL dengan luas 1.789,81 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini relatif sedikit, yaitu di sekitar Gunung Srandil serta diujung Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu yang berbatasan dengan Kecamatan Wagir. Untuk Kecamatan Bumiaji, ketinggian ini berada di sekitar Gunung Anjasmoro dan pada sebagian kecil di wilayah Desa Giripurno, Desa Bumiaji, Desa sumbergondo dan Desa Torongrejo.

5) 2.500 – 3.000 DPL dengan luas 707,32 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah sebagian kecil desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Bumiaji, terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Prigen.

6) 3.000 DPL dengan luas 78,29 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah pada beberapa desa di Kecamatan Bumiaji, khususnya di sekitar Gunung Arjuno (Desa sumbergondo), Gunung Kembar dan Gunung Wlirang (Desa Tulungrejo). Sedangkan kemiringan lahan (slope) di Kota Batu berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtanal 2001 diketahui bahwa, sebagian besar wilayah perencanaan Kota Batu mempunyai kemiringan lahan sebesar 25 – 40% dan kemiringan > 40. Rincian mengenai kemiringan ini adalah :

- I. 0 – 8 % seluas 2.207,21 Ha.
- II. 8 – 15 % seluas 2.223,73 Ha.

- III. 15-25 % seluas 1.799,37 Ha.
- IV. 25 – 40 % seluas 4.529,85 Ha.
- V. > 40 % seluas 4.493

e. Rencana Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang di Kota Batu sebagian besar adalah kawasan Taman Hutan Rakyat. Bahkan menurut data terakhir, sekitar 57,5 % dari luas wilayahnya atau kurang lebih 5.432,50 Ha merupakan Taman Hutan. Namun demikian, pemanfaatan lahan untuk tujuan lain, seperti hutan lindung, hutan produksi, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan pergudangan, kawasan pariwisata, kawasan pertahanan dan keamanan dan pelayanan umum juga terdapat di beberapa wilayah di Kota Malang. Secara rinci pemanfaatan ruang di Kota Batu dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.
Rencana Pemanfaatan Ruang
Kota Batu

No.	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)
1.	Hutan Lindung	3.563,30
2.	Taman Hutan Rakyat R. Suryo	5.342,50
3.	Hutan Produksi	2.521,70

No.	Jenis Pemanfaat Ruang	Luas (Ha)
4.	Ruang Terbuka Hijau	1.777,70
5.	Kawasan Pertanian	4.018,50
6.	Kawasan Perumahan	2.104,50
7.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	172,70
8.	Kawasan Perkantoran	12,70
9.	Kawasan Industri dan Pergudangan	26,70
10.	Kawasan Pariwisata	206,00
11.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	45,90
12.	Pelayanan Umum	117,0
Jumlah	JUMLAH	19.908,70

Sumber : Batu Milestone, Informasi Potensi Daerah Kota Batu Tahun 2012

2. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

a. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

Pemerintah Kota Batu terbentuk semenjak Kota Batu menjadi daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu. Penyelenggaraan pemerintahan melalui otonomi daerah

diantaranya berupa pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan wajib dan pilihan oleh daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yaitu Perencanaan pembangunan. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan pelaksanaan urusan wajib dalam perencanaan pembangunan di kota Batu, khususnya terkait dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, maka dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Menindak lanjuti pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang oraganisasi perangkat daerah, pemerintah kota Batu melakukan perubahan organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan lembaga teknis daerah kota Batu maka terbentuklah struktur organisasi yang baru Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekertaris daerah. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bappeda sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing – masing satuan kerja perangkat daerah.

b. Lokasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

Lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Batu, Jalan Bukit Berbunga 13a Batu, Jawa Timur. Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Batu merupakan Satuan Kerja Perangkat daerah dibawah Pemerintah Kota Batu.



Gambar 3. Peta Lokasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Sumber: www.batukota.go.id

c. Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang didirikan dengan tujuan untuk merencanakan, mengatur, mengendalikan, mensinkronkan dan membuat evaluasi atas seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah berdasarkan sejarah daerah, topografi daerah, serta sosial budaya daerah yang bersangkutan.

d. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

Adapun visi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah “Terwujudnya Perencanaan yang Terpadu, Terukur, Partisipatif, Berkelanjutan

dan Berkualitas dalam Mendukung Pencapaian Kota Batu sebagai Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional”

Sedangkan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dalam rangka tercapainya visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah:

- 1) Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan
- 2) Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
- 3) Meningkatkan transparansi akuntabilitas dan partisipasi seluruh stakeholder Kota Batu dalam perencanaan pembangunan daerah
- 4) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, tepat waktu dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal
- 5) Meningkatkan kapasitas organisasi perencanaan pembangunan melalui peningkatan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan bersih

e. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan visi dan misi Bappeda, maka dalam periode kerja 2012-2017 Bappeda Kota Batu menetapkan 6 (enam) tujuan meliputi :

- 1) Mensinergikan substansi perencanaan pembangunan Kota Batu dengan Perencanaan Pembangunan tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur.
- 2) Mensinergikan substansi perencanaan pembangunan Kota Batu dengan perencanaan pembangunan tingkat SKPD Kota Batu.
- 3) Memantau, mendorong dan merekam kinerja pemerintah kota dan SKPD secara terukur dalam bentuk berbagai indikator capaian kinerja.
- 4) Melibatkan peran serta seluruh stakeholder dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dalam rangka menumbuhkan tanggung jawab seluruh stakeholder terhadap upaya pembangunan daerah.
- 5) Mengembangkan pelaporan capaian kinerja dan penganggaran yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batu.
- 6) Melakukan upaya pembinaan perencanaan dan evaluasi hasil pembinaan secara intensif dan berkelanjutan kepada sumber daya aparatur yang menjalankan tugas dan fungsi perencanaan.

f. Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program dan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berdasarkan visi, misi dan tujuan Bappeda maka dalam periode kerja 2012-2017 Bappeda Kota Batu menetapkan 12 (dua belas) sasaran meliputi :

- 1) Terwujudnya perencanaan Jangka panjang, menengah dan pendek ditingkat pemerintahan Kota Batu yang bersinergi dengan perencanaan nasional dan provinsi Jawa Timur.
- 2) Terwujudnya perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terpadu dengan perencanaan ditingkat pemerintahan Kota Batu.
- 3) Terwujudnya perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batu secara tepat waktu.
- 4) Terwujudnya perencanaan sektoral yang sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Terwujudnya SKPD Pemerintah Kota Batu yang bekerja berdasarkan hasil capaian kinerja yang valid, terbaru dan terukur.
- 6) Terwujudnya data atau informasi kondisi umum daerah yang meliputi Kota Batu dalam Angka PDRB, IPM, dan Kecamatan dalam Angka yang valid dan terkini.
- 7) Terwujudnya data/informasi capaian kinerja pemerintah daerah yang valid dan terkini.
- 8) Terlaksananya forum komunikasi publik yang berhasil menjalin informasi masyarakat dalam menyusun tata ruang Kota Batu.
- 9) Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa / kelurahan, kecamatan dan kota yang dapat menjalin aspirasi masyarakat.

- 10) Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan penganggaran dari seluruh SKPD yang kemudian menjadi bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
- 11) Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 12) Kesesuaian aparatur peserta sosialisasi dan pembinaan perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan tugas dan fungsi kerja.

g. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu mempunyai tugas pokok menentukan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan, penilaian, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Membantu Walikota dalam merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan.
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu.

- 5) Penyusunan kebijakan umum APBD bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
- 6) Penyusunan prioritas plafon anggaran sementara bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
- 7) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
- 8) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 9) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- 10) Penyusunan petunjuk perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- 11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- 12) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah.
- 13) Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota.
- 14) Melaksanakan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan lebih lanjut.

h. Sumber Daya Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

Sumber Daya Aparatur Bappeda berjumlah 61 orang yang terdiri dari 48 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 13 orang lainnya Tenaga Honorer Daerah

Tabel 4.
Data Pegawai Negeri Sipil di Bappeda Kota Batu

Komponen			Keterangan (%)
Jumlah Pegawai	L	37	60,66
	P	24	39,34
	Jumlah	61	100
Golongan/Ruang	IV/b	4	6,56
	IV/a	3	4,92
	III/d	7	11,48
	III/c	5	8,20
	III/b	16	26,23
	III/a	5	8,20
	II/d	1	1,64
	II/d	5	8,20
	II/b	1	1,64
	II/a	1	1,64
	Honorer	13	21,31
Ijazah Terakhir	S3	1	1,64

	Komponen	Komponen	Keterangan (%)
	S2	11	18,03
	S1	34	55,74
	D3	4	6,56
	SMA	11	18,03

Sumber : Data Bappeda Tahun 2014

Kondisi SDM Aparatur Bappeda menurut tingkat pendidikan sudah cukup memadai, kondisi ini ditunjukan dengan sebagian besar Aparatur Bappeda berpendidikan tinggi. Sumber Daya Aparatur berijazah dibawah D3 cenderung merupakan tenaga honorer yang sifat pekerjaannya merupakan pekerjaan kebersihan dan keamanan.

i. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu

1) Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan bidan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pembangunan, dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala badan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik.
- b) Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik.
- c) Perencanaan dan pengendalian anggaran.
- d) Pengendalian urusan administrasi badan.
- e) Pengendalian koordinasi dan kerjasama bidang perencanaan pembangunan daerah, peneltiandan pengembangan, serta statistik diantara SKPD di lingkungan pemerintah daerah dan lembaga, serta instansi terkait lainnya.
- f) Pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan Program tahunan sebagai pelaksana pola umum pembangunan jangka panjang dan menengah.
- g) Pengendalian program penelitian, pengembangan, dan statistik pembangunan daerah.
- h) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan badan; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

badan, urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan badan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan badan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan rencana kerja Sekretariat;
- b) Pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja badan;
- c) Pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan badan;
- d) Pembinaan dan pengembangan pegawai;
- e) Pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan;
- f) Pengendalian data informasi hasil kegiatan badan dan informasi lainnya terkait pelayanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
- g) Pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) **Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Hidup**

Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan rencana kerja Bidang dan standar perencanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan dan perdesaan;
- b) Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah, dan lingkungan hidup;
- c) Pengendalian program kegiatan musrenbang RPJP, RPJM, dan RKPD di bidang sarana dan prasarana wilayah, dan lingkungan hidup;
- d) Pembinaan, supervise, konsultasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah, serta lingkungan hidup;
- e) Pengkajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di bidang sarana dan prasarana wilayah, serta lingkungan hidup;
- f) Pelaksanaan fasilitasi bentuk kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup;
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) **Bidang Perencanaan Pemerintah dan Sosial Budaya**

Mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, aparatur, dan sosial budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan rencana kerja Bidang;
- b) Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang pemerintah dan sosial budaya;
- c) Pengendalian program kegiatan musrenbang RPJP, RPJM, dan RKPD di bidang pemerintah dan sosial budaya;
- d) Pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- e) Pengkajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di bidang pemerintah dan sosial budaya;
- f) Pelaksanaan fasilitasi bentuk kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan rencana kerja Bidang;
- b) penyusunan pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- c) pengendalian program kegiatan musrenbang RPJP, RPJM, dan RKPD di bidang ekonomi;
- d) pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- e) pengkajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di bidang ekonomi;
- f) pelaksanaan fasilitasi bentuk kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang ekonomi;
- g) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dnegan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan

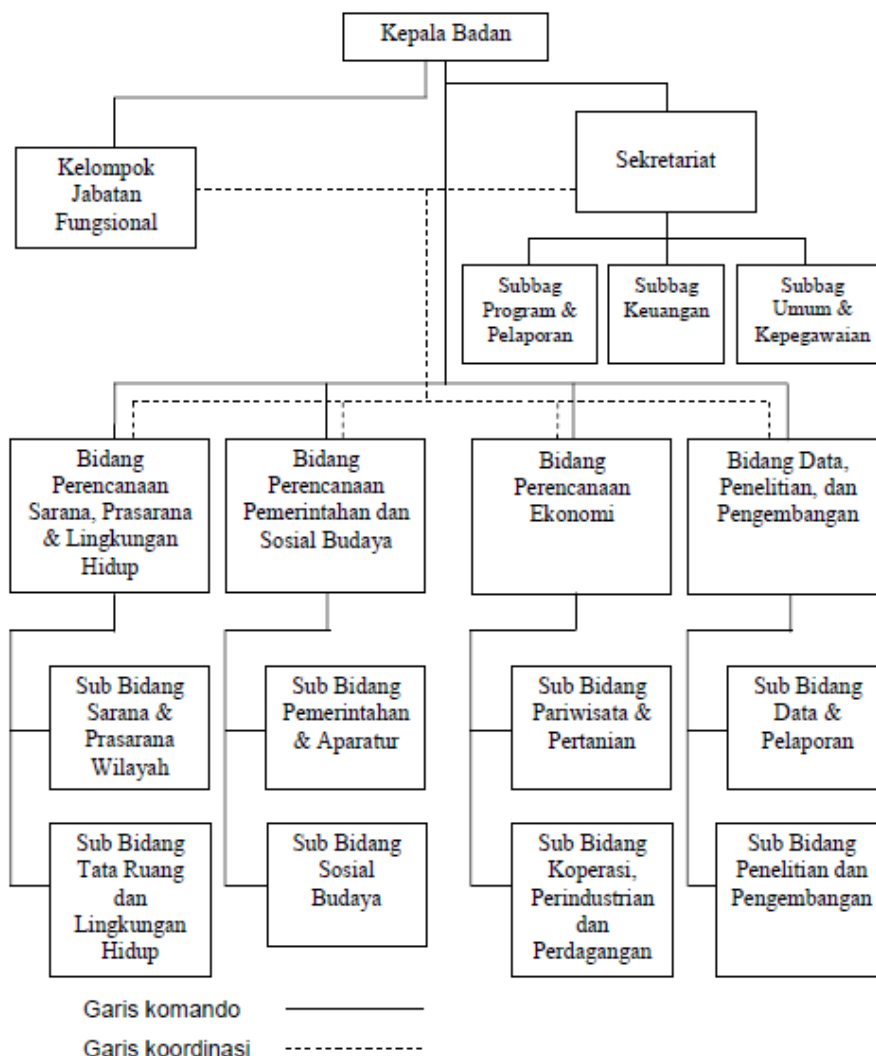
Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, mengkaji, memfasilitasi, mengendalikan, dan mengevaluasi data perencanaan dan informasi hasil pembangunan, serta penelitian dan pengembangan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan rencana kerja Bidang;
- b) penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan pengelolaan data, penelitian, dan pengembangan;
- c) pengkajian sistem perencanaan pembangunan daerah;
- d) pengkajian kebijakan nasional yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah;
- e) pengendalian perencanaan pembangunan daerah untuk mengantisipasi penyimpangan terhadap pencapaian tujuan sesuai kebijakan pembangunan daerah;
- f) pelaksanaan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
- g) pengendalian data informasi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, dan aparatur, lingkungan hidup, pariwisata, dan pertanian, serta sarana dan prasarana
- h) pembinaan penyusunan data statistik mengenai kondisi, potensi, dan perkembangan pembangunan daerah;
- i) pelaksanaan fasilitasi bentuk kerja sama penelitian, data informasi dan statistik skala daerah dengan lembaga dan instansi terkait;
- j) pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Tata Kerja

- a) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b) Apabila Kepala Badan berhalangan di dalam menjalankan tugas, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- c) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- d) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- e) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- f) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- g) Hubungan tata kerja antara Kepala Badan dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Sekretaris.



Gambar 4. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Sumber: Rencana Strategis Kota Batu 2012-2017

3. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

a. Lokasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Lokasi pada penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang beralamat di Jalan Sultan Agung 7B Kota Batu.

b. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Adapun visi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah “Terwujudnya Kota Wisata Batu sebagai kota kepariwisataan Internasional” dan untuk mewujudkan visi dengan substansi yang telah dijelaskan diatas, maka Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, meningkatkan SDM yang berkompentensi yang mampu bersaing di tingkat global, mengembangkan desa atau kelurahan menjadi desa wisata yang berbasis potensi dan masyarakat, membangun hubungan kerjasama yang baik dengan *stakeholders* pariwisata baik di tingkat regional, nasional dan internasional, melakukan promosi pariwisata secara *kontinyu*, nasional maupun internasional.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu terangkum dalam kegiatan kerja masing-masing bidang sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
 - a) Perumusan Kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan
 - b) Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - c) Perencanaan dan Pegendalian anggaran dan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu
 - d) Pembinaan pengembangan produk, promosi dan pemasaran pariwisata

- e) Pembinaan pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala
- f) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
- 2) Sekretariat
 - a) Pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas
 - b) Pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
 - c) Pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah
 - d) Pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 3) Bidang pengembangan Produk Wisata
 - a) Penyusunan pedoman teknis program kegiatan pengembangan produk pariwisata
 - b) Pembinaan potensi usaha kepariwisataan, sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata dan objek serta daya tarik wisata
 - c) Pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum
 - d) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum

4) Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata

- a) Penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan promosi, pemasaran, dan kerja sama kebudayaan dan pariwisata
- b) Perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) skala daerah
- c) Pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata, pameran kebudayaan dan pariwisata
- d) Pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi wisata
- e) Pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata dan perumusan *branding* (merk) dan *tagline* (slogan) pariwisata

5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a) Pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata
- b) Penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata dan teknis kerja sama dengan instansi terkait di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata
- c) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata

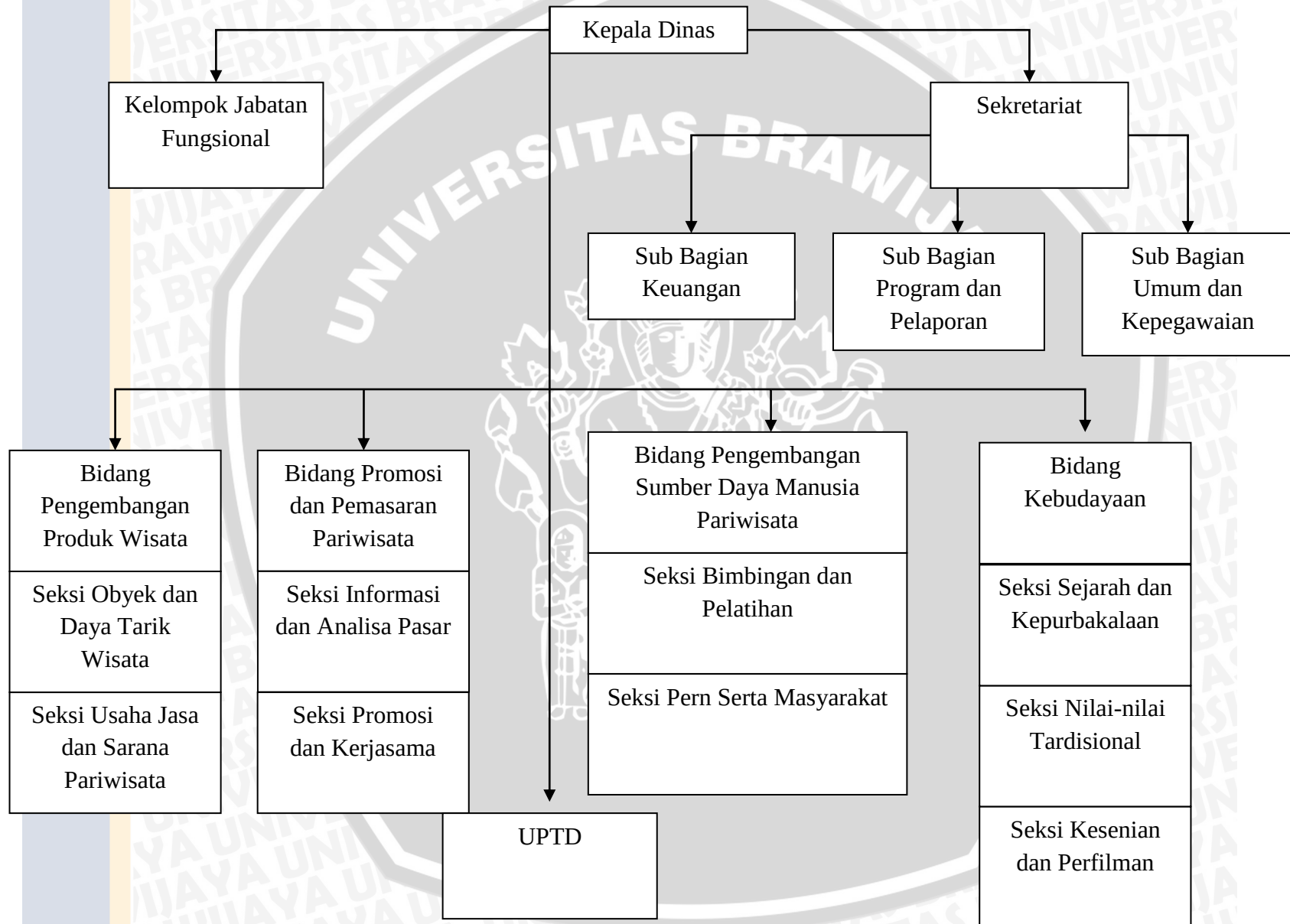
6) Bidang Kebudayaan

- a) Penyusunan teknis kerja sama regional, nasional dan internasional di bidang kebudayaan, kkeurbakalaan, nilai tradisional, kesenian, perfilman dan sejarah
- b) Pembinaan inventarisasi dan dokumentasi di bidang kebudayaan, keurbakalaan, nilai tradisional, kesenian, perfilman dan sejarah

- c) Pengendalian perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian, benda carag budaya dan situs warisan budaya.

d. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu





Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 2015

B. Penyajian Data Fokus

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 yang Mengatur Pembagian Zona (Zoning).

Pengembangan agrowisata Kota Batu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu 2010-2030, tujuan penataan ruang wilayah Kota Batu adalah:

“Mewujudkan ruang Kota Batu yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai kota yang berbasis agropolitan dan kota pariwisata unggulan di Jawa Timur serta Kota Batu sebagai wilayah penopang hulu Sungai Brantas”.

Sehingga dalam mengembangkan kawasan pariwisata khususnya pariwisata berbasis pertanian atau biasa disebut agrowisata harus berdasar pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota batu agar pengembangan kawasan pariwisata dapat menjadikan ruang kota tertib, tertata, aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan.

Melalui hasil wawancara peneliti dengan “S” selaku Kepala Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Batu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan agrowisata di Kota Batu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030 melalui pembagian zona kawasan atau Bagian Wilayah Kota (BWK). Berikut hasil wawancara dengan “S”:

“Pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Batu dijelaskan mengenai pembagian zona dimana Bagian Wilayah Kota (BWK) I adalah kecamatan Bumiaji yang merupakan sentra agrowisata, Bagian Wilayah Kota (BWK) II yaitu kecamatan Batu yang merupakan kawasan untuk membangun hotel, infrastruktur dan juga fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan Bagian

Wilayah Kota (BWK) III yaitu kecamatan Junrejo merupakan kawasan yang dikembangkan untuk hunian masyarakat seperti perumahan serta *home industry*. Sehingga pengembangan agrowisata dioptimalkan di Kecamatan Bumiaji sesuai dengan *zoning* yang telah ditetapkan” (*Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Batu tanggal 5 Maret 2015 pukul 08.30-10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu*).

Berikut ini merupakan penyajian data menggunakan tabel mengenai Bagian Wilayah Kota (BWK) kota Batu.

Tabel 5.
Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Batu menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Bagian Wilayah Kota
1.	Kecamatan Bumiaji	Bagian Wilayah Kota (BWK) I diarahkan untuk pengembangan sentra agrowisata
2.	Kecamatan Batu	Bagian Wilayah Kota (BWK) II diarahkan untuk pengembangan hotel, infrastruktur serta fasilitas umum
3.	Kecamatan Junrejo	Bagian Wilayah Kota (BWK) III diarahkan untuk pengembangan hunian masyarakat seperti perumahan dan <i>home industry</i>

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu 2015

2. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029 yang Mengatur tentang Pariwisata Berbasis Pertanian.

Dalam mengembangkan suatu daerah tentunya pemerintah daerah telah menggunakan analisis berkenaan dengan pembagian zona agar suatu daerah dapat

dengan maksimal mengembangkan kawasannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jika tidak ada peraturan tentang penggunaan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam bentuk *zoning* dikhawatirkan adanya penyimpangan penggunaan lahan yang tidak semestinya, maka dari itu pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya tentu harus mengacu pada *zoning* yang telah ditetapkan yang telah dijabarkan pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029. Berikut isi dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu mengenai penjabaran berkenaan dengan jenis-jenis daya tarik wisata, pada *point* ke empat.

“*Agrotourism* dengan kegiatan wisata yang direncanakan berupa festival petik apel dan hiking di kebun apel. Pengembangan kegiatan wisata ini direncanakan di Desa Punten, Desa Sumbergondo dan Desa Bumiaji Kecamatan Batu, dan wisata *agrotourism* juga terdapat di Kusuma agro.” (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) tahun 2014-2029 tentang Jenis Daya Tarik Wisata).

Hal tersebut juga dapat dibuktikan dari hasil wawancara oleh “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo bahwa penggunaan lahan untuk pengembangan agrowisata megacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun 2014-2029. Berikut hasil wawancara dengan “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo:

“Regulasi yang dipakai dalam pengembangan agrowisata ini adalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batu serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu berkenaan dengan zonasi atau pembagian zona. Pembagian zona untuk kawasan agrowisata dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu terletak pada Desa

Sumbergondo, Desa Punten, dan Desa Bumiaji yang ketiganya terletak pada Kecamatan Bumiaji, dan untuk kawasan wisata berbasis pertanian yang dikelola oleh pihak swasta adalah Kusuma Agrowisata Convention Center.” (Hasil wawancara dengan “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.00-12.00 wib di Kantor Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji.)

3. Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang.

a. Lokasi serta penempatan

Kota Batu merupakan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan kekayaan alam dan budaya yang sangat besar dan beragam. Selain letak geografisnya cukup strategis, yaitu di dataran tinggi dengan hawa sejuk yang membuat Kota Batu menjadi Kota yang nyaman untuk digunakan beraktifitas sangat dimungkinkan untuk terus dikembangkan menjadi sebuah destinasi pariwisata yang berkualitas, bertaraf internasional, dan bisa dijual kepada wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara dengan sentuhan pengelolaan yang profesional.

Secara umum, Kota Batu dapat dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu daerah lereng atau bukit dengan proporsi lebih luas dan daerah dataran. Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19 908,72 ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan sebagainya. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin.

Tabel 6.
Komoditas Unggulan di Kawasan Agrowisata Batu

No.	Lokasi Agrowisata	Komoditas Unggulan
1.	Agrowisata I (Punten)	Buah-buahan (apel dan jeruk) dan Tanaman Hias
2.	Agrowisata II (Sumbergondo)	Buah-buahan (apel) dan tanaman organik seperti sayur mayur
3.	Agrowisata III (Bumiaji)	Buah-buahan (apel, jeruk dan jambu)
4.	Agrowisata IV (Tulungrejo)	Buah-buahan (apel dan jeruk), sayur mayur (wortel, kentang, dan cabe merah)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu 2015 dan olahan penulis.

b. Fungsi dan manfaat

Rencana sistem dan fungsi perwilayahan Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota (BWK) didasarkan pada batas administrasi wilayah kecamatan. Setiap pusat BWK direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (*network system*) antar BWK di wilayah Kota Batu. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara kawasan pusat kegiatan BWK satu dengan pusat

kegiatan BWK lainya dan antara pusat kegiatan dengan kawasan agropolitan disetiap BWK. Setiap BWK direncanakan mempunyai pusat pelayanan BWK dan fungsi perwilayahan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota; dan Pusat Lingkungan.

Pusat BWK I Kecamatan Batu terdapat di Desa Pesanggrahan. Fungsi BWK I sebagai wilayah utama pengembangan pusat pemerintahan kota, pengembangan kawasan kegiatan perdagangan dan jasa modern, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang akomodasi wisata serta kawasan pendidikan menengah.

Fungsi BWK II meliputi sebagai wilayah utama pengembangan permukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta.

Fungsi BWK III adalah sebagai wilayah utama pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata.

Pengembangan agrowisata di Kota Batu juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Baik manfaat secara materiil maupun non materiil. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan “HJ” selaku kepala bidang perencanaan ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu serta “S” selaku Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dijelaskan bahwa banyak manfaat

dari kerjasama antar *stakeholder* dalam memajukan agrowisata di Kota Batu.

Berikut hasil wawancara dengan “HJ” dan “S”:

“Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, dapat dibuktikan dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang wisata dimana tahun 2014 sebesar 60 Miliar naik menjadi 80 Miliar di tahun 2015. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan pengembangan agrowisata adalah pendapatan masyarakat meningkat dari hasil usaha seperti bisnis makanan, minuman dan pusat oleh-oleh di kawasan agrowisata juga kegiatan masyarakat dapat ditopang modalnya oleh pemerintah daerah dimana dana pendapatan asli daerah (PAD) juga disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan masyarakat. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh pihak swasta dengan adanya kawasan agrowisata adalah meningkatnya keuntungan dari banyaknya pengunjung yang mengunjungi kawasan agrowisata, disini tentunya tidak hanya swasta yang mendapatkan keuntungan berupa materi contohnya kawasan wisata Selecta yang ada di desa Tulungrejo dimana Selecta merupakan kawasan wisata milik masyarakat dimana prosentase keuntungan dari kawasan wisata Selecta 30% pemerintah dan 70% swasta.” *(Hasil wawancara dengan “HJ” selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan “S” selaku kepala sub bidang pertanian dan pariwisata pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 08.30 – 10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu).*

c. Pengelolaan

Dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tidak dapat berdiri sendiri untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dibuat. Hal ini juga penting diterapkan pada pengembangan kawasan agrowisata di Kota Batu. Peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) disini dibutuhkan agar pengembangan pariwisata di Kota Batu dapat dijalankan secara maksimal. Ketiga pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam hal ini adalah pihak pemerintah, pihak swasta serta masyarakat. Dalam pengembangan agrowisata masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholder*) memiliki peran yang berbeda. Pemerintah daerah disini

memiliki peran sebagai pembuat regulasi berupa perundang-undangan maupun dokumen perencanaan yang legal, motivator serta fasilitator dalam mengembangkan agrowisata. Pihak swasta dalam pengembangan agrowisata ini memiliki peran sebagai pemilik modal atau investor yang membuka bisnisnya di Kota Batu untuk menghasilkan keuntungan (*profit*) berupa materi. Sedangkan masyarakat disini memiliki peran untuk berpartisipasi dalam pengembangan agrowisata berupa bisnis usaha mikro kecil masyarakat yang nantinya akan memberikan dampak positif yaitu peningkatan pendapatan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Bidang Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga pemangku kepentingan (*stakeholder*) tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari pengembangan agrowisata di Kota Batu:

“Peran pemerintah dalam pengembangan agrowisata adalah mendukung segala bentuk kegiatan dalam memajukan pariwisata daerah Kota Batu. Pemerintah daerah kota Batu juga menggunakan dasar perijinan yang mudah untuk diterima oleh masyarakat ataupun pemilik modal untuk mengembangkan kawasan agrowisata. Perijinan yang mudah disini diartikan bahwa syarat atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tegas dengan prosedur yang tidak berbelit belit. Sedangkan peran dari pihak swasta sendiri yaitu memberikan modal atau menjadi investor wisata di Kota Batu yang mana pengelolaannya dikelola sendiri oleh pihak swasta. Peran masyarakat dalam pengembangan agrowisata adalah dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa-desa dan memanfaatkan sumber daya yang ada baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki desa wisata.” (*Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Bidang Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota batu pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 08.30-10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu.*)

Dari hasil wawancara dengan “HJ” selaku kepala bidang perencanaan ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu serta “S” selaku Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dijelaskan bahwa banyak manfaat dari kerjasama antar *stakeholder* dalam memajukan agrowisata di Kota Batu. Berikut hasil wawancara dengan “HJ” dan “S”:

“Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, dapat dibuktikan dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang wisata dimana tahun 2014 sebesar 60 Miliar naik menjadi 80 Miliar di tahun 2015. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan pengembangan agrowisata adalah pendapatan masyarakat meningkat dari hasil usaha seperti bisnis makanan, minuman dan pusat oleh-oleh di kawasan agrowisata juga kegiatan masyarakat dapat ditopang modalnya oleh pemerintah daerah dimana dana pendapatan asli daerah (PAD) juga disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan masyarakat. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh pihak swasta dengan adanya kawasan agrowisata adalah meningkatnya keuntungan dari banyaknya pengunjung yang mengunjungi kawasan agrowisata, disini tentunya tidak hanya swasta yang mendapatkan keuntungan berupa materi contohnya kawasan wisata Selecta yang ada di desa Tulungrejo dimana Selecta merupakan kawasan wisata milik masyarakat dimana prosentase keuntungan dari kawasan wisata Selecta 30% pemerintah dan 70% swasta.” (*Hasil wawancara dengan “HJ” selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan “S” selaku kepala sub bidang pertanian dan pariwisata pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 08.30 – 10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu*)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh “S” selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu mengenai kerjasama antar pemangku kepentingan bahwasannya peran masing-masing *stakeholder* disini sangat dibutuhkan untuk menunjang pengembangan agrowisata di Kota Batu karena jika *stakeholder* tidak dapat menjalin kerjasama yang baik atau ada dominasi dari salah satu *stakeholder* maka pengembangan

agrowisata ini tidak dapat memberikan dampak positif atau manfaat kepada seluruh pihak dan justru akan menjadi penghambat akan majunya wisata berbasis pertanian di Kota Batu. Berikut hasil wawancara dengan “S” tentang peran masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengembangan agrowisata:

“Pemerintah dalam pengembangan agrowisata memiliki peran sebagai fasilitator dan motivator masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada desa wisata seperti gapura, papan nama desa wisata serta gazebo untuk peristirahatan pengunjung desa wisata. Peran pemerintah disini juga mengalokasikan dana yang diambil dari dana desa untuk keperluan pengembangan agrowisata. Pengusaha memiliki peran sebagai investor yang memberikan modal untuk penyediaan wahana wisata agar dapat menunjang pengembangan agrowisata di desa wisata. Peran masyarakat dalam pengembangan agrowisata adalah dengan mengembangkan potensi daerah masing-masing. Mulai tahun 2009 minat masyarakat mengembangkan desa wisata mulai terasa.”
(Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 09.00-10.00 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)

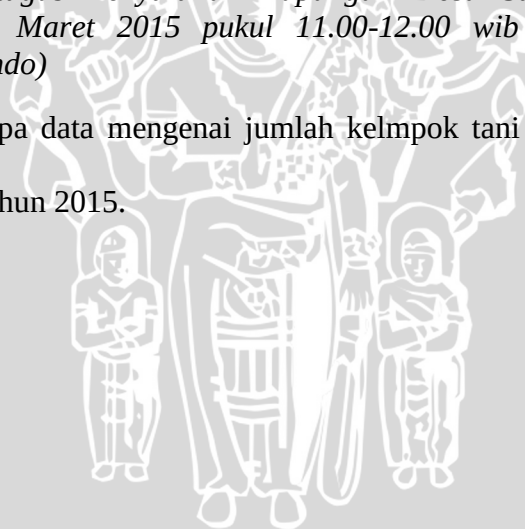
Kerjasama dalam pengembangan agrowisata di Kota Batu tidak hanya mengikutsertakan pihak pemerintah, swasta serta masyarakat melainkan juga harus adanya kerjasama antar masyarakat dimana masyarakat disini sama-sama memiliki peran untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing guna menunjang pengembangan kawasan wisata di daerahnya. Masyarakat seringkali membentuk kelompok masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat guna membantu satu sama lain serta upaya

kerjasama untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan produk pariwisata desa wisata yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara dengan “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo bahwa di Desa Sumbergondo terdapat 11 kelompok tani yang sampai saat ini masih aktif. Berikut hasil wawancara dengan “N”:

“Desa Sumbergondo memiliki potensi petik apel dan sayuran organik. Di Desa Sumbergondo terbentuk 11 kelompok tani dengan rincian 1 gabungan kelompok tani, 7 kelompok tani dan 3 kelompok tani wanita. Pertemuan kelompok tani dilakukan rutin 1 bulan sekali. Hasil olahan pangan yang dihasilkan kelompok tani Desa Sumbergondo adalah jahe instant dan permen susu. Biaya produksi seluruhnya ditanggung oleh kelompok tani.” *(Hasil wawancara dengan “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan Desa Sumbergondo pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.00-12.00 wib di Kantor Desa Sumbergondo)*

Berikut beberapa data mengenai jumlah kelompok tani yang ada di Kota Batu sampai dengan tahun 2015.



Tabel 7
Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
di Kota Batu

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani
1	Bumiaji	Tulung rejo	30
		Sumbergondo	11
		Bumiaji	8
		Pandanrejo	9
		Punten	7
		Bulukerto	12
		Gunungsari	15
		Giripurno	12
		Sumber Brantas	4
2	Batu	Sisir	6
		Ngaglik	2
		Oro-oro Ombo	7
		Pesanggrahan	7
		Songgokerto	5
		Sumberejo	10
		Sidomulyo	16
3	Junrejo	Tlekung	6
		Junrejo	5
		Mojorejo	3
		Beji	3
		Torongrejo	8
		Pendem	4
		Dadaprejo	3
Jumlah			193

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, olahan penulis (2015)

4. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu beserta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam Pengembangan Pariwisata Pertanian Bebas Tata Ruang.

a. Pembagian Kawasan

Rencana sistem dan fungsi perwilayahan Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota (BWK) didasarkan pada batas administrasi wilayah kecamatan. Setiap pusat BWK direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (*network system*) antar BWK di wilayah Kota Batu. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara kawasan pusat kegiatan BWK satu dengan pusat kegiatan BWK lainnya dan antara pusat kegiatan dengan kawasan agropolitan disetiap BWK. Setiap BWK direncanakan mempunyai pusat pelayanan BWK dan fungsi perwilayahan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota; dan Pusat Lingkungan.

Rencana Bagian Wilayah Kota di Kota Batu terbagi atas :

1) BWK I

- a) BWK I sebagai pusat kota dengan pusat pelayanan berada di Desa Pesangrahan.
- b) BWK I Kecamatan Batu meliputi wilayah administrasi Kelurahan Temas, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Songgokerto, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesangrahan, Desa Sumberejo, dan Desa Sidomulyo.

- c) BWK I memiliki luas wilayah 45,46 km² merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan tertinggi.

Sedangkan batas pelayanan dari BWK I, yakni :

- a) Batas barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
- b) Batas utara : Gunung banyak, Desa Gunung sari, Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, dan Desa Pandanrejo di Kecamatan Bumiaji
- c) Batas timur : Desa Torongrejo dan Desa Beji Kecamatan Junrejo
- d) Batas selatan : Desa Tlengkung Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Pusat BWK I Kecamatan Batu terdapat di Desa Pesanggrahan. Fungsi BWK I sebagai wilayah utama pengembangan pusat pemerintahan kota, pengembangan kawasan kegiatan perdagangan dan jasa modern, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang akomodasi wisata serta kawasan pendidikan menengah.

2) BWK II

- a) BWK II sebagai kawasan pendukung kegiatan pusat kota dan wisata dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo.
- b) BWK II Kecamatan Junrejo meliputi wilayah administrasi Desa Tlekung, Desa Junrejo, Desa Mojorejo, Desa Torongrejo, Desa Beji, Desa Pendem dan Kelurahan Dadaprejo.
- c) BWK II memiliki luas wilayah 25,65 km² merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan sedang.

Sedangkan batas pelayanan dari BWK II, yakni :

- a) Batas barat : Gunung Panderman dan Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu
- b) Batas utara : Desa Oro-oro Ombo dan Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Giripurno dan Desa Pandanrejo di Kecamatan Bumiaji
- c) Batas timur : Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
- d) Batas selatan : Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Fungsi BWK II meliputi sebagai wilayah utama pengembangan permukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta.

3) BWK III

- a) BWK III sebagai kawasan pengembangan agropolitan dan *agrotourism* dengan pusat pelayanan di Desa Punten. BWK III Kecamatan Bumiaji meliputi wilayah administrasi Desa Pandanrejo, Desa Bumiaji, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Giripurno, dan Desa Sumberbrantas.
- b) BWK III memiliki luas wilayah 127,98 km² merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan rendah dan dinomisasi oleh kawasan pertanian.

Sedangkan batas pelayanan dari BWK III, yakni :

- a) Batas barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
- b) Batas utara : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto
- c) Batas timur : Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

- d) Batas selatan : Desa Sumberejo, Desa Sidomulyo, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.

Fungsi BWK III adalah sebagai wilayah utama pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata.

Dari hasil wawancara peneliti dengan “S” selaku Kepala Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Batu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan agrowisata di Kota Batu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030 melalui pembagian zona kawasan atau Bagian Wilayah Kota (BWK). Berikut hasil wawancara dengan Bapak “S”:

“Pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Batu dijelaskan mengenai pembagian zona dimana Bagian Wilayah Kota (BWK) I adalah kecamatan Bumiaji yang merupakan sentra agrowisata, Bagian Wilayah Kota (BWK) II yaitu kecamatan Batu yang merupakan kawasan untuk membangun hotel, infrastruktur dan juga fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan Bagian Wilayah Kota (BWK) III yaitu kecamatan Junrejo merupakan kawasan yang dikembangkan untuk hunian masyarakat seperti perumahan serta *home industry*. Sehingga pengembangan agrowisata dioptimalkan di Kecamatan Bumiaji sesuai dengan *zoning* yang telah ditetapkan” (*Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Batu tanggal 5 Maret 2015 pukul 08.30-10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu*)

Pemanfaatan ruang wilayah tidak terlepas dari hal yang berhubungan dengan pembagian zona (*zoning*). *Zoning* merupakan peraturan penggunaan lahan agar lahan dapat digunakan sebagaimana mestinya dan meminimalisir terjadinya penyimpangan. Definisi dari pembagian zona atau yang juga disebut sebagai *zoning* menurut Gallion (1992: 147) adalah:

Zoning merupakan peraturan yang sah bagi penggunaan lahan. *Zoning* merupakan penerapan kewenangan pemeliharaan ketertiban bagi perlindungan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan umum. Peraturan tersebut mencakup ketentuan-ketentuan bagi penggunaan lahan dan pembatasan-pembatasan pada bentuk dan isi bangunan yang akan menempati lahan tersebut.

Setelah peneliti mengamati di lapangan melalui observasi dan wawancara kepada narasumber yang berada di desa wisata yaitu Desa Bumiaji dan Desa Sumbergondo, pengembangan agrowisata telah tepat dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan zonasi yang telah ditentukan. Karena disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah bahwa pengembangan agrowisata berada pada ketiga Desa yaitu Desa Bumaiji, Desa Sumbergondo dan Desa Punten dimana ketiga desa tersebut merupakan desa wisata yang berada di Kecamatan Bumiaji. Sedangkan pengelola swasta yang memiliki kawasan agrowisata adalah Kusuma Agro Convention Center yang berada di Jalan Abdul Gani Atas.

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Argrowisata

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang agrowisata menjadi faktor penting dalam mengembangkan potensi wisata di Kota Batu. Pemerintah daerah menuangkan kebijakan berkenaan dengan penyediaan sarana prasarana dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029. Berikut kebijakan pemerintah daerah berkenaan dengan penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata di Kota Batu:

- 1) Kebijakan pembangunan sarana aksesibilitas adalah sebagai berikut:
 - a) Pengembangan moda transportasi darat, laut dan udara yang mendukung kepariwisataan di destinasi pariwisata nasional;
 - b) Pengembangan kualitas dan kapasitas moda transportasi darat, laut dan udara yang mendukung kepariwisataan di destinasi pariwisata nasional.
- 2) Kebijakan pembangunan prasarana aksesibilitas adalah sebagai berikut:
 - a) Pengembangan kualitas dan kapasitas bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal sebagai pusat distribusi dan pintu gerbang pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata nasional;
 - b) Pengembangan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi yang menghubungkan hub dengan destinasi pariwisata nasional.
- 3) Kebijakan pembangunan sistem aksesibilitas, sebagai berikut:
 - a) Peningkatan jalur dan frekuensi transportasi antara destinasi pariwisata nasional dan sumber wisatawan, baik luar negeri maupun dalam negeri
 - b) Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi pariwisata
 - c) Pengembangan sistem informasi transportasi pariwisata.
- 4) Kebijakan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi:
 - a) Pembangunan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata nasional;

- b) Peningkatan kualitas fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata dalam mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas, dan daya saing destinasi pariwisata nasional;
- c) Pengendalian pembangunan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang melampaui ambang batas daya dukung.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku industri wisata di Kota Batu seperti “FR” selaku staff bagian manager dan marketing Kusuma Agrowisata Convention Center mengenai fasilitas serta sarana prasarana yang diberikan pemerintah kepada Kusuma Agrowisata Convention Center:

“Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah juga pemilik agrowisata berupa infrastruktur jalan raya, pembangunan fasilitas umum seperti kamar mandi, mushola serta tempat istirahat dan juga memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pengunjung wisata. *(Hasil wawancara dengan “FR” selaku staff bagian manager dan marketing Kusuma Agrowisata Convention Center pada tanggal 3 Maret 2015 pukul 09.00-10.00 wib di Kusuma Agrowisata Convention Center).*

Hal yang serupa juga dipaparkan melalui hasil wawancara peneliti dengan “S” selaku Kepala Kelompok Tani Makmur Abadi mengenai strategi pemerintah dalam penyediaan fasilitas serta sarana prasarana untuk kebutuhan pengembangan agrowisata di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji. Berikut hasil wawancara peneliti dengan “S”:

“Fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada kelompok tani Makmur Abadi adalah bantuan alat produksi dan infrastruktur berupa akses jalan serta mushola. Bantuan alat produksi diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perhutanan Kota Batu.” *(Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Kelompok Tani Makmur Abadi pada tanggal 10 Maret*

2015 pukul 09.30-10.00wib di Kantor Kelompok Tani Makmur Abadi).

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa pembangunan sarana prasarana dan fasilitas umum merupakan strategi pemerintah daerah kota Batu dalam pengembangan agrowisata. Sarana prasarana dan fasilitas umum menjadi penunjang kegiatan agrowisata sehingga kebutuhan kegiatan agrowisata dapat terakomodir dengan adanya penyediaan sarana prasarana dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah kota Batu.

c. Promosi atau Pemasaran

Pemasaran kawasan wisata maupun pemasaran produk wisata menjadi hal yang penting diperhatikan oleh pemerintah daerah agar kawasan pariwisata dapat memberikan daya tarik bagi wisatawan serta produk wisata memiliki nilai jual yang tinggi bagi industri pariwisata di Kota Batu baik industri wisata yang dikelola oleh masyarakat seperti yang ada di desa wisata maupun industri wisata milik swasta. Berikut strategi pemerintah yang dituangkan melalui program-program pengembangan pariwisata yang dijabarkan melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu Tahun 2014-2029:

1) Program Pengembangan Pemasaran

Pengembangan pemasaran ditekankan pada kegiatan promosi untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar serta membuka pasar baru bagi produk-produk wisata di Jawa Timur, sekaligus berupaya memulihkan citra pariwisata di luar negeri melalui:

a) Promosi dalam negeri

- b) Promosi luar Negeri
- c) Pemberdayaan, sehingga mampu menjalin kerjasama dengan media massa (media cetak dan elektronik) di Jawa Timur.
- d) Peningkatan kinerja promosi pariwisata dan kesenian Jawa Timur, dengan sasaran kegiatan utamanya antara lain analisis pasar wisata 2 tahun sekali, penyediaan sarana promosi, dokumentasi bahan promosi, dan penerbitan majalah pariwisata Jawa Timur
- e) Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) seperti Mandala Wisata Jawa Timur, dengan sasaran antara lain menyiapkan kelembagaan, menyiapkan sarana dan prasarana dan lain-lain.

2) Kebijakan Pembangunan Pemasaran:

Kebijakan pengembangan pasar wisatawan, meliputi:

- a) Pemantapan segmen pasar wisatawan *masal* (*mass market*) dan pengembangan segmen ceruk pasar (*niche market*) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.
- 3) Kebijakan pengembangan citra pariwisata, meliputi:
 - a) Pengembangan dan pemantapan citra Indonesia dalam skala nasional (*national branding*) maupun destinasi pariwisata (*destination branding*);
 - b) Pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.
- 4) Kebijakan pengembangan kemitraan promosi pariwisata, meliputi:
 - a) Penguatan dan perluasan eksistensi perwakilan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dalam melakukan promosi kunjungan wisata dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan “HJ” selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Berikut hasil wawancara dengan Bapak “HJ”:

“Strategi yang dilakukan pemerintah dalam memasarkan produk wisata adalah dengan membuat media promosi seperti banner, reklame serta video yang dipasang di bandara yaitu bandara Juanda dan Soekarno Hatta dan juga melalui media cetak berupa surat kabar dan majalah. Pada tanggal 15 Februari-30 Februari 2015 Kota Batu juga berkesempatan mewakili Indonesia untuk pameran wisata di Ceko, hal seperti itu merupakan kesempatan besar untuk Indonesia untuk dapat mempromosikan kawasan wisatanya di kancan Internasional dan tentunya Kota Batu disini merasa bangga dapat mewakili Indonesia di acara Internasional tersebut. Sedangkan strategi yang dilakukan pihak swasta dalam mengembangkan produk wisata yang dikelolanya adalah melalui website, ieflet serta promosi melalui kunjungan wisata ke kawasan wisata lainnya. *(Hasil wawancara dengan “HJ” selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 08.30-09.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu).*

Dapat disimpulkan bahwa promosi dan pemasaran yang dioptimalkan pemerintah daerah bersama pihak swasta juga dengan melibatkan masyarakat desa wisata dapat menunjang pengembangan agrowisata di Kota Batu. Karena dengan adanya promosi dan pemasaran, kawasan agrowisata di Kota Batu dapat dikenal wisatawan luas, tidak hanya wisatawan dalam negeri tetapi juga wisatawan luar negeri.

d. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Kota Batu dengan Pelaku Industri Pariwisata di Kota Batu

Pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan agrowisata di Kota Batu tentunya tidak secara mandiri mengembangkan kawasan agrowisata tersebut melainkan juga mengikutsertakan pihak swasta dalam mengembangkan kawasan agrowisata dimana hubungan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta dapat saling menguntungkan satu sama lain tanpa adanya dominasi atau berdampak pada kerugian yang nantinya dirasakan oleh pemerintah ataupun swasta bahkan masyarakat Kota Batu.

Dalam pengembangan produk agrowisata juga tidak lepas dengan adanya sinergitas dan koordinasi antar lembaga, termasuk dalam pengembangan pariwisata di Kota Batu dengan menjalin koordinasi antar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dengan pelaku industri. Sehingga diperlukan strategi untuk berkoordinasi untuk mengimplementasikan program-program pengembangan kepariwisataan Kota Batu. Program-program pengembangan kepariwisataan Kota Batu dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029. Adapun program-program pengembangan kepariwisataan di Kota Batu adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan tugas, peran, dan fungsi pelaku industri pariwisata dalam melaksanakan program-program pengembangan pariwisata Kota Batu.
- b. Pelibatan pelaku industri dalam pengembangan pariwisata Kota Batu.

- c. Pengadaan koordinasi antara Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu dengan pelaku industri untuk mendorong pengembangan industri pariwisata Kota Batu.

5. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang di Kota Batu.

Dalam mengembangkan daerah melalui potensi daerah yang dimiliki, tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan suatu daerah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi merupakan faktor pendorong dan faktor penghambat yang dianalisis melalui kondisi daerah dan lingkungan yang dapat mempengaruhi pengembangan suatu daerah. Dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang, terdapat faktor pendorong serta faktor penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu. Adapun faktor penghambat serta faktor pendorong pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

1) Otonomi Daerah

Dengan adanya desentralisasi yang menghasilkan otonomi daerah dimana daerah dengan mandiri dapat mengurus serta mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia Tahun 1945 dapat menjadi faktor pendukung pemerintah daerah kota Batu untuk mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki kota Batu khususnya dalam hal mengelola kawasan wisata serta mengelola hasil pendapatan yang diterima dari sektor pariwisata juga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Batu dengan cara promosi melalui lisan serta tulisan berupa media masa juga sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat.

2) Kondisi Geografis

Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata yang mengunggulkan potensi pertanian seperti kawasan wisata petik apel, petik jeruk serta kawasan wisata pertanian organik. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin sehingga dapat menunjang kondisi pariwisata yang dikembangkan menuju pariwisata pertanian yang banyak menarik minat wisatawan.

3) Komoditas Unggulan

Komoditas unggulan masing-masing kawasan di Kota Batu tentunya menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis pertanian atau biasa disebut dengan agrowisata. Karena salah satu syarat dalam pengembangan pariwisata pertanian adalah unggulnya komoditas pertanian

di masing-masing daerah guna menunjang berkembangnya sektor pariwisata berbasis pertanian. Seperti yang dijelaskan oleh “S” yang bekerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan Produk Wisata:

“Pengembangan agrowisata pada mulanya ada di 4 Desa yakni Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa Punten dan Desa Tulungrejo. Yang mana masing-masing dari desa ini memiliki potensi yang berbeda dalam hal pengembangan agrowisata. Desa Tulungrejo, Desa Bumiaji dan Desa Sumbergondo merupakan desa yang mengoptimalkan lahannya untuk dijadikan wahana petik apel sedangkan desa Punten mengoptimalkan pengembangan agrowisata melalui petik Jeruk” (*Hasil wawancara dengan “S” selaku kepala Sub Bidang Pengembangan Produk Wisata pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 08.00-09.00 wib di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu*).

Dapat disimpulkan bahwa komoditas unggulan masing-masing desa wisata tidak sama. hal itu disesuaikan dengan lahan produktif yang ada di masing-masing desa wisata juga budidaya yang dikembangkan oleh masyarakat desa wisata setempat.

4) Ketersediaan Infrastruktur

Infrastruktur seperti jalan raya, sarana prasarana serta fasilitas umum merupakan faktor penting dalam mengembangkan sektor pariwisata. Karena dengan adanya infrastruktur yang memadai masyarakat setempat maupun pihak swasta yang memiliki kawasan wisata dapat dengan optimal mengembangkan usahanya seperti adanya akses jalan umum yang memadai, penerangan jalan, air bersih serta listrik yang mendukung kawasan wisata. Serta sarana prasarana seperti transportasi kota seperti angkutan umum yang memudahkan wisatawan

untuk berkunjung ke kawasan wisata di Kota Batu tidak terkecuali dengan angkutan umum yang juga melewati desa wisata dapat mengoptimalkan desa wisata tersebut untuk diketahui banyak masyarakat sehingga akan menarik minat pengunjung yang ingin berkunjung ke kawasan desa wisata tersebut. Bantuan dari pemerintah kepada masyarakat lokal yang berada di desa wisata dalam mengembangkan potensi pariwisatanya juga merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata, pemerintah selama ini kerap memberikan bantuan berupa alat produksi seperti mesin olahan untuk mengolah hasil pertanian seperti apel yang dapat dimanfaatkan menjadi sari apel, keripik apel dan jenang apel juga bermacam-macam buah serta sayuran organik yang berkualitas. Seperti yang dijelaskan oleh “S” Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu:

“Pelayanan yang diberikan pihak pemerintah untuk masyarakat maupun swasta dalam hal pengembangan agrowisata adalah memberikan sarana prasarana berupa alat produksi ke masyarakat lokal untuk mengembangkan agrowisata lokal seperti mesin pembuat sari apel yang diberikan pemerintah kepada desa wisata yang potensinya adalah tanaman apel. Pemerintah juga melakukan pelayanan dalam memasarkan produk wisata berupa promosi agar kawasan agrowisata Kota Batu dapat diketahui masyarakat luas”
(Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata Kota Batu tanggal 5 Maret 2015 pukul 08.30-10.00 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu).

Berkenaan dengan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah, “ES” selaku kepala Desa Bumiaji dan “H” kepala bidang ekonomi dan pembangunan Desa Bumiaji juga mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan bantuan berupa alat produksi serta bahan produksi kepada desa Bumiaji, melalui hasil wawancara dengan kepala Desa sebagai berikut:

“Bantuan pemerintah untuk pengembangan agrowisata pada Desa Bumiaji berupa alat produksi pertanian serta bahan-bahan teknis seperti pupuk dan vitamin tanaman. Pemerintah juga menyediakan fasilitas berupa akses jalan serta *drainase* juga sarana prasarana dengan membangun Gedung Graha Wisata di Desa Bumiaji dimana Gedung Graha Wisata ini digunakan untuk pertemuan pengelola wisata di Desa Bumiaji.” (*Hasil wawancara dengan “ES” selaku kepala Desa Bumiaji dan “H” selaku kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Desa Bumiaji pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 10.00-11.00wib di Kantor Desa Bumiaji*).

Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur dapat menunjang pengembangan agrowisata di Kota Batu karena dengan adanya infrastuktur dan fasilitas umum, pengembangan agrowisata dapat secara optimal dilaksanakan.

5) Kerjasama antar Stakeholder

Dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tidak dapat berdiri sendiri untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dibuat. Hal ini juga penting diterapkan pada pengembangan kawasan agrowisata di Kota Batu. Peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) disini dibutuhkan agar pengembangan pariwisata di Kota Batu dapat dijalankan secara maksimal. Ketiga pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam hal ini adalah pihak pemerintah, pihak swasta serta masyarakat. Dalam pengembangan agrowisata masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholder*) memiliki peran yang berbeda. Pemerintah daerah disini memiliki peran sebagai pembuat regulasi berupa perundang-undangan maupun dokumen perencanaan yang legal, motivator serta fasilitator dalam mengembangkan agrowisata. Pihak swasta dalam pengembangan agrowisata ini memiliki peran sebagai pemilik modal atau investor yang membuka bisnisnya di Kota Batu untuk menghasilkan keuntungan (*profit*) berupa materi. Sedangkan

masyarakat disini memiliki peran untuk berpartisipasi dalam pengembangan agrowisata berupa bisnis usaha mikro kecil masyarakat yang nantinya akan memberikan dampak positif yaitu peningkatan pendapatan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Bidang Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga pemangku kepentingan (*stakeholder*) tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari pengembangan agrowisata di Kota Batu:

“Peran pemerintah dalam pengembangan agrowisata adalah mendukung segala bentuk kegiatan dalam memajukan pariwisata daerah Kota Batu. Pemerintah daerah kota Batu juga menggunakan dasar perijinan yang mudah untuk diterima oleh masyarakat ataupun pemilik modal untuk mengembangkan kawasan agrowisata. Perijinan yang mudah disini diartikan bahwa syarat atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tegas dengan prosedur yang tidak berbelit belit. Sedangkan peran dari pihak swasta sendiri yaitu memberikan modal atau menjadi investor wisata di Kota Batu yang mana pengelolaannya dikelola sendiri oleh pihak swasta. Peran masyarakat dalam pengembangan agrowisata adalah dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa-desa dan memanfaatkan sumber daya yang ada baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki desa wisata.” (*Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Bidang Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 08.30-10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu.*)

Dari hasil wawancara dengan “HJ” selaku kepala bidang perencanaan ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu serta “S” selaku Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dijelaskan bahwa banyak manfaat

dari kerjasama antar *stakeholder* dalam memajukan agrowisata di Kota Batu.

Berikut hasil wawancara dengan “HJ” dan “S”:

“Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, dapat dibuktikan dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang wisata dimana tahun 2014 sebesar 60 Miliar naik menjadi 80 Miliar di tahun 2015. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan pengembangan agrowisata adalah pendapatan masyarakat meningkat dari hasil usaha seperti bisnis makanan, minuman dan pusat oleh-oleh di kawasan agrowisata juga kegiatan masyarakat dapat ditopang modalnya oleh pemerintah daerah dimana dana pendapatan asli daerah (PAD) juga disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan masyarakat. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh pihak swasta dengan adanya kawasan agrowisata adalah meningkatnya keuntungan dari banyaknya pengunjung yang mengunjungi kawasan agrowisata, disini tentunya tidak hanya swasta yang mendapatkan keuntungan berupa materi contohnya kawasan wisata Selecta yang ada di desa Tulungrejo dimana Selecta merupakan kawasan wisata milik masyarakat dimana prosentase keuntungan dari kawasan wisata Selecta 30% pemerintah dan 70% swasta.” *(Hasil wawancara dengan “HJ” selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan “S” selaku kepala sub bidang pertanian dan pariwisata pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 08.30 – 10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu).*

Kerjasama antar *stakeholder* dalam pengembangan agrowisata dapat memberikan manfaat secara menyeluruh baik manfaat yang dirasakan oleh pihak pemerintah, masyarakat serta swasta sehingga akan menciptakan suatu kondisi yang kondusif dan saling menguntungkan antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan agrowisata.

6) Kelompok Masyarakat

Kerjasama dalam pengembangan agrowisata di Kota Batu tidak hanya mengikutsertakan pihak pemerintah, swasta serta masyarakat melainkan juga harus adanya kerjasama antar masyarakat dimana masyarakat disini sama-sama

memiliki peran untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing guna menunjang pengembangan kawasan wisata di daerahnya. Masyarakat seringkali membentuk kelompok masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat guna membantu satu sama lain serta upaya kerjasama untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan produk pariwisata desa wisata yang bersangkutan. Dengan terbentuknya kelompok tani yang dibentuk sendiri oleh masyarakat desa wisata, secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa wisata. Karena masyarakat dapat mengelola sendiri desa wisata dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa wisata. Sehingga masyarakat dapat mandiri dan memiliki kekuatan internal untuk mengembangkan kawasan desa wisata.

Dari hasil wawancara dengan “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo bahwa di Desa Sumbergondo terdapat 11 kelompok tani yang sampai saat ini masih aktif. Berikut hasil wawancara dengan “N”:

“Desa Sumbergondo memiliki potensi petik apel dan sayuran organik. Di Desa Sumbergondo terbentuk 11 kelompok tani dengan rincian 1 gabungan kelompok tani, 7 kelompok tani dan 3 kelompok tani wanita. Pertemuan kelompok tani dilakukan rutin 1 bulan sekali. Hasil olahan pangan yang dihasilkan kelompok tani Desa Sumbergondo adalah jahe instant dan permen susu. Biaya produksi seluruhnya ditanggung oleh kelompok tani.” *(Hasil wawancara dengan “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan Desa Sumbergondo pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.00-12.00 wib di Kantor Desa Sumbergondo)*

Kelompok tani di Kota Batu sebanyak 199 kelompok tani, yang tersebar diseluruh desa di wilayah Kecamatan Batu.

b. Faktor Penghambat

1) Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah

Salah satu faktor yang menjadi kelemahan dalam pengembangan agrowisata di Kota Batu adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya kelompok tani yang berada di desa wisata Kota Batu. Dapat dicontohkan di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji yang mengoptimalkan lahan produktif pertaniannya untuk budidaya tanaman apel serta sayur mayur dimana kelompok tani Desa Sumbergondo telah lama memakai bahan kimia pestisida untuk pupuk. Sejak tahun 2012 Desa Sumbergondo telah mendapatkan penyuluhan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mengenai penggunaan bahan organik untuk tanaman dan semaksimal mungkin dapat mengganti bahan kimia pestisida menjadi bahan organik yang lebih ramah lingkungan serta aman untuk dikonsumsi. Seperti yang telah diungkapkan oleh “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo mengenai penyuluhan bahan organik yang ramah lingkungan dan aman untuk dikonsumsi:

“Desa Sumbergondo mengoptimalkan petik apel sebagai *icon* Desa Sumbergondo. Pertanian organik mulai disosialisasikan tahun 2012. Desa sumbergondo memiliki kuota lahan sebesar 20 Hektar untuk dimanfaatkan menjadi kawasan petik apel. Kawasan ini merupakan lahan masyarakat setempat serta dikelola sendiri oleh masyarakat yang *notabene* nya bekerja sebagai petani” (*Hasil wawancara dengan “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.00-12.00 wib di Kantor Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji*).

Tetapi dalam kenyataannya masih banyak petani Desa Sumbergondo yang belum berpindah dari bahan kimia menjadi bahan organik dikarenakan penggunaan bahan kimia lebih mudah untuk digunakan serta mudah untuk dijual belikan dibanding bahan organik. Perlu usaha maksimal serta waktu yang lama untuk merubah pola pikir masyarakat setempat untuk memakai bahan organik pada perkebunan yang mereka punya. Karena pada dasarnya penggunaan bahan kimia seperti pestisida akan mempengaruhi kualitas dari produksi apel Desa Sumbergondo yang dikhawatirkan tidak aman untuk dikonsumsi. Sehingga perlu adanya usaha untuk mengganti pestisida ke bahan organik agar masyarakat setempat maupun pengunjung merasakan manfaat yang dihasilkan dari produksi apel Desa Sumbergondo.

2) Faktor Cuaca dan Suhu Udara

Salah satu kelemahan yang ada di Kota Batu berkenaan dengan pengembangan agrowisata adalah cuaca serta suhu udara yang sudah tidak mendukung dalam pengembangan agrowisata. Pemakaian barang elektronik secara berlebih, asap kendaraan bermotor yang semakin meningkat karena volume jumlah kendaraan bermotor serta penggundulan hutan secara besar-besaran juga merupakan faktor yang mempengaruhi bumi semakin panas. Pemanasan global di era sekarang ini membuat Kota Batu tidak lagi sedingin dan sesejuk awalnya. Hal ini dapat dibuktikan pada Desa Bumiaji yang mengalami penurunan produksi buah apel dan jeruk karena faktor cuaca dan suhu udara yang sudah tidak mendukung. Melalui hasil wawancara dengan “ES” selaku kepala desa Bumiaji dan “H” selaku kepala bidang ekonomi dan pembangunan Desa Bumiaji

menjelaskan bahwa saat ini Desa Bumiaji mengalami penurunan produksi buah-buahan, berikut penjelasan dari “ES” dan “H” mengenai penurunan produksi tersebut:

“Dampak pengembangan agrowisata yang dirasakan oleh masyarakat setempat adalah dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan pendapatan dari hasil wisata pertanian tersebut. Terdapat juga dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat desa Bumiaji yang mengakibatkan penurunan hasil produksi pertanian sebesar 50% dikarenakan cuaca dan suhu udara yang sudah tidak mendukung penanaman buah apel, jeruk, maupun jambu di desa Bumiaji ini.” *(Hasil wawancara dengan “ES” selaku kepala desa Bumiaji dan “H” selaku kepala bidang ekonomi dan pembangunan Desa Bumiaji pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 10.00-11.00 wib di Kantor Desa Bumiaji).*

Dengan kondisi cuaca yang tidak mendukung untuk pengembangan agrowisata di Desa Bumiaji Kota Batu maka dikhawatirkan desa wisata petik apel tidak dapat berjalan secara optimal dan akan berdampak kepada penurunan kunjungan wisatawan sehingga akan mempengaruhi pendapatan petani apel serta masyarakat setempat desa wisata.

3) Dominasi Pihak Swasta terhadap Lahan Masyarakat

Potensi yang dimiliki tiap desa di Kota Batu mengarah pada sektor pertanian, maka dari itu pariwisata yang dikembangkan tentunya mengacu pada potensi yang dimiliki sehingga Kota Batu mengarah pada pariwisata berbasis pertanian atau biasa disebut dengan agrowisata. Dalam pengembangan agrowisata di tiap desa wisata, lahan yang digunakan untuk kawasan wisata seperti wisata petik apel, petik jambu, petik jeruk dan sayur mayur merupakan lahan produktif yang dimiliki oleh warga setempat sehingga warga setempat secara bebas dapat menggunakan lahan tersebut untuk dibudidayakan. Seiring berjalannya waktu

banyak pihak swasta yang tertarik untuk menanam modal di Kota Batu dalam hal ini merupakan kepentingan bisnis pariwisata para penanam modal. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi masyarakat setempat desa wisata ketika regulasi tidak dengan tegas diterapkan oleh pemerintah. Seperti yang ditemukan dari hasil wawancara dengan “ES” selaku kepala desa Bumiaji mengenai sengketa lahan yang ada di Desa Bumiaji. Berikut hasil wawancara dengan Bapak “ES”:

“Pada tahun 2012, Jatim Park Group ingin membangun Wisata Bumi Cinta tepatnya di Desa Bumiaji. Jatim Park Group telah meminta ijin melalui prosedural kepada dinas-dinas yang terkait dengan perijinan membangun suatu bangunan serta telah mensosialisasikan kepada masyarakat setempat dan meminta ijin agar Wisata Bumi Cinta dapat dibangun di Desa Bumiaji. Tetapi pada nyatanya sekitar 30% masyarakat Bumiaji tidak menyetujui adanya Wisata Bumi Cinta tersebut dikarenakan masyarakat ingin mengelola sendiri lahan yang mereka punya dan dirasakan Wisata Bumi Cinta tersebut tidak banyak memberikan dampak positif terhadap warga sekitar melainkan memberikan keuntungan besar pada Jatim park Group.” *(Hasil wawancara dengan “ES” selaku Kepala Desa Bumiaji tanggal 10 Maret 2015 pukul 10.00 – 11.00 wib di Kantor Desa Bumiaji).*

Dengan adanya penyelewangan lahan berupa dominasi dari pihak swasta terhadap lahan masyarakat produktif dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan mengancam keberlangsungan dari desa wisata karena masyarakat setempat tidak dapat mengoptimalkan sendiri lahan produktif yang dimiliki.

C. Pembahasan

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 yang Mengatur Pembagian Zona (*Zoning*).

Dalam pengembangan sektor pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu diperlukan perencanaan dalam hal pembagian zona kawasan. Pembagian zona kawasan merupakan suatu cara guna mengatur kota agar kota dapat secara terarah dan sistematis mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing kawasan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Galliom (1992: 147) mengenai pengertian pembagian zona (*zoning*) :

Zoning merupakan peraturan yang sah bagi penggunaan lahan. *Zoning* merupakan penerapan kewenangan pemeliharaan ketertiban bagi perlindungan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan umum. Peraturan tersebut mencakup ketentuan-ketentuan bagi penggunaan lahan dan pembatasan-pembatasan pada bentuk dan isi bangunan yang akan menempati lahan tersebut.

Dalam proses pembangunan suatu kota juga dikenal istilah perencanaan tata ruang wilayah. Perencanaan tata ruang wilayah merupakan suatu usaha untuk menata ruang berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan letak, penggunaan ruang, dan juga potensi kawasan. Dimana suatu kawasan dengan kawasan lain saling bersinergi untuk saling memberikan manfaat antar suatu kawasan dengan kawasan di dalam suatu zona wilayah. Menurut (Tarigan, 2002:55), perencanaan tata ruang wilayah dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan materi yang dicakup, yaitu:

6. Perencanaan yang mencakup keseluruhan wilayah yaitu perkotaan dan non-perkotaan (wilayah belakang). Fokus utamanya menciptakan hubungan-hubungan yang serasi antar kota dengan wilayah

belakangnya. Misalnya: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

7. Perencanaan khusus wilayah perkotaan. Fokus utamanya adalah keserasian hubungan antara berbagai kegiatan di dalam kota untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan itu sendiri plus kebutuhan masyarakat yang datang dari luar kota. Misalnya: Rencana Tata Ruang Kota (dulu disebut master Plan), Rencana Tata Ruang Ibukota Kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan (IKK).

Pembagian kawasan serta pemanfaatan ruang tiap daerah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu merupakan salah satu dokumen pembangunan yang strategis karena dokumen tersebut menjadi acuan bagi setiap gerak dan langkah pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat Kota Batu.

Dalam pengembangan agrowisata pemerintah juga harus dengan tegas membuat regulasi berkenaan dengan pembagian kawasan (*zoning*) agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan peruntukkan kawasan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030 dijabarkan mengenai pengembangan agrowisata di Kota Batu pada Bab III Rencana Struktur Ruang RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030. Pengembangan agrowisata di Kota Batu diawali dari tiga desa wisata sesuai dengan yang dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030 “Agrotourism dengan kegiatan wisata yang direncanakan berupa festival petik apel dan *hiking* di kebun apel. Pengembangan kegiatan wisata ini direncanakan di Desa Punten, Desa Sumbergondo dan Desa Bumiaji Kecamatan Batu. Dan wisata agrotourism juga terdapat di Kusuma agro.”

Dengan adanya pembagian zona sesuai dengan pemanfaatan ruang maka pengembangan agrowisata akan terarah dan dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki serta dengan adanya pembagian zona dapat meminimalisir adanya penyimpangan terhadap penggunaan lahan.

2. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029 yang Mengatur tentang Pariwisata Berbasis Pertanian

Pembangunan kepariwisataan Kota Batu yang terarah, perlu menjadi komitmen semua stakeholder pariwisata terutama pemerintah Kota Batu. Hal ini dapat dilihat bahwa sektor kepariwisataan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan Kota Batu, sehingga mengindikasikan bahwa potensi tersebut perlu dikembangkan dan dikelola secara professional. Pemerintah Kota Batu menyadari akan pentingnya menyiapkan *grand design* pembangunan kepariwisataan Kota Batu yang dapat berfungsi sebagai pondasi dan dasar penting dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan di wilayah Kota Batu.

Penyiapan *grand design* tersebut dilakukan dengan menyusun dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa setiap daerah wajib menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Dokumen ini pada dasarnya mencakup materi pokok ketentuan program kepariwisataan, yang meliputi: destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

RIPPDA Kota Batu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepariwisataan Propinsi Jawa Timur yang didasarkan pada kondisi kepariwisataan secara internal dan eksternal, yaitu : a) tantangan pengembangan kepariwisataan yang semakin ketat pada tataran lokal, regional, nasional maupun Internasional, dan b) keinginan kuat seluruh *stakeholders* pariwisata, terutama pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan keunggulan saing dan keunggulan banding kepariwisataan Kota Batu sekaligus menjadikan Kota Batu sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional.

Atas dasar kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Batu menganggap penting untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengembangan kepariwisataan Kota Batu di masa yang akan datang, sekaligus memberikan arahan (*guidance*) bagi *stakeholders* terkait, baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kota Batu memiliki potensi besar yang dikembangkan berupa potensi wisata, hal ini didukung dengan potensi letak dan potensi lahan yang dikelilingi perbukitan, pegunungan serta perkebunan. Kota Batu sebagai kota yang mengarahkan pembangunannya pada sektor pertanian menuntut sektor lain untuk dapat menyesuaikan dengan konsep kota berbasis pertanian atau biasa disebut dengan agropolitan. Sektor pariwisata di Kota Batu yang saat ini sedang dioptimalkan untuk dikembangkan tidak hanya dikancah nasional namun juga dikancah internasional, Kota Batu mengarahkan sektor pariwisatanya ke arah pariwisata pertanian atau biasa disebut dengan agrowisata. Pengembangan

agrowsiata di Kota Batu diarahkan untuk dapat menarik minat wisatawan melalui potensi pariwisata pertanian yang dimiliki oleh Kota Batu, mulai dari desa wisata yang menyediakan wisata petik apel, petik jeruk, petik jambu sampai dengan menghasilkan produk seperti sari buah, jenang, dodol, keripik dan pia. Desa wisata ini dioptimalkan di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Serta pihak swasta yang mengelola kawasan wisatanya berupa hotel serta kawasan petik buah yang berada di Desa Sisir yaitu Kusuma Agrowisata Convention Center.

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029 dijabarkan juga mengenai macam-macam pariwisata yang dikembangkan di Kota Batu salah satunya adalah pariwisata berbasis pertanian. Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029 pada bab III mengenai arah kebijakan, strategi dan indikasi program disebutkan bahwa “*Agrotourism* dengan kegiatan wisata yang direncanakan berupa festival petik apel dan hiking di kebun apel. Pengembangan kegiatan wisata ini direncanakan di Desa Punten, Desa Sumbergondo dan Desa Bumiaji Kecamatan Batu, dan wisata *agrotourism* juga terdapat di Kusuma agro.” Hal itu yang melandasi pengembangan pariwisata pertanian berada pada Kecamatan Bumiaji yaitu Desa Punten, Desa Sumbergondo, dan Desa Bumiaji serta Kusuma Agrowisata Convention Center, karena pengembangan pariwisata di Kota Batu mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029.

3. Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang

a. Lokasi serta penempatan

Secara umum, Kota Batu dapat dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu daerah lereng/bukit dengan proporsi lebih luas dan daerah dataran. Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19.908,72 ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan sebagainya. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin.

Secara keseluruhan luas lahan terbangun untuk kawasan pariwisata di Kota Batu direncanakan 206 Ha. Pemanfaatan Taman Hutan Raya R. Suryo dan taman wisata alam Arboretrum dan Cagar untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sesuai dengan jenis kegiatannya. Pemanfaatan taman hutan raya dan taman wisata alam untuk sarana pariwisata alam diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% dari luas blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan.
- 2) Bentuk bangunan bergaya arsitektur setempat
- 3) Tidak mengubah bentang alam yang

Komoditas unggulan masing-masing kawasan di Kota Batu tentunya menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata

berbasis pertanian atau biasa disebut dengan agrowisata. Karena salah satu syarat dalam pengembangan pariwisata pertanian adalah unggulnya komoditas pertanian di masing-masing daerah guna menunjang berkembangnya sektor pariwisata berbasis pertanian. Seperti yang dijelaskan oleh “S” yang bekerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan Produk Wisata:

“Pengembangan agrowisata pada mulanya ada di 4 Desa yakni Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa Punten dan Desa Tulungrejo. Yang mana masing-masing dari desa ini memiliki potensi yang berbeda dalam hal pengembangan agrowisata. Desa Tulungrejo, Desa Bumiaji dan Desa Sumbergondo merupakan desa yang mengoptimalkan lahannya untuk dijadikan wahana petik apel sedangkan desa Punten mengoptimalkan pengembangan agrowisata melalui petik Jeruk” *(Hasil wawancara dengan “S” selaku kepala Sub Bidang Pengembangan Produk Wisata pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 08.00-09.00 wib di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).*

Dapat diambil kesimpulan bahwa lokasi penempatan untuk pengembangan agrowisata di Kota Batu adalah Kecamatan Bumiaji dengan diawali pengembangan desa wisata di tiga Desa yaitu Desa Bumiaji, Desa Punten dan Desa Sumbergondo dengan potensi wisata yang dikembangkan berbeda beda antar desa wisata.

b. Fungsi dan manfaat

Rencana sistem dan fungsi perwilayahan Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota (BWK) didasarkan pada batas administrasi wilayah kecamatan. Setiap pusat BWK direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (*network*

system) antar BWK di wilayah Kota Batu. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara kawasan pusat kegiatan BWK satu dengan pusat kegiatan BWK lainnya dan antara pusat kegiatan dengan kawasan agropolitan disetiap BWK. Setiap BWK direncanakan mempunyai pusat pelayanan BWK dan fungsi perwilayahan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota; dan Pusat Lingkungan.

Pusat BWK I Kecamatan Batu terdapat di Desa Pesanggrahan. Fungsi BWK I sebagai wilayah utama pengembangan pusat pemerintahan kota, pengembangan kawasan kegiatan perdagangan dan jasa modern, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang akomodasi wisata serta kawasan pendidikan menengah. Fungsi BWK II meliputi Kecamatan Junrejo sebagai wilayah utama pengembangan permukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta. Sedangkan Fungsi BWK III yang berlokasi di Kecamatan Bumiaji adalah sebagai wilayah utama pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata.

Banyak manfaat yang diperoleh dari pengembangan agrowisata di Kota Batu, manfaat bagi pemerintah adalah peningkatan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, manfaat yang diperoleh pihak swasta pemilik industri wisata dari pengembangan agrowisata adalah peningkatan pendapatan dari kunjungan obyek wisata yang dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan manfaat yang dirasakan oleh pihak masyarakat adalah meningkatnya pendapatan

masyarakat dari hasil membuka usaha dari mulai toko oleh-oleh, toko makanan dan minuman sampai dengan menjadi pemandu wisata.

Dari hasil wawancara dengan “HJ” selaku kepala bidang perencanaan ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu serta “S” selaku Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dijelaskan bahwa banyak manfaat dari kerjasama antar *stakeholder* dalam memajukan agrowisata di Kota Batu. Berikut hasil wawancara dengan “HJ” dan “S”:

“Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, dapat dibuktikan dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang wisata dimana tahun 2014 sebesar 60 Miliar naik menjadi 80 Miliar di tahun 2015. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan pengembangan agrowisata adalah pendapatan masyarakat meningkat dari hasil usaha seperti bisnis makanan, minuman dan pusat oleh-oleh di kawasan agrowisata juga kegiatan masyarakat dapat ditopang modalnya oleh pemerintah daerah dimana dana pendapatan asli daerah (PAD) juga disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan masyarakat. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh pihak swasta dengan adanya kawasan agrowisata adalah meningkatnya keuntungan dari banyaknya pengunjung yang mengunjungi kawasan agrowisata, disini tentunya tidak hanya swasta yang mendapatkan keuntungan berupa materi contohnya kawasan wisata Selecta yang ada di desa Tulungrejo dimana Selecta merupakan kawasan wisata milik masyarakat dimana prosentase keuntungan dari kawasan wisata Selecta 30% pemerintah dan 70% swasta.” *(Hasil wawancara dengan “HJ” selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan “S” selaku kepala sub bidang pertanian dan pariwisata pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 08.30 – 10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu).*

Tidak hanya peningkatan pendapatan daerah, swasta maupun masyarakat saja yang dirasakan dari adanya pengembangan agrowisata di Kota Batu melainkan manfaat berupa dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat setempat desa wisata dengan dibentuknya kelompok tani yang dikoordinir secara

mandiri oleh masyarakat setempat desa wisata. Masyarakat seringkali membentuk kelompok masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat guna membantu satu sama lain serta upaya kerjasama untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan produk pariwisata desa wisata yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara dengan “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo bahwa di Desa Sumbergondo terdapat 11 kelompok tani yang sampai saat ini masih aktif. Berikut hasil wawancara dengan “N”:

“Desa Sumbergondo memiliki potensi petik apel dan sayuran organik. Di Desa Sumbergondo terbentuk 11 kelompok tani dengan rincian 1 gabungan kelompok tani, 7 kelompok tani dan 3 kelompok tani wanita. Pertemuan kelompok tani dilakukan rutin 1 bulan sekali. Hasil olahan pangan yang dihasilkan kelompok tani Desa Sumbergondo adalah jahe instant dan permen susu. Biaya produksi seluruhnya ditanggung oleh kelompok tani.” *(Hasil wawancara dengan “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan Desa Sumbergondo pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.00-12.00 wib di Kantor Desa Sumbergondo).*

Kelompok tani di Kota Batu sebanyak 199 kelompok tani, yang tersebar diseluruh desa di wilayah Kecamatan Batu. Berikut beberapa data mengenai jumlah kelompok tani yang ada di Kota Batu sampai dengan tahun 2015.

c. Pengelolaan

Dengan adanya desentralisasi yang menghasilkan otonomi daerah dimana daerah dengan mandiri dapat mengurus serta mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia Tahun 1945 dapat menjadi faktor pendukung pemerintah daerah kota Batu untuk mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki kota Batu khususnya dalam hal mengelola kawasan wisata serta mengelola hasil pendapatan yang diterima dari sektor pariwisata juga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Batu dengan cara promosi melalui lisan serta tulisan berupa media masa juga sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat.

Potensi wisata di Kota Batu sangat menjamin keberhasilan dalam hal pengembangan pariwisata khususnya pariwisata berbasis pertanian (agrowisata). Pengelolaan pengembangan pariwisata khususnya pariwisata pertanian atau biasa disebut dengan agrowisata melibatkan peran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaannya. Selain peran pemerintah pembuat regulasi, penyedia sarana prasarana berupa infrastruktur dan fasilitas umum serta mengakomodir kebutuhan masyarakat, pemerintah disini juga memiliki peran penting dalam mengelola suatu kawasan dengan berdasarkan regulasi yang ada.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan Whitehand dalam Tarigan (2002:56-58) mengapa pemerintah perlu campur tangan dalam penggunaan lahan:

6. Pemerintah perlu menyediakan lahan untuk kepentingan umum (*public goods*), dimana apabila diserahkan pada mekanisme pasar maka ketersediannya tidak akan sebanyak yang dibutuhkan.
7. Adanya faktor eksternalitas (*externalities*) dalam kegiatan manusia, yaitu adanya dampak dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya yang bisa merugikan atau menguntungkan masyarakat, tetapi tidak mempengaruhi penerimaan/pengeluaran institusi yang melakukan kegiatan tersebut.
8. Informasi yang tidak sempurna, menyangkut kondisi saat ini maupun tentang apa yang direncanakan orang saat ini untuk dilakukan dimasa yang akan datang. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dilakukan orang lain atas lahannya padahal penggunaan lahan itu dapat mempengaruhi nilai/kegunaan lahan masyarakat di sekitarnya. Apabila informasi tidak sempurna, maka pasar tidak merespon secara wajar sehingga apa yang dilakukan masyarakat menjadi tidak optimal.
9. Daya beli masyarakat yang tidak merata, sehingga ada pihak-pihak yang dapat menguasai lahan secara berlebihan tetapi ada pihak lain yang sulit mendapatkan lahan.
10. Perbedaan penilaian individu/ masyarakat antara manfaat jangka pendek dengan manfaat jangka panjang. Masyarakat cenderung menilai manfaat jangka pendek lebih penting daripada manfaat jangka panjang. Hal ini cenderung merugikan kepentingan dari generasi yang akan datang. Apabila dibiarkan masyarakat cenderung mengkonsumsi secara berlebihan seluruh potensi alam termasuk mengkonsumsi energi yang tidak terbarukan.

Namun dalam mengelola kawasan wisata kota Batu yang dioptimalkan untuk pengembangan pariwisata pertanian, pemerintah kota Batu tidak dapat secara mandiri mengelola kawasan tersebut dalam hal pengembangan agrowisata. Pemerintah kota Batu disini membutuhkan peran masyarakat juga pihak swasta untuk bekerjasama mengoptimalkan pengembangan pariwisata pertanian yang mengacu pada pemanfaatan ruang. Pengelolaan pengembangan pariwisata yang melibatkan peran masyarakat dan pihak swasta dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan “N” selaku staff bagian personalia Kusuma Agrowisata Convention Center dan “FR” selaku bagian manager dan marketing Kusuma

Agrowisata Convention Center mengenai bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana:

“Pada pengembangan Kusuma Agrowisata Convention Center, pihak pemerintah kota Batu tidak memberikan bantuan berupa alat produksi pada Kusuma Agrowisata Convention Center. Pemerintah hanya memfasilitasi dalam hal promosi serta fasilitas seperti akses jalan untuk menuju lokasi Kusuma Agrowisata Convention Center” *(Hasil wawancara dengan Bapak “N” selaku staff bagian personalia Kusuma Agrowisata Convention Center dan “FR” selaku bagian manager dan marketing Kusuma Agrowisata Convention Center pada tanggal 3 Maret 2015 pukul 08.00-09.00 wib di Kusuma Agrowisata Convention Center).*

Pemerintah kota Batu juga memberikan bantuan kepada kelompok tani di beberapa desa seperti halnya Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA) yang berdiri sejak tahun 2006 dan masih berkembang hingga sekarang. Kelompok Tani Makmur Abadi ini (KTMA) berada di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji. Dari hasil wawancara dengan “S” selaku kepala Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA) dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemerintah juga memberikan bantuan kepada Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA) berupa alat produksi serta bahan-bahan produksi yang dibutuhkan oleh kelompok tani. Berikut hasil wawancara dengan Bapak “S”:

“Fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah kota Batu kepada kelompok tani Makmur Abadi adalah bantuan alat produksi dan infrastruktur berupa akses jalan serta mushola. Bantuan alat produksi diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perhutanan Kota Batu.” *(Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Kelompok Tani Makmur Abadi pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 09.30-10.00 wib di Kantor Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA) Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji)*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji mengenai bahan produksi yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji:

“Hubungan atau sinergitas dari pemerintah desa dengan pemerintah kota Batu juga dinas terkait adalah melalui bantuan berupa infrastruktur seperti jalan raya juga fasilitas umum juga sarana prasarana dan juga bahan-bahan untuk pertanian seperti bibit yang unggul dan pupuk yang diberikan Dinas Pertanian dan Perhutanan kepada kelompok tani di masing-masing desa.” *(Hasil wawancara dengan “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.00-12.00 wib di Kantor Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji).*

Pengelolaan pengembangan agrowisata di Desa Sumbergondo secara keseluruhan dikelola sendiri oleh pihak masyarakat. Seperti yang telah diungkapkan oleh “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo mengenai pengelolaan desa wisata Sumbergondo:

“Desa Sumbergondo mengoptimalkan petik apel sebagai *icon* Desa Sumbergondo. Pertanian organik mulai disosialisasikan tahun 2012. Desa sumbergondo memiliki kuota lahan sebesar 20 Hektar untuk dimanfaatkan menjadi kawasan petik apel. Kawasan ini merupakan lahan masyarakat setempat serta dikelola sendiri oleh masyarakat yang *notabene* nya bekerja sebagai petani” *(Hasil wawancara dengan Ibu “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.00-12.00 wib di Kantor Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji).*

Dari beberapa hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kawasan agrowisata tidak dapat mengdankan peran pemerintah secara mandiri melainkan membutuhkan peran swasta serta

masyarakat dalam pengelolaannya agar pengembangan agrowisata di Kota Batu dapat berjalan secara sistematis dan salig menguntungkan berbagai pihak.

4. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu beserta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam Pengembangan Pariwisata Pertanian Bebas Tata Ruang.

Dalam pengembangan pariwisata berbasis pertanian pemerintah merumuskan strategi yang nantinya akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata pertanian berbasis tata ruang. Strategi dirumuskan melalui analisis faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya strategi yang dirumuskan oleh pemerintah daerah, langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan berpedoman pada strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Bila dikaitkan dengan pengertian strategi menurut Bintoro (1982: 33-35), bahwa strategi merupakan “Keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan-kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti, guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan. Strategi merupakan “perhitungan” mengenai rangkaian kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan. Dimana dalam strategi itu terdapat metode dan teknik” selain itu Bintoro juga menjelaskan bahwa strategi merupakan rangkain kebijaksanaan dan pelaksanaan dalam rangka memecahkan persoalan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi dibutuhkan pemerintah daerah dalam mencapai suatu tujuan tertentu maupun untuk mengatasi suatu permasalahan.

Dalam pengembangan agrowisata di Kota Batu, pemerintah daerah juga merumuskan strategi guna mencapai tujuan dan sasaran pengembangan agrowisata secara optimal, strategi pemerintah daerah Kota Batu khususnya Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Batu beserta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah:

a. Pembagian Kawasan

Di Republik Indonesia hak negara untuk mengatur penggunaan ruang secara jelas diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tetapi di negara yang kapitalis sekalipun dimana hak perseorangan sangat dijunjung tinggi, terdapat kesadaran di dalam masyarakatnya bahwa penggunaan lahan memang perlu diatur. Hal ini tidak lain karena manfaat yang akan didapat oleh seluruh masyarakat jauh lebih besar dibanding kerugian yang mungkin akan dirasakan sebagian kecil masyarakat.

Definisi perencanaan tata ruang wilayah memiliki pengertian sedikit berbeda dengan definisi perencanaan wilayah. Definisi dari perencanaan tata ruang wilayah menurut Tarigan (2002:54) adalah:

Perencanaan penggunaan lahan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Penetapan bagian-bagian wilayah yang dengan tegas diatur penggunaannya dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang/ tidak diatur penggunaannya.

Dari definisi tersebut disebutkan bahwa ada bagian-bagian yang tidak/kurang diatur penggunaannya. Hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak memperdulikan bagian-bagian tersebut. Namun untuk masalah pemanfaatannya diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi tidak semua harus diatur pemerintah, namun masyarakat khususnya pemilik modal dapat menggunakan bagian tersebut dengan bebas.

Perencanaan tata ruang wilayah, jika dibagi berdasarkan materi yang dicakup dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu (Tarigan, 2002:55):

1. Perencanaan yang mencakup keseluruhan wilayah yaitu perkotaan dan non-perkotaan (wilayah belakang). Fokus utamanya menciptakan hubungan-hubungan yang serasi antar kota dengan wilayah belakangnya. Misalnya: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
2. Perencanaan khusus wilayah perkotaan. Fokus utamanya adalah keserasian hubungan antara berbagai kegiatan di dalam kota untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan itu sendiri plus kebutuhan masyarakat yang datang dari luar kota. Misalnya: Rencana Tata Ruang Kota (dulu disebut master Plan), Rencana Tata Ruang Ibukota Kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan (IKK).

Pembagian kawasan serta pemanfaatan ruang tiap daerah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu merupakan salah satu dokumen pembangunan yang strategis karena dokumen tersebut menjadi acuan bagi setiap gerak dan langkah pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat Kota Batu.

Dinamika perkembangan wilayah Kota Batu saat ini lebih mengarah pada perkembangan Kota Batu ke depan sebagai sentra pertanian, sentra wisata dengan ikon Kota Batu sebagai “Kota Wisata”. Kebutuhan akan ruang di wilayah Kota Batu untuk mendukung program pembangunan yakni pengembangan perdagangan hasil pertanian dan penguatan industri pertanian (*agro-industry*), penambahan ragam obyek dan atraksi wisata dengan didukung sarana, prasarana dan unsur penunjang wisata, serta meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia Kota Batu melalui jalur pendidikan dan membentuk sekolah unggulan bertaraf nasional bahkan internasional. Pengembangan Kota Batu pada sektor pertanian, wisata dan pendidikan diarahkan sesuai dengan karakteristik Kota Batu dalam bidang ilmu pengembangan pertanian, pariwisata dan kerajinan sehingga menuntut paradigma baru dalam membuat arahan penataan ruang sebagai panduan pembangunan Kota Batu.

Perubahan kualitas lingkungan khususnya degradasi kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung di Kota Batu, juga mendorong untuk segera melakukan reorientasi dalam membuat arahan rencana tata ruang. Sebagian kawasan lindung yang dimaksud saat ini telah beralih fungsi dan sebagian lagi mengalami kerusakan yang mengkhawatirkan. Kerusakan kawasan lindung secara umum mengakibatkan dampak lingkungan serius di beberapa bagian wilayah Kota Batu, bahkan berdampak ke wilayah diluar wilayah Kota Batu. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan paradigma pembangunan yang berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata di Kota Batu tentunya juga harus diatur melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu agar dalam pemanfaatan ruang

dapat digunakan secara tepat. Kota batu yang merupakan kota berbasis pertanian atau biasa disebut juga agropolitam menuntut pengembangan sektor pariwisata mengarah pada sektor pertanian sehingga sektor pariwisata yang dikembangkan berbasis pertanian atau biasa disebut agrowisata. Dalam pengembangan agrowisata pemerintah juga harus dengan tegas membuat regulasi berkenaan dengan pembagian kawasan (*zoning*) agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan peruntukkan kawasan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030 dijabarkan mengenai pengembangan agrowisata di Kota Batu pada Bab III Rencana Struktur Ruang RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030. Pengembangan agrowisata di Kota Batu diawali dari tiga desa wisata sesuai dengan yang dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030 “Agrotourism dengan kegiatan wisata yang direncanakan berupa festival petik apel dan *hiking* di kebun apel. Pengembangan kegiatan wisata ini direncanakan di Desa Punten, Desa Sumbergondo dan Desa Bumiaji Kecamatan Batu. Dan wisata agrotourism juga terdapat di Kusuma agro.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan “S” selaku Kepala Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Batu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan agrowisata di Kota Batu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030 melalui pembagian zona kawasan atau Bagian Wilayah Kota (BWK). Berikut hasil wawancara dengan Bapak “S”:

“Pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Batu dijelaskan mengenai pembagian zona dimana Bagian Wilayah Kota (BWK) I adalah kecamatan Bumiaji yang merupakan sentra

agrowisata, Bagian Wilayah Kota (BWK) II yaitu kecamatan Batu yang merupakan kawasan untuk membangun hotel, infrastruktur dan juga fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan Bagian Wilayah Kota (BWK) III yaitu kecamatan Junrejo merupakan kawasan yang dikembangkan untuk hunian masyarakat seperti perumahan serta *home industry*. Sehingga pengembangan agrowisata dioptimalkan di Kecamatan Bumiaji sesuai dengan *zoning* yang telah ditetapkan” (*Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Batu tanggal 5 Maret 2015 pukul 08.30-10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu*)

Pemanfaatan ruang wilayah tidak terlepas dari hal yang berhubungan dengan pembagian zona (*zoning*). *Zoning* merupakan peraturan penggunaan lahan agar lahan dapat digunakan sebagaimana mestinya dan meminimalisir terjadinya penyimpangan. Definisi dari pembagian zona atau yang juga disebut sebagai *zoning* menurut Gallion (1992: 147) adalah:

Zoning merupakan peraturan yang sah bagi penggunaan lahan. *Zoning* merupakan penerapan kewenangan pemeliharaan ketertiban bagi perlindungan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan umum. Peraturan tersebut mencakup ketentuan-ketentuan bagi penggunaan lahan dan pembatasan-pembatasan pada bentuk dan isi bangunan yang akan menempati lahan tersebut.

Setelah peneliti mengamati di lapangan melalui observasi dan wawancara kepada narasumber yang berada di desa wisata yaitu Desa Bumiaji dan Desa Sumbergondo, pengembangan agrowisata telah tepat dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan *Zonasi* yang telah ditentukan. Karena disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah bahwa pengembangan agrowisata berada pada ketiga Desa yaitu Desa Bumaiji, Desa Sumbergondo dan Desa Punten dimana ketiga desa tersebut merupakan desa wisata yang berada di Kecamatan Bumiaji.

Sedangkan pengelola swasta yang memiliki kawasan agrowisata adalah Kusuma Agro Convention Center yang berada di Jalan Abdul Gani Atas.

Hal ini diperkuat dengan adanya penjelasan melalui wawancara oleh “S” yang bekerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan Produk Wisata:

“Pengembangan agrowisata pada mulanya ada di 4 Desa yakni Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa Punten dan Desa Tulungrejo. Yang mana masing-masing dari desa ini memiliki potensi yang berbeda dalam hal pengembangan agrowisata. Desa Tulungrejo, Desa Bumiaji dan Desa Sumbergondo merupakan desa yang mengoptimalkan lahannya untuk dijadikan wahana petik apel sedangkan desa Punten mengoptimalkan pengembangan agrowisata melalui petik Jeruk” *(Hasil wawancara dengan “S” selaku kepala Sub Bidang Pengembangan Produk Wisata pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 08.00-09.00 wib di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.*

Dengan mengacu pada pengertian dari perencanaan tata ruang wilayah serta pembagian zona kawasan (*zoning*) dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan agrowisata di Kota Batu telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030.

Pengembangan agrowisata di Kota Batu juga mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029 dimana Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional. Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029 juga dijabarkan mengenai kawasan untuk pengembangan agrowisata yaitu berada di Kecamatan

Bumiaji karena Kecamatan Bumiaji memiliki potensi perkebunan dan pertanian yang mendukung untuk mengembangkan sektor pariwisata daerah.

Dalam hal pengembangan agrowisata berbasis tata ruang di Kota Batu, pembagian kawasan merupakan bentuk dari strategi tingkat korporasi. Strategi tingkat korporasi menurut Wheelan dan Hunger (2001:24) merupakan “strategi yang menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dari manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan produk dan jasa”.

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya memiliki peran sebagai penyedia layanan serta menyediakan infrastruktur baik sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan World Bank (1997) yang membagi peran pemerintah menjadi tiga yaitu peran minimal dimana pemerintah memiliki peran dalam menyediakan barang-barang publik, melakukan pertahanan, keamanan negara, manajemen ekonomi makro serta penyediaan fasilitas kesehatan publik. Peran antara merupakan peran pemerintah dalam menanggulangi eksternalitas, mengatur monopoli, dan mengatasi informasi yang tidak sempurna. Sedangkan peran aktif dari pemerintah adalah mengkoordinasi kegiatan swasta dengan cara mendukung fungsi pasar dan memberikan inisiatif. Dalam hal pengembangan agrowisata pemerintah memiliki peran penting dalam hal menyediakan barang-barang publik bagi masyarakat.

Pemerintah daerah Kota Batu dalam perannya sebagai penyedia barang publik menuangkan kebijakan berkenaan dengan penyediaan sarana prasarana dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah (RIPPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029. Berikut kebijakan pemerintah daerah berkenaan dengan penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata di Kota Batu:

- 1) Kebijakan pembangunan sarana aksesibilitas adalah sebagai berikut:
 - a) Pengembangan moda transportasi darat, laut dan udara yang mendukung kepariwisataan di destinasi pariwisata nasional;
 - b) Pengembangan kualitas dan kapasitas moda transportasi darat, laut dan udara yang mendukung kepariwisataan di destinasi pariwisata nasional.
- 2) Kebijakan pembangunan prasarana aksesibilitas adalah sebagai berikut:
 - a) Pengembangan kualitas dan kapasitas bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal sebagai pusat distribusi dan pintu gerbang pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata nasional;
 - b) Pengembangan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi yang menghubungkan hub dengan destinasi pariwisata nasional.
- 3) Kebijakan pembangunan sistem aksesibilitas, sebagai berikut:
 - a) Peningkatan jalur dan frekuensi transportasi antara destinasi pariwisata nasional dan sumber wisatawan, baik luar negeri maupun dalam negeri.
 - b) Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi pariwisata
 - c) Pengembangan sistem informasi transportasi pariwisata.
- 4) Kebijakan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi:

- a) Pembangunan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata nasional;
- b) Peningkatan kualitas fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata dalam mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas, dan daya saing destinasi pariwisata nasional;
- c) Pengendalian pembangunan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang melampaui ambang batas daya dukung.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah berkenaan dengan pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana maupun fasilitas penunjang agrowisata di Kota Batu dibuktikan dengan pemberian sarana prasarana produksi kepada beberapa desa wisata di Kota Batu seperti Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, dan Desa Tulungrejo dimana ketiga desa ini mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa alat produksi serta pupuk dan vitamin untuk tanaman budidaya pada desa wisata yang dikembangkan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku industri wisata di Kota Batu seperti “FR” selaku staff bagian manager dan marketing Kusuma Agrowisata Convention Center mengenai fasilitas serta sarana prasarana yang diberikan pemerintah kepada Kusuma Agrowisata Convention Center:

“Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah juga pemilik agrowisata berupa infrastruktur jalan raya, pembangunan fasilitas umum seperti kamar mandi, mushola serta tempat istirahat dan juga memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pengunjung wisata. (Hasil wawancara dengan Bapak “FR” selaku staff bagian

manager dan marketing Kusuma Agrowisata Convention Center pada tanggal 3 Maret 2015 pukul 09.00-10.00 wib di Kusuma Agrowisata Convention Center).

Hal yang serupa juga dipaparkan melalui hasil wawancara peneliti dengan “S” selaku Kepala Kelompok Tani Makmur Abadi mengenai strategi pemerintah dalam penyediaan fasilitas serta sarana prasarana untuk kebutuhan pengembangan agrowisata di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji. Berikut hasil wawancara peneliti dengan “S”:

“Fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah kota Batu kepada kelompok tani Makmur Abadi adalah bantuan alat produksi dan infrastruktur berupa akses jalan serta mushola. Bantuan alat produksi diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perhutanan Kota Batu.” (Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Kelompok Tani Makmur Abadi pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 09.30-10.00wib di Kantor Kelompok Tani Makmur Abadi).

Selain Kusuma Agrowisata Convention Center dan Desa Tulungrejo, pemerintah daerah juga memberikan bantuan kepada Desa Bumaji dalam pengembangan kawasan agrowisata di Desa Bumiaji. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan “ES” selaku Kepala Desa Bumiaji mengenai sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah daerah. Berikut wawancara dengan “ES” selaku kepala Desa Bumiaji:

“Bantuan pemerintah kota Batu untuk pengembangan agrowisata pada Desa Bumiaji berupa alat produksi pertanian serta bahan-bahan teknis seperti pupuk dan vitamin tanaman. Pemerintah juga menyediakan fasilitas berupa akses jalan serta drainase juga sarana prasarana dengan membangun Gedung Graha Wisata di Desa Bumiaji dimana Gedung Graha Wisata ini digunakan untuk pertemuan pengelola wisata di Desa Bumiaji. (Hasil wawancara dengan Bapak “ES” selaku Kepala Desa Bumiaji pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 10.00-11.00wib di Kantor Desa Bumiaji).

Dari hasil wawancara di lapangan dengan narasumber berkenaan dengan penyediaan fasilitas umum serta sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah daerah masih ada beberapa desa yang belum secara optimal mengembangkan kawasan agrowisata di desa wisata dikarenakan terkendala akses jalan yang belum layak untuk dilewati oleh wisatawan. Pemerintah daerah belum secara merata menyediakan infrastruktur yang memadai bagi desa wisata di Kota Batu. Salah satu desa wisata yang akses jalannya menuju kawasan agrowisata belum layak untuk dilewati oleh pengunjung adalah Dusun Tegalsari, Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan “N” dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo. Berikut hasil wawancara dengan “N”:

“Kendala petik apel di Dusun Tegalsari, Desa Sumbergondo adalah infrastruktur jalan yang belum memadai untuk menuju kawasan agrowisata petik apel. Alih fungsi lahan juga terjadi di desa Sumbergondo, ada lahan produktif yang dibangun untuk sekolah.”
(Hasil wawancara dengan “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan Desa Sumbergondo pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.00-12.00wib di Kantor Desa Sumbergondo).

Maka dari itu diperlukan pemantauan kembali ke lapangan oleh pemerintah daerah khususnya dinas terkait yang menangani pembangunan infrastruktur jalan raya agar pembangunan infrastruktur dapat merata sehingga akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar desa wisata di Kota Batu.

Strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik merupakan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam strategi fungsional. Menurut Wheelen dan Hunger (2001:24) strategi fungsional merupakan “Strategi yang menekankan pada pemaksimalan sumber daya

produktivitas. Dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada disekitarnya bersama-sama mengembangkan startegi untuk mengumpulkan berbagai aktivitas dan kompetensi guna memperbaiki kinerja”. Jika dikaitkan dengan penyediaan sarana prasarana dari pemerintah untuk pelaku bisnis agrowisata maupun masyarakat di desa wisata dalam hal mengembangkan desa wisata, sarana prasana berupa infrastruktur dan fasilitas umum dalam menunjang aktivitas pengembangan kawasan agrowisata di Kota Batu.

c. Promosi atau Pemasaran

Pemasaran kawasan wisata serta pemasaran produk wisata sangat dibutuhkan desa wisata dan juga pemilik industri pariwisata seperti Kusuma Agrowisata Convention Center yang mengarahkan sektor pariwisata menuju pariwisata berbasis pertanian atau biasa disebut agrowisata. Agrowisata memiliki daya tarik sendiri bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan wisata dengan nuansa alam dengan suhu udara yang sejuk serta jauh dari keramaain kota.

Pemasaran kawasan wisata maupun pemasaran produk wisata menjadi hal yang penting diperhatikan oleh pemerintah daerah agar kawasan pariwisata dapat memberikan daya tarik bagi wisatawan serta produk wisata memiliki nilai jual yang tinggi bagi industri pariwisata di Kota Batu baik industri wisata yang dikelola oleh masyarakat seperti yang ada di desa wisata maupun industri wisata milik swasta. Barikut strategi pemerintah yang dituangkan melalui program-program pengembangan pariwisata yang dijabarkan melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu Tahun 2014-2029:

1) Program Pengembangan Pemasaran

Pengembangan pemasaran ditekankan pada kegiatan promosi untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar serta membuka pasar baru bagi produk-produk wisata di Jawa Timur, sekaligus berupaya memulihkan citra pariwisata di luar negeri melalui:

- a) Promosi dalam negeri
- b) Promosi luar Negeri
- c) Pemberdayaan, sehingga mampu menjalin kerjasama dengan media massa (media cetak dan elektronik) di Jawa Timur.
- d) Peningkatan kinerja promosi pariwisata dan kesenian Jawa Timur, dengan sasaran kegiatan utamanya antara lain analisis pasar wisata 2 tahun sekali, penyediaan sarana promosi, dokumentasi bahan promosi, dan penerbitan majalah pariwisata Jawa Timur
- e) Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) seperti Mandala Wisata Jawa Timur, dengan sasaran antara lain penyiapan kelembagaan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain.

2) Kebijakan Pembangunan Pemasaran:

Kebijakan pengembangan pasar wisatawan, meliputi:

- a) Pemantapan segmen pasar wisatawan *masal* (*mass market*) dan pengembangan segmen ceruk pasar (*niche market*) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Kebijakan pengembangan citra pariwisata, meliputi:

- a) Pengembangan dan pemantapan citra Indonesia dalam skala nasional (*national branding*) maupun destinasi pariwisata (*destination branding*);
- b) Pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Kebijakan pengembangan kemitraan promosi pariwisata, meliputi:

- a) Penguatan dan perluasan eksistensi perwakilan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.

Pemerintah daerah Kota Batu khususnya Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Batu memiliki strategi pemasaran untuk mempromosikan kawasan wisata di Kota Batu agar dapat diketahui oleh khalayak umum sehingga akan banyak wisatawan yang mengunjungi kawasan agrowisata di Kota Batu. Dengan banyaknya kunjungan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dalam melakukan promosi kunjungan wisata dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan “HJ” selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Berikut hasil wawancara dengan “HJ”:

“Strategi yang dilakukan pemerintah kota Batu dalam memasarkan produk wisata adalah dengan membuat media promosi seperti banner, reklame serta video yang dipasang di bandara yaitu bandara Juanda dan Soekarno Hatta dan juga melalui media cetak berupa surat kabar dan majalah. Pada tanggal 15 Februari-30 Februari 2015 Kota Batu juga berkesempatan mewakili Indonesia untuk pameran wisata di Ceko, hal seperti itu merupakan kesempatan besar untuk Indonesia untuk dapat mempromosikan kawasan wisatanya di kancah Internasional dan tentunya Kota Batu disini merasa bangga dapat

mewakili Indonesia di acara Internasional tersebut. Sedangkan strategi yang dilakukan pihak swasta dalam mengembangkan produk wisata yang dikelolanya adalah melalui website, ieflet serta promosi melalui kunjungan wisata ke kawasan wisata lainnya. *(Hasil wawancara dengan "HJ" selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 08.30-09.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu).*

Tidak hanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu yang memiliki peran dalam mempromosikan kawasan wisata dan produk wisata yang ada di Kota Batu melainkan pemerintah daerah bersama Kusuma Agrowisata Convention Center juga melakukan promosi melalui pameran secara rutin kepada pelaku bisnis serta masyarakat umum agar kawasan wisata juga produk wisata dapat dikenal di masyarakat luas. Berikut hasil wawancara dengan "N" selaku staff bagian personalia Kusuma Agrowisata Convention center:

"Strategi yang dilakukan oleh pemerintah koto Batu dan pemilik agrowisata dalam mengembangkan produk agrowisata adalah dengan mengadakan pameran secara rutin yang mengundang masyarakat serta pelaku bisnis untuk dapat menyaksikan pameran tentang kepariwisataan yang ada di Kota Batu serta melakukan pemasaran produk hasil wisata pertanian seperti sari apel, jenang apel, keripik apel, dodol jeruk, sari jeruk dan masih banyak macam produk yang telah dihasilkan dari agrowisata melalui kemasan-kemasan yang dijual di toko oleh-oleh dan promosi melalui media masa." *(Hasil wawancara dengan "N" selaku staff bagian personalia Kusuma Agrowisata Convention Center pada tanggal 3 Maret 2015 pukul 09.00-10.00wib di Kusuma Agrowisata Convention Center).*

Pemasaran hasil produksi desa wisata berupa buah-buahan, sayur mayur dan juga olahan makanan dan minuman juga dioptimalkan di desa wisata Tulungrejo. Pemasaran produk olahan hasil pertanian agrowisata dikemas dalam bentuk *welcome drink* sebagai pengenalan produk pada pengunjung wisatawan yang datang berkunjung di desa wisata Tulungrejo. Berikut pemaparan dari hasil

wawancara dengan Kepala Kelompok Tani Makmur Abadi mengenai sistem pemasaran produk yang dijalankan di Desa Wisata Tulungrejo:

“Distribusi hasil produksi oleh petani dikemas dan dipromosikan melalui *“welcome drink”* bagi pengunjung kawasan wisata juga disistribusikan melalui koperasi desa dan toko oleh oleh yang ada di Kota Batu.” *(Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Kelompok Tani Makmur Abadi Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 09.30-10.00wib di Kantor Kelompok Tani Makmur Abadi).*

Beda halnya dengan Desa Bumiaji yang secara mandiri memasarkan produk agrowisatanya. Desa bumiaji memiliki potensi wisata petik apel, petik jeruk dan petik jambu yang dapat diolah juga menjadi bahan makanan dan minuman seperti sari buah, dodol, jenang, keripik dan pia. Produksi Desa Bumiaji tersebut menggunakan modal dari Desa Bumiaji sendiri dan dalam pemasarannya dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa. Berikut penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan “H” selaku Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Desa Bumiaji:

“Pemasaran dari hasil produksi petik apel buat dipasarkan sepenuhnya oleh masyarakat desa Bumiaji. Dalam hal pengelolaan dilakukan oleh masyarakat setempat dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa.” *(Hasil wawancara dengan “H” selaku Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Desa Bumiaji pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 10.00-11.00wib di Kantor Desa Bumiaji)*

Pemasaran produk agrowisata Desa Bumiaji mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Distribusi hasil olahan produksi Desa Bumiaji tidak hanya dipasarkan di Kota Batu saja melainkan di luar Jawa seperti Kalimantan, dan pada tahun 2013 Desa Bumiaji mendapat penghargaan langsung oleh Presiden RI yang kala itu sedang menjabat yaitu Bapak Susilo Bambang

Yudhono karena produksi agrowisata yang dapat menarik banyak pengunjung dalam negeri maupun luar negeri. Berikut hasil wawancara dengan “H” selaku Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Desa Bumiaji:

Hasil olahan buah apel, jeruk serta jambu menjadi sari buah, pia, keripik, jenang oleh Desa Bumiaji disitribusikan tidak hanya di Kota Batu saja melainkan juga kota lain bahkan sampai di luar Jawa seperti Kalimantan. Pada tahun 2013, hasil olahan Desa Bumiaji ini mendapat penghargaan langung oleh Presiden RI yang kala itu sedang menjabat yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. *(Hasil wawancara dengan “H” selaku Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Desa Bumiaji pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 10.00-11.00wib di Kantor Desa Bumiaji).*

Maka dapat diambil kesimpulan melalui hasil pengamatan di lapangan juga wawancara dengan narasumber terkait pemasaran kawasan wisata dan produk wisata melalui promosi dan pameran bahwa sistem pemasaran melalui promosi dapat secara efektif meningkatkan minat pengunjung untuk berkunjung di desa wisata Kota Batu maupun Kusuma Agrowisata Convention Center. Dalam pengembangannya pemerintah harus secara konsisten dan berkelanjutan dalam mengembangkan produk lokal wisata yang memiliki potensi besar untuk dikenal di mancanegara. Pemerintah harus secara adil dan menyeluruh dalam memasarkan produk olahan antar desa wisata juga wisata yang dimiliki oleh sektor swasta seperti Kusuma Agrowisata Convention Center untuk meminimalisir ketimpangan yang rentan terjadi.

Dalam pengembangan agrowisata, promosi atau pemasaran merupakan faktor penting untuk memajukan sektor pariwisata di Kota Batu agar dapat dikenal oleh masyarakat umum sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di Kota Batu. Strategi promosi atau pemasaran yang dirumuskan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu beserta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang termasuk dari strategi bisnis yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger (2001:24). Strategi bisnis menurut Wheelen dan Hunger adalah “strategi yang biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk atau jasa dalam industri khususnya segmen pasar yang memiliki fungsi melayani. Strategi bisnis menekankan pada peningkatan laba dalam produksi dan penjualan produk dan jasa yang dihasilkan. Strategi bisnis juga mengintegrestasikan berbagai aktivitas fungsional untuk mencapai tujuan divisi. Strategi bisnis merupakan salah satu dari *overall cost leadership* atau diferensiasi.

d. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Kota Batu dengan Pelaku Industri Pariwisata di Kota Batu

Pengembangan pariwisata berbasis pertanian di Kota Batu tidak hanya mengikutsertakan pihak swasta dan pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat desa sendiri khususnya desa wisata di Kota Batu. Partisipasi aktif masyarakat desa wisata ditunjukkan dengan adanya kelompok tani yang secara legal dibentuk untuk dikoordinir oleh masyarakat setempat desa wisata. Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA) contohnya, merupakan kelompok tani yang dibentuk oleh masyarakat Desa Tulungrejo yang berprofesi sebagai petani. Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA) telah dibentuk sejak tahun 2006. Berikut hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA)

mengenai kerjasama yang dibangun pihak pemerintah dengan Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA):

“Fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah kota Batu kepada kelompok tani Makmur Abadi adalah bantuan alat produksi dan infrastruktur berupa akses jalan serta mushola. Bantuan alat produksi diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perhutanan Kota Batu.” (*Hasil wawancara dengan “S” selaku kepala Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA) pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 09.30-10.00wib di Kantor Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA) Desa Tulungrejo.*

“S” juga menjelaskan mengenai alur komunikasi dari masyarakat desa khususnya Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA) dengan pemerintah pusat berkenaan dengan alur koordinasi pengembangan agrowisata desa wisata Tulungrejo:

“Alur komunikasi dari desa ke pemerintah pusat Kota Batu (*Bottom Up*) ataupun dari pemerintah pusat Kota Batu ke desa (*Top Down*) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).” (*Hasil wawancara dengan “S” selaku kepala Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA) pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 09.30-10.00wib di Kantor Kelompok Tani Makmur Abadi (KTMA) Desa Tulungrejo.*

Pengembangan agrowisata juga dioptimalkan di Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji. Desa Bumiaji merupakan salah satu desa wisata yang berpotensi untuk pengembangan agrowisata khususnya wisata petik apel dan petik jambu. Kerjasama dinas terkait dengan desa Bumiaji juga terjalin hingga saat ini. Komunikasi serta koordinasi pemerintah daerah dengan desa wisata dilakukan tidak hanya *top down* melainkan juga *bottom up*. Hubungan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dengan seperangkat aparatur desa wisata Bumiaji juga dibuktikan dari hasil wawancara dengan “ES” selaku kepala desa Bumiaji dan “H” selaku kepala bidang ekonomi dan pembangunan desa Bumiaji. Berikut hasil

wawancara dengan “ES” dan “H” mengenai bantuan pemerintah yang diberikan kepada desa Bumiaji dalam pengembangan agrowisata:

“Bantuan pemerintah kota Batu untuk pengembangan agrowisata pada Desa Bumiaji berupa alat produksi pertanian serta bahan-bahan teknis seperti pupuk dan vitamin tanaman. Pemerintah juga menyediakan fasilitas berupa akses jalan serta *drainase* juga sarana prasarana dengan membangun Gedung Graha Wisata di Desa Bumiaji dimana Gedung Graha Wisata ini digunakan untuk pertemuan pengelola wisata di Desa Bumiaji.” *(Hasil wawancara dengan “ES” selaku kepala desa Bumiaji dan “H” selaku kepala bidang ekonomi dan pembangunan Desa Bumiaji pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 10.00-11.00wib di Kantor Desa Bumiaji.*

Dari hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dijelaskan mengenai pola komunikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu bersama dengan pelaku bisnis agrowisata Kota Batu dapat ditarik kesimpulan bahwa alur komunikasi dilakukan secara kondisional sesuai dengan kebutuhan yang ada. Berikut hasil wawancara dengan “S” mengenai alur komunikasi dalam hal pengembangan agrowisata:

“Pola komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu bersama dengan pelaku bisnis dan juga masyarakat adalah dengan mengundang pelaku wisata untuk berkumpul dengan pemerintah daerah Kota batu jika ada program pengembangan agrowisata yang ingin dikoordinasikan. Masyarakat juga dikumpulkan melalui kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di masing-masing desa wisata. Perkumpulan pelaku wisata ini tidak dilakukan secara rutin melainkan sesuai kebutuhan.” *(Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu tanggal 4 Maret 2015 pukul 09.00-10.00wib di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).*

Pemerintah daerah juga menggiatkan kerjasama antar desa wisata. Desa Sumbergondo merupakan salah satu desa wisata yang dikembangkan untuk kawasan agrowisata petik apel, petik jeruk serta sayur mayur yang berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dalam pelaksanaannya, Desa Sumbergondo sedang giat mengoptimalkan pupuk tanaman yang bersifat organik agar budidaya tanaman yang dikembangkan disana dapat memproduksi hasil olahan yang aman untuk dikonsumsi. Bahan organik juga lebih ramah terhadap lingkungan bila dibandingkan dengan pupuk dari olahan bahan kimia. Pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota juga memberikan bantuan berupa pupuk organik juga alat bantu produksi pengolahan buah dan sayur mayur serta penyuluhan kepada masyarakat tentang penggunaan pupuk organik agar petani Desa Sumbergondo dapat berpindah dari penggunaan pupuk berbahan dasar kimia menjadi pupuk berbahan dasar organik. Berikut hasil wawancara dengan “N” dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Desa Sumbergondo mengenai kerjasama Desa Sumbergondo dengan Pemerintah Daerah Kota Batu:

“Hubungan atau sinergitas dari pemerintah desa dengan pemerintah kota Batu juga dinas terkait adalah melalui bantuan berupa infrastruktur seperti jalan raya juga fasilitas umum juga sarana prasarana dan juga bahan-bahan untuk pertanian seperti bibit yang unggul dan pupuk yang diberikan Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada kelompok tani di masing-masing desa.” *(Hasil wawancara dengan “N” selaku Petugas Penyuluhan Lapangan Desa Sumbergondo pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 11.00-12.00wib di Kantor Desa Sumbergondo).*

Dari beberapa data yang didapatkan melalui hasil pengamatan dan juga wawancara peneliti dengan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa ataupun dinas terkait di dalamnya dan juga pihak masyarakat serta alur komunikasi dengan pihak swasta dalam hal pengembangan agrowisata sudah berjalan secara optimal. Meskipun di lapangan alur komunikasi atau pertemuan untuk mengevaluasi ataupun mengakomodir kebutuhan masyarakat atau pelaku industri pariwisata tidak dilakukan secara rutin. Pertemuan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, juga pihak swasta yang dilakukan secara rutin dapat membawa pengembangan agrowisata lebih sistematis dan jauh berkembang karena adanya koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan agrowisata.

Strategi pemerintah melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pelaku industri pariwisata dalam hal pengembangan agrowisata merupakan bentuk dari strategi fungsional yang menurut Whhelen dan Hunger (2001:24) merupakan “suatu strategi yang menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas. Dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada disekitar mereka dengan mengembangkan startegi untuk mengumpulkan berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja”. Dengan adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pelaku industri pariwisata, komunikasi dapat berjalan dengan baik serta memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan terhadap pengembangan agrowisata serta dapat

bekerjasama guna mencapai hasil yang optimal yang berdampak positif terhadap pengembangan agrowisata di Kota Batu.

5. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang di Kota Batu.

Dalam mengembangkan daerah melalui potensi daerah yang dimiliki, tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan suatu daerah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi merupakan faktor pendorong dan faktor penghambat yang dianalisis melalui kondisi daerah dan lingkungan yang dapat mempengaruhi pengembangan suatu daerah. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012:34) sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program. Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012:34) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi implementor.

Dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang, terdapat faktor pendorong serta faktor penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu. Adapun faktor penghambat serta faktor pendorong pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

1) Otonomi Daerah

Dengan adanya desentralisasi yang menghasilkan otonomi daerah dimana daerah dengan mandiri dapat mengurus serta mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia Tahun 1945 dapat menjadi faktor pendukung pemerintah daerah kota Batu untuk mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki kota Batu khususnya dalam hal mengelola kawasan wisata serta mengelola hasil pendapatan yang diterima dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata juga merupakan potensi unggulan di Kota Batu yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Batu. Pemerintah daerah Kota Batu sangat mengoptimalkan cara promosi melalui lisan serta tulisan berupa media masa juga sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar pengembangan pariwisata di Kota Batu dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja implemetasi suatu program yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012:34), otonomi daerah termasuk dalam faktor pendorong yang dilihat dari sisi kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Dalam pengertiannya bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, karena dirasa daerah satu dengan daerah lain memiliki corak yang berbeda dengan potensi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, maka dari itu pemerintah pusat memberikan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi, keadaan, serta kondisi daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012:34) yang artinya disini otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah Kota Batu melihat dari sisi kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam hal mengembangkan konsep agrowisata yang sedang giat diotimalkan oleh pemerintah Kota Batu.

2) **Kondisi Geografis**

Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata yang mengunggulkan potensi pertanian seperti kawasan wisata petik apel, petik jeruk serta kawasan wisata pertanian organik. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai

daerah dingin sehingga dapat menunjang kondisi pariwisata yang dikembangkan menuju pariwisata pertanian yang banyak menarik minat wisatawan.

Kondisi geografis merupakan faktor pendorong Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisatanya menuju pariwisata berbasis pertanian atau biasa disebut dengan agrowisata. Hal ini didukung dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012:34) sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, bahwasannya implementasi suatu program dipengaruhi dari sumber daya yang ada. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu, kondisi geografis merupakan potensi sumber daya yang dimiliki Kota Batu dalam mengembangkan kawasan agrowisata di Kota Batu.

Jika dikaitkan dengan pendapat Pendit (1999: 42-48) mengenai jenis-jenis pariwisata yang mana dikelompokkan menjadi 14 jenis pariwisata yaitu wisata budaya, wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata komersial, wisata industri, wisata politik, wisata konvensi, wisata sosial, wisata pertanian, wisata marina atau wisata bahari, wisata cagar alam, wisata buru, wisata pilgrim dan wisata bulan madu, jenis pariwisata yang dikembangkan di Kota Batu masuk dalam kategori jenis pariwisata pertanian karena potensi pariwisata yang ingin dikembangkan oleh pemerintah kota Batu adalah pariwisata berbasis pertanian atau biasa disebut dengan agrowisata, hal ini sesuai dengan kondisi geografis kota Batu yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan.

3) Komoditas Unggulan

Komoditas unggulan masing-masing kawasan di Kota Batu tentunya menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis pertanian atau biasa disebut dengan agrowisata. Karena salah satu syarat dalam pengembangan pariwisata pertanian adalah unggulnya komoditas pertanian di masing-masing daerah guna menunjang berkembangnya sektor pariwisata berbasis pertanian. Seperti yang dijelaskan oleh “S” yang bekerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan Produk Wisata:

“Pengembangan agrowisata pada mulanya ada di 4 Desa yakni Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa Punten dan Desa Tulungrejo. Yang mana masing-masing dari desa ini memiliki potensi yang berbeda dalam hal pengembangan agrowisata. Desa Tulungrejo, Desa Bumiaji dan Desa Sumbergondo merupakan desa yang mengoptimalkan lahannya untuk dijadikan wahana petik apel sedangkan desa Punten mengoptimalkan pengembangan agrowisata melalui petik Jeruk” (*Hasil wawancara dengan “S” selaku kepala Sub Bidang Pengembangan Produk Wisata pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 08.00-09.00 wib di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu*).

Komoditas unggulan berupa tanaman organik maupun sayur mayur yang dikembangkan di masing-masing desa wisata Kota Batu merupakan faktor pendorong pengembangan kawasan agrowisata di Kota Batu. Komoditas unggulan merupakan potensi yang harus dikembangkan agar pengembangan agrowisata di Kota Batu dapat optimal. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012:34) sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, bahwasannya implementasi suatu program dipengaruhi dari sumber daya yang baik sumber daya manusia maupun

sumber daya non manusia. Dalam pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang di Kota Batu, komoditas unggulan merupakan potensi sumber daya yang dimiliki Kota Batu dalam mengembangkan kawasan agrowisata di Kota Batu.

Adanya komoditas unggulan di Kota Batu berupa tanaman buah-buahan serta sayuran organik menjadikan kota Batu berpotensi untuk mengembangkan konsep pariwisata berbasis pertanian atau biasa disebut dengan konsep agrowisata. Hal ini sesuai dengan konsep agrowisata menurut Chamdani (2008) bahwa agrowisata merupakan suatu kegiatan perjalanan atau wisata yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian. Menurut Sajogja (1990: 151) potensi merupakan sebuah kemungkinan yang mungkin dapat diaktifkan dalam pembangunan yang mencakup alam, dan manusia serta hasil kerja manusia itu sendiri. Contohnya disini kota Batu yang mengoptimalkan potensi desa berupa kawasan wisata petik apel, petik jeruk, petik jambu serta produksi sayur mayur berbahan organik yang menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke kota Batu.

4) Ketersediaan Infrastruktur

Infrastruktur seperti jalan raya, sarana prasarana serta fasilitas umum merupakan faktor penting dalam mengembangkan sektor pariwisata. Karena dengan adanya infrastruktur yang memadai masyarakat setempat maupun pihak swasta yang memiliki kawasan wisata dapat dengan optimal mengembangkan usahanya seperti adanya akses jalan umum yang memadai, penerangan jalan, air bersih serta listrik yang mendukung kawasan wisata. Serta sarana prasarana

seperti transportasi kota seperti angkutan umum yang memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata di Kota Batu tidak terkecuali dengan angkutan umum yang juga melewati desa wisata dapat mengoptimalkan desa wisata tersebut untuk diketahui banyak masyarakat sehingga akan menarik minat pengunjung yang ingin berkunjung ke kawasan desa wisata tersebut. Bantuan dari pemerintah kepada masyarakat lokal yang berada di desa wisata dalam mengembangkan potensi pariwisatanya juga merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata, pemerintah selama ini kerap memberikan bantuan berupa alat produksi seperti mesin olahan untuk mengolah hasil pertanian seperti apel yang dapat dimanfaatkan menjadi sari apel, keripik apel dan jenang apel juga bermacam-macam buah serta sayuran organik yang berkualitas.

Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor penting yang dibutuhkan kota Batu dalam mengembangkan pariwisata pertanian di Kota Batu. Pemerintah daerah Kota Batu memiliki peran dalam menyediakan infrastruktur berupa sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang dibutuhkan dalam mengembangkan Kota Batu menjadi kota wisata berbasis pertanian. Jika dikaitkan dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012:34) sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, ketersediaan infrastuktur merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan agrowisata di Kota Batu ditinjau dari dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia yang dapat mempengaruhi dari keberhasilan pengembangan agrowisata di Kota Batu.

Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan kawasan agrowisata di Kota Batu jika dikaitkan dengan peran pemerintah daerah menurut World Bank 1997 yang dikelompokkan menjadi tiga bagian peran pemerintah yaitu peran minimal, peran antara dan peran aktif, penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana guna mengembangkan kawasan agrowisata di Kota Batu masuk dalam peran pemerintah dilihat dari peran minimal yang salah satunya adalah menyediakan barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

5) Kerjasama antar *Stakeholder*

Dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tidak dapat berdiri sendiri untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dibuat. Hal ini juga penting diterapkan pada pengembangan kawasan agrowisata di Kota Batu. Peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) disini dibutuhkan agar pengembangan pariwisata di Kota Batu dapat dijalankan secara maksimal. Ketiga pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam hal ini adalah pihak pemerintah, pihak swasta serta masyarakat. Dalam pengembangan agrowisata masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholder*) memiliki peran yang berbeda. Pemerintah daerah disini memiliki peran sebagai pembuat regulasi berupa perundang-undangan maupun dokumen perencanaan yang legal, motivator serta fasilitator dalam mengembangkan agrowisata. Pihak swasta dalam pengembangan agrowisata ini memiliki peran sebagai pemilik modal atau investor yang membuka bisnisnya di Kota Batu untuk menghasilkan keuntungan (*profit*) berupa materi. Sedangkan

masyarakat disini memiliki peran untuk berpartisipasi dalam pengembangan agrowisata berupa bisnis usaha mikro kecil masyarakat yang nantinya akan memberikan dampak positif yaitu peningkatan pendapatan masyarakat setempat.

Jika dikaitkan dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012:34) sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, kerjasama antar stakeholder merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan agrowisata di Kota Batu ditinjau dari Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Dukungan dan koordinasi dengan instansi lain sangat dibutuhkan dalam implementasi program. Maka dari itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Dalam megembangkan kota Batu sebagai kawasan pariwisata pertanian berbasis tata ruang, pemerintah daerah tidak dapat secara mandiri mengelola serta mengembangkan kawasan agrowisata tanpa adanya kerjasama dengan pihak swasta juga masyarakat Kota Batu. Dengan adanya kerjasama serta koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta juga pihak masyarakat, pptensi agrowisata di Kota Batu dapat secara optimal dikembangkan dengan memberikan manfaat secara menyeluruh baik dari pemerintah, pihak swasta juga masyarakat.

Pengembangan agrowisata di kota Batu memerlukan peran aktif tidak hanya dari pemerintah kota Batu saja melaikan juga dari pihak swasta serta masyarakat untuk mengembangkan kota Batu sebagai kota wisata berbasis pertanian. Pemerintah kota Batu harus secara aktif membangun partisipasi pihak swasta dan masyarakat sesuai dengan peran pemerintah daerah menurut World Bank 1997 bahwa peran aktif pemerintah daerah adalah mengkoordinasi kegiatan

swasta yang bertujuan mendukung fungsi pasar dan memberikan inisiatif kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kota Batu sebagai kota wisata berbasis pertanian yang dapat dibuktikan dari berdirinya kawasan wisata yang dikelola oleh pihak swasta yang berada di desa Sisir Kota Batu yaitu Kusuma Agrowisata Convention Center yang mengunggulkan potensi petik apel, petik stroberi, dan petik jambu dan menyediakan tempat singga berupa hotel dan villa yang menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke Kusuma Agrowisata Convention Center.

6) Kelompok Masyarakat

Kerjasama dalam pengembangan agrowisata di Kota Batu tidak hanya mengikutsertakan pihak pemerintah, swasta serta masyarakat melainkan juga harus adanya kerjasama antar masyarakat dimana masyarakat disini sama-sama memiliki peran untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing guna menunjang pengembangan kawasan wisata di daerahnya. Masyarakat seringkali membentuk kelompok masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat guna membantu satu sama lain serta upaya kerjasama untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan produk pariwisata dari desa wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Jika dikaitkan dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012:34) sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu

program, kelompok masyarakat merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan pengembangan desa wisata di Kota Batu yang ditinjau dari karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program. Dengan adanya kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat di kawasan desa wisata berupa lembaga swadaya masyarakat serta kelompok tani, dapat memberikan dampak sosial yang positif terhadap masyarakat desa wisata khususnya dalam pengembangan kawasan agrowisata di Kota Batu. Hal ini juga didukung dari pendapat Salusu (1996) mengenai komponen dari konsep startegi yang salah satunya merupakan kemampuan internal yaitu kemampuan organisasi untuk melaksanakan rencana kerjanya bertolak dengan tersedianya sumber daya dalam arti bahwa masyarakat desa wisata mengoptimalkan kemampuan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat berupa lembaga swadaya masyarakat juga kelompok tani yang mana mengelola secara mandiri organisasinya baik dalam hal modal maupun pengelolaan kawasan agrowisata beserta produksi yang dihasilkan dari agrowisata.

b. Faktor Penghambat

1) Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah

Salah satu faktor yang menjadi kelemahan dalam pengembangan agrowisata di Kota Batu adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya kelompok tani yang berada di desa wisata Kota Batu. Dapat

dicontohkan di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji yang mengoptimalkan lahan produktif pertaniannya untuk budidaya tanaman apel serta sayur mayur dimana kelompok tani Desa Sumbergondo telah lama memakai bahan kimia pestisida untuk pupuk. Sejak tahun 2012 Desa Sumbergondo telah mendapatkan penyuluhan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mengenai penggunaan bahan organik untuk tanaman dan semaksimal mungkin dapat mengganti bahan kimia pestisida menjadi bahan organik yang lebih ramah lingkungan serta aman untuk dikonsumsi. Dalam kenyataannya masih banyak petani Desa Sumbergondo yang belum berpindah dari bahan kimia menjadi bahan organik dikarenakan penggunaan bahan kimia lebih mudah untuk digunakan serta mudah untuk dijual belikan dibanding bahan organik. Perlu usaha maksimal serta waktu yang lama untuk merubah pola pikir masyarakat setempat untuk memakai bahan organik pada perkebunan yang mereka punya. Karena pada dasarnya penggunaan bahan kimia seperti pestisida akan mempengaruhi kualitas dari produksi apel Desa Sumbergondo yang dikhawatirkan tidak aman untuk dikonsumsi. Sehingga perlu adanya usaha untuk mengganti pestisida ke bahan organik agar masyarakat setempat maupun pengunjung merasakan manfaat yang dihasilkan dari produksi apel Desa Sumbergondo.

Jika dikaitkan dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012:34) sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mewujudkan sasaran serta target yang telah ditentukan. Kapasitas sumber daya manusia tergolong kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi

keberhasilan suatu program maupun kebijakan. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di desa wisata akan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah kota Batu berupa regulasi yang dalam hal ini berkenaan dengan peraturan penggunaan lahan serta dapat secara mudah digerakkan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang nantinya dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat dengan mendominasi penggunaan lahan masyarakat setempat desa wisata.

2) Faktor Cuaca dan Suhu Udara

Salah satu kelemahan yang ada di Kota Batu berkenaan dengan pengembangan agrowisata adalah cuaca serta suhu udara yang sudah tidak mendukung dalam pengembangan agrowisata. Pemakaian barang elektronik secara berlebih, asap kendaraan bermotor yang semakin meningkat karena volume jumlah kendaraan bermotor serta penggundulan hutan secara besar-besaran juga merupakan faktor yang mempengaruhi bumi semakin panas. Pemanasan global di era sekarang ini membuat Kota Batu tidak lagi sedingin dan sesejuk awalnya. Hal ini dapat dibuktikan pada Desa Bumiaji yang mengalami penurunan produksi buah apel dan jeruk karena faktor cuaca dan suhu udara yang sudah tidak

mendukung. Dengan kondisi cuaca yang tidak mendukung untuk pengembangan agrowisata di Desa Bumiaji Kota Batu maka dikhawatirkan desa wisata petik apel tidak dapat berjalan secara optimal dan akan berdampak kepada penurunan kunjungan wisatawan sehingga akan mempengaruhi pendapatan petani apel serta masyarakat setempat desa wisata.

Jika dikaitkan dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012:34) sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, faktor cuaca dan suhu udara merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pengembangan kawasan wisata berbasis pertanian di Kota Batu jika ditinjau dari faktor lingkungan dimana faktor lingkungan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pengembangan agrowisata di Kota Batu khususnya agrowisata yang berpotensi untuk dikembangkan di dataran tinggi dengan suhu udara yang sejuk.

Secara teoritis diungkapkan oleh Salusu (1996) mengenai komponen dari konsep staretgi bahwa lingkungan merupakan faktor yang tidak dapat disangkal. Antara orang dengan lingkungan merupakan simbiosis mutualisme yang berarti bahwa keduanya terjadi interaksi yang saling mempengaruhi dan menguntungkan. Dalam hal ini faktor cuaca dan suhu udara yang makin meningkat sudah tidak lagi mendukung pengembangan kawasan wisata berbasis pertanian di Desa Bumiaji Kota Batu yang dapat merugikan masyarakat kota Batu khususnya di desa Bumiaji yang sudah tidak dapat secara optimal mengembangkan kawasan petik apel dan petik jambu di desa Bumiaji kota Batu. Sehingga pemerintah kota Batu dalam hal ini harus menyiapkan strategi untuk meminimalisir penurunan

produksi petik buah di desa Bumiaji misal dengan mengganti potensi unggulan berupa tanaman budidaya yang disesuaikan dengan kondisi cuaca dan suhu udara desa Bumiaji.

3) Dominasi Pihak Swasta terhadap Lahan Masyarakat

Potensi yang dimiliki tiap desa di Kota Batu mengarah pada sektor pertanian, maka dari itu pariwisata yang dikembangkan tentunya mengacu pada potensi yang dimiliki sehingga Kota Batu mengarah pada pariwisata berbasis pertanian atau biasa disebut dengan agrowisata. Dalam pengembangan agrowisata di tiap desa wisata, lahan yang digunakan untuk kawasan wisata seperti wisata petik apel, petik jambu, petik jeruk dan sayur mayur merupakan lahan produktif yang dimiliki oleh warga setempat sehingga warga setempat secara bebas dapat menggunakan lahan tersebut untuk dibudidayakan. Seiring berjalannya waktu banyak pihak swasta yang tertarik untuk menanam modal di Kota Batu dalam hal ini merupakan kepentingan bisnis pariwisata para penanam modal. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi masyarakat setempat desa wisata ketika regulasi tidak dengan tegas diterapkan oleh pemerintah.

Jika dikaitkan dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam Sabu (2012:34) sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, dominasi pihak swasta terhadap lahan produktif masyarakat menjadi ancaman bagi masyarakat desa wisata untuk mengembangkan kawasan agrowisata di lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dominasi pihak swasta timbul akibat adanya kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sedang berlangsung.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Dominasi pihak swasta terhadap lahan masyarakat bila ditinjau dari konsep strategi menurut Salusu (1996) merupakan sebuah kompetisi yang menyebabkan orang harus mengukur kemampuan internal dengan melihat tantangan dan peluang yang mungkin dapat diraih, dalam hal ini konsep strategi yang dapat diambil oleh pemerintah daerah kota Batu adalah dengan mengoptimalkan peran masyarakat desa wisata untuk mengembangkan potensi berupa buah-buahan juga sayuran melalui penyaluran serta sosialisasi berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata berbasis pertanian serta mengajak masyarakat setempat untuk aktif membangun kelompok masyarakat berupa lembaga swadaya masyarakat dan kelompok tani sehingga kelompok masyarakat yang dibentuk dapat secara kuat berdiri dan dapat mengelola kawasan wisata di desa wisata dengan optimal dengan sumber daya manusia yang baik sehingga dapat meminimalisir adanya dominasi oleh pihak swasta terhadap lahan produktif masyarakat desa wisata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengembangan pariwisata daerah di Kota Batu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030 serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu tahun 2014-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu mengatur berkenaan dengan pembagian kawasan serta pengaturan ruang. Sedangkan potensi daerah, strategi pengembangan pariwisata serta kebijakan dan program pengembangan pariwisata daerah diatur dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Batu.
2. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030, pengembangan pariwisata daerah kota Batu khususnya pengembangan pariwisata berbasis pertanian atau biasa disebut agrowisata dikembangkan di Bagian Wilayah Kota (BWK) I yaitu Kecamatan Bumiaji dengan fokus pengembangan pada Desa Bumiaji, Desa Tulungrejo, Desa Punten dan Desa Sumbergondo. Pengembangan agrowisata di Kota Batu tidak hanya ditunjang oleh desa wisata namun juga ditunjang dengan adanya pihak swasta yang mengelola kawasan wisata berupa kawasan agrowisata dan hotel yaitu Kusuma Agrowisata Convention Center yang berada di desa Sisir Kota Batu.
3. Penyuluhan serta koordinasi dalam hal pengembangan agrowisata yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Batu kepada pihak desa wisata juga pihak swasta belum dilakukan secara berkelanjutan. Koordinasi hanya dilakukan ketika terdapat kebutuhan ataupun informasi yang penting yang harus disalurkan dari pemerintah ke pihak swasta dan masyarakat desa wisata maupun sebaliknya.

4. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu beserta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu mencakup empat hal utama yaitu strategi pembagian kawasan berdasarkan potensi daerah, penyediaan sarana dan prasarana agrowisata, promosi atau pemasaran serta peningkatan koordinasi antara pemerintah Kota Batu dengan pelaku industri pariwisata di Kota Batu.
5. Faktor pendorong dalam mencapai sasaran dan target dari pengembangan agrowisata di Kota Batu adalah Kota Batu sebagai daerah otonom, kondisi geografis kota Batu, komoidtas unggulan, tersedianya infrastuktur dan fasilitas umum oleh pemerintah, kerjasama dan koordinasi antar pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan kawasan agrowisata, kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat desa wisata berupa lembaga swadaya masyarakat dan juga kelompok tani masayarkat dapat meningkatkan kapasitas serta partisipasi masyarakat desa wisata di Kota Batu untuk mengembangkan kawasan agrowisata. Sedangkan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pengembangan agrowisata adalah kapasitas sumber daya manusia di desa wisata yang masih rendah, faktor cuaca dan suhu udara yang semakin hari semakin meningkat karena pengaruh dari pemanasan

global, adanya dominasi pihak swasta terhadap lahan masyarakat yang dapat merugikan masyarakat setempat merupakan salah satu faktor penghambat masyarakat desa wisata untuk mengoptimalkan penggunaan lahan produktif yang ada di desa wisata.

B. Saran

1. Dalam pengembangan agrowisata pemerintah kota Batu diharapkan secara *intens* melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang ada di desa wisata mengenai hal-hal yang menyangkut penggunaan lahan, sosialisasi bahan-bahan organik yang ramah lingkungan, teknik mengolah hasil produksi sampai dengan pemasaran hasil produksi agar masyarakat desa wisata dapat secara optimal mengembangkan bisnis agrowisata di desa wisata. Pemerintah kota Batu juga dalam hal ini perlu melakukan peninjauan kembali berkenaan dengan sarana prasaranan dan fasilitas umum khususnya akses jalan untuk menuju desa wisata karena pada nyatanya masih ada akses jalan menuju desa wisata seperti di Dusun Tegalsari, Desa Sumbergondo yang belum layak untuk dikunjungi oleh wisatawan.
2. Alur koordinasi antara pemerintah kota Batu, pihak swasta, dan masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan teratur tidak hanya dilakukan jika ada kebutuhan yang harus dikoordinasikan saja, karena pemantauan serta pertemuan secara rutin akan membantu pemerintah kota Batu untuk dapat mengetahui secara jelas bagaimana

pengembangan agrowisata yang dijalankan swasta dan masyarakat di lapangan.

3. Pemerintah kota Batu, pihak swasta dan masyarakat bekerjasama dalam membentuk tim untuk mempromosikan potensi wisata di Kota Batu melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti pameran, seminar atau penyuluhan sosial ke masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan agrowisata dimana kegiatan tersebut juga mengundang para pelaku bisnis wisata serta masyarakat umum untuk datang ke pameran yang diadakan oleh Kota Batu agar pemasaran kawasan wisata khususnya agrowisata dan pemasaran produksi dari hasil agrowisata dapat maksimal. Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan pihak media baik media cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti radio dan televisi lokal untuk dapat mempromosikan kawasan agrowisata di Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Aji, F dan Sirait, M. 1982. PDE, “*Perencanaan dan Evaluasi Suatu Sistim Untuk Proyek Pembangunan*”, Bumi Aksara, Jakarta
- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bintarto, R, 1984. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bogdan, Robert C. Dan Steven J. Taylor, 1992, *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach in the Social Sciences*, alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons, Surabaya, Usaha Nasional.
- Bratakusumah, D. S, dkk. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- B.N, Marbun. 1990. *Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek*. Jakarta: Erlangga
- Creswell, John W. 2012. *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research Fouth Edition*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Gallion, A.B dan S. Eisner. 1992. *Pengantar Perancangan Kota*. Jakarta: Erlangga.
- Gani, Andi A.Y.1994. *Pokok-pokok Sosiologi Perkotaan*. Malang: PPIS dan Fia Unibraw.

Hamel, Gary dan C.K. Prahalad. 2002. *Competing for The Future*. Harvard Business School Press.

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 2001. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi.

Jayadinata, Johara T, (1992), *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan Perkotaan dan Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.

Jimung, Martin. 2005. Politik Lokal dan Pemerintahan daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994. *Pengertian pengembangan* hal. 473.

Kartasasmita, Ginandjar.1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Kristiadi, J.B, 2008, *Strategi Pembangunan Administrasi Dalam Memperkuat Pembangunan Nasional*, *Majalah Manajemen Pembangunan*, Nomor 23/VI/1998.

Lupiyoadi, Rambat dan A.Hamdani (2008). *Manajemen Pemasaran Jasa*, cetakan keempat. Salemba Empat, Jakarta.

Moleong, L.J.2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.

-----, 2005. *Metodologi Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

-----, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Oka, A. Yoeti. 1996. Edisi revisi: *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Angkasa, Bandung.

-----, 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, cetakan kedua. PT. Pradnya Paramita.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Admimistrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Pearce II, John A. Dan Richard B. Robinson, Jr 1997. *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Terjemahan, Agus Maulana. Jakarta: Binarupa Aksara.

Pendit, Nyoman S. 1999. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Poerwadarminta, W.J.S. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Riyadi, dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Riyadi dan Bratakusumah, Dedy Supryady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rustan, Harun. 2002. *Perencanaan Pembangunan Kawasan Agropolitan dalam Sistem Perkotaan Regional di Indonesia*. Workshop Pengembangan Agropolitan sebagai Strategi Pembangunan Pedesaan dan Wilayah Secara Berimbang. Bogor 3 Agustus 2004.

Sabu, Wahyuningsih. 2012. *Pelayanan Publik dalam Program Government Mobile di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Gorontalo*. [Skripsi]. Bandung: Universitas Padjajaran

Sajogyo dan P. Sajogyo. 1990. *Sosiologi pedesaan*. Jilid 2. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press.

Salusu. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

-----, 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suwandi. 2005. *Agropolitan, Merentas Jalan meniti Harapan*. Jakarta: Duta Karya Swasta.

Siagian, S.P.2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya Edisi Kedua*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

-----, 2005. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Silberstein, Jane dan C. Master. 2000. *Land Use Planning for Sustainable Development*. USA: Lewis Publishers.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

-----, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang Perss.

Syamsi. 1986. *Pokok-pokok Kebijakan Perencanaan Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*.

Tarigan, Robinson. 1986. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tarigan, Robinson (2002) *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Tim BAPPEDA Kota Batu. 2010. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Batu Tahun 2010-2020*. Batu: BAPPEDA Kota Batu.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1988.

----- 1989. *Perencanaan Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta.

----- 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Haji Masagung. Jakarta.

----- 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

----- 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3S. Jakarta.

----- 1998, *Mustopadidjaya. Kebijakan dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Tjokroaminoto, Bintoro dan Mustofa Adidjoyo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1988.

Tjokrowinoto, M. 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

www.wikipedia.org/wiki/pemerintahan diakses tanggal 13 Desember 2014 pukul

19.30

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

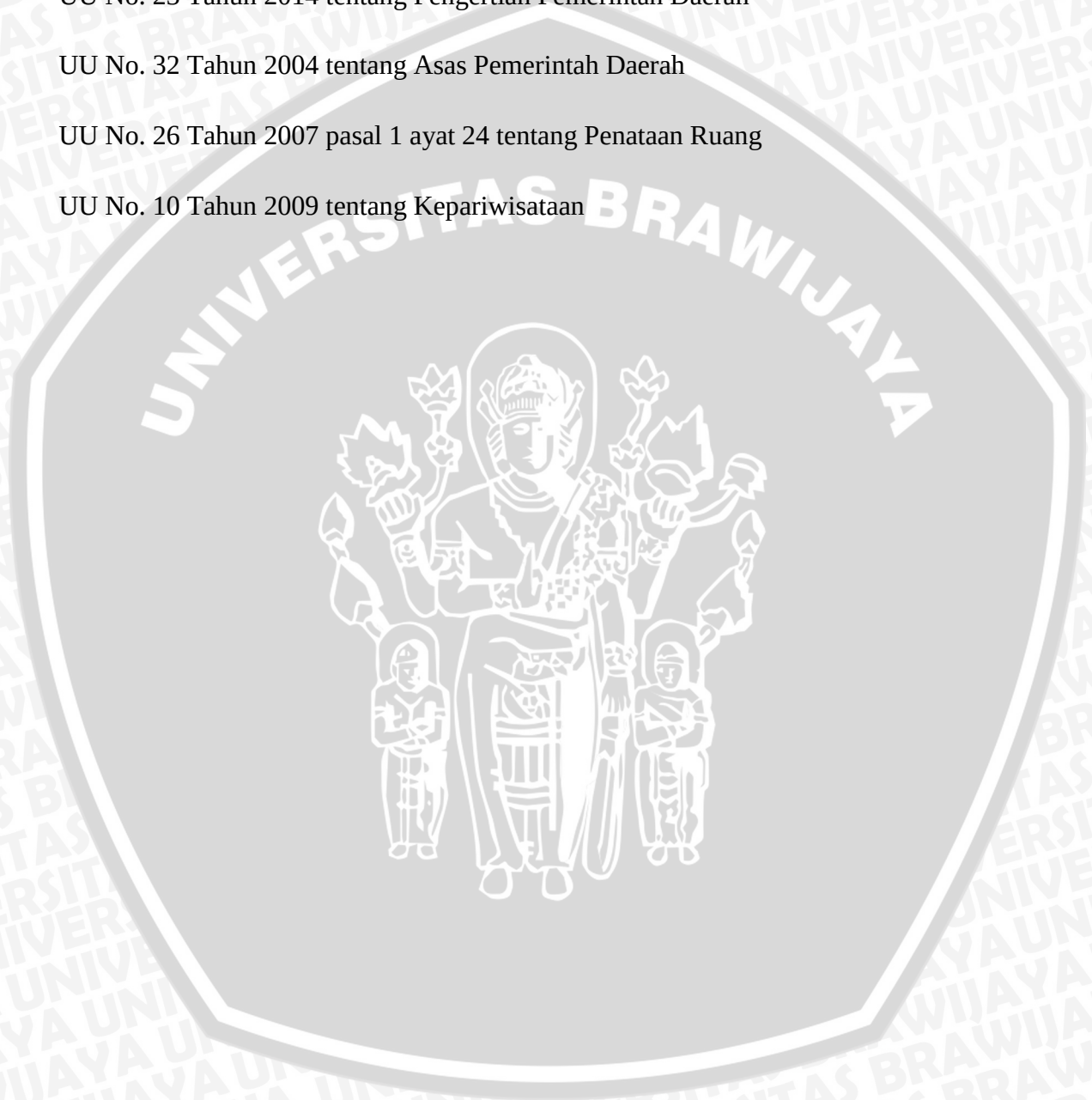
UUD 1945 pasal 33 ayat 3 tentang Kekayaan Alam

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pengertian Pemerintah Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Asas Pemerintah Daerah

UU No. 26 Tahun 2007 pasal 1 ayat 24 tentang Penataan Ruang

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa



LAMPIRAN I

SURAT PENGANTAR PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Mustari Nomor 6, Telepon/Fax. (0341) 511901

KOTA BATU

Batu, 09 Februari 2015

Kepada

Nomor : 072/219/422.207/2015
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Dan
 Pembangunan Daerah Kota Batu
 2. Kepala Dinas Pariwisata Dan
 Kebudayaan Kota Batu
 di-

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang Tanggal 14 Januari 2015 Nomor :
 569/UN10.3/PG/2015 Perihal Ijin Penelitian bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama : CINTANTYA ANDHITA DARA KIRANA
 NIM : 115030601111004
 Jurusan : Perencanaan Pembangunan
 Fakultas/Universitas : FIA/ Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. MT. Haryono Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin
 dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan
 Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Kota (Studi Pada
 Pemerintah Kota Batu)
 Data Yang Dicari : - RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030
 - RIPPDA Kota Batu Tahun 2010-2020
 - Data-data berkenaan dengan strategi pemerintah
 daerah
 Lokasi : 1. Bappeda Kota Batu
 2. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu
 Peserta : -
 Waktu : 16 Februari 2015 s/d 30 April 2015

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang
 berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi
 setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU

THOMAS MAYDO, S.Sos

Penata Tingkat I

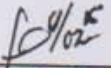
NIP. 19731209 199303 1 003

Tembusan :

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi

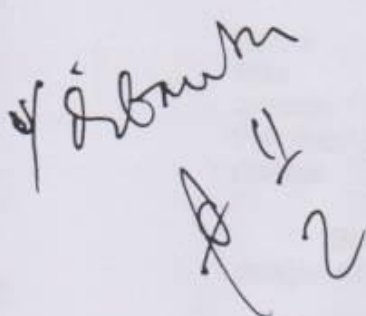
LAMPIRAN II

DISPOSISI IJIN PENELITIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATU

 LEMBAR DISPOSISI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Bukit Berbunga No. 13 Sidomulyo Kota Batu, Kode Pos 65317 Telp./Fax. (0341) 511611			
Dari :	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu	Kepada :	Kepala Bappeda
Nomor Surat :	072/219/422.207/2015	Nomor Agenda :	131
Tanggal Surat :	09 Februari 2015	Tanggal Masuk :	11 Februari 2015
Perihal :	Ijin Penelitian a/n Clintanya Andhita Dara Kirana 		
DISPOSISI :		Yth. : ☒ Sekretaris 2. Kabid Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingk. Hidup 3. Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya 4. Kabid Perencanaan Ekonomi 5. Kabid Data, Penelitian dan Pengembangan 6.	
<i>Disetujui dan ditandatangani</i> <i>11/2</i> <i>11/2</i> <i>Kabid Ekonomi & Kabid Fisika</i> <i>- mulyo H. Batu</i> <i>11/2</i>			

LAMPIRAN III

DISPOSISI IJIN PENELITIAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BATU

 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kantor : Jl. Sultan Agung No. 7B Telp./Fax. 0341-511600 *Email : dispartabudbatu@gmail.com Website : http://www.shining-batu.com BATU 65314	
LEMBAR DISPOSISI	
1. RAHASIA 2. <u>PENTING</u> 3. RUTIN	
Surat Dari : kersbangpol	Diterima Tanggal : 11 feb 2015
Tanggal Surat : 09 Feb 2015	Nomor Agenda : 181
Nomor Surat : 092/219/422.2015/	Diteruskan Kepada :
Perihal : 2015	1. Sekretaris Dinas 2. Kabid Promosi dan Pemasaran Pariwisata 3. Kabid Kebudayaan 4. Kabid Pengembangan Produk Pariwisata 5. Kabid Pengembangan SDM Pariwisata
Ijin Penelitian a.n. Cintaniza Andhita UH. Brawijaya	
ISI DISPOSISI	
 3/15 3 Kabid Pengembangan mohon Bantu	

LAMPIRAN IV

PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA JAWA TIMUR

D. Program Pengembangan Pariwisata Jawa Timur**1. Program Pengembangan Pemasaran**

Pengembangan pemasaran ditekankan pada kegiatan promosi untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar serta membuka pasar baru bagi produk-produk wisata di Jawa Timur, sekaligus berupaya memulihkan citra pariwisata diluar negeri melalui:

1. Promosi Dalam negeri, dengan dasar kegiatan antara lain:

- Penyelenggaraan promosi pariwisata Jawa Timur di Jawa Timur, Serta pasar wisata Majapahit Travel Fair di Surabaya, Festival seni budaya dan pariwisata di Malang Widya Wisata pengenalan (*Fam Tour*) dan lain-lain
- Peran serta di dalam Pasar Wisata (*Travel Exchange/ Travex*) di Jakarta dan *Travel Mart* di Bali.



- Berpartisipasi dalam even pariwisata tingkat nasional, yakni mengikuti Festival Nusa Dua di Bali, Festival Borobudur di Yogyakarta, Festival Keraton di Bima, NTB dan lain-lain.
- 2. Promosi Luar Negeri, dengan sasaran kegiatan berpartisipasi dalam pameran dan Pasar Wisata, seperti:
 - *Holiday Travel Show* (HTS) di Australia
 - *World Travel Market* (WTM) London, Inggris
 - *Internasional Tourism Borse* (ITB), di Berlin, Jerman
 - *Internasional Tourism Exhibition* (ITE) di Hongkong, Korea Selatan, Jepang dan Singapura
- 3. Pemberdayaan, sehingga mampu menjalin kerjasama dengan media massa (media cetak dan elektronik) di Jawa Timur.
- 4. Peningkatan kinerja promosi pariwisata dan kesenian Jawa Timur, dengan sasaran kegiatan utamanya antara lain:
 - ✓ Analisis pasar wisata 2 tahun sekali
 - ✓ Penyediaan sarana promosi
 - ✓ Dokumentasi bahan promosi
 - ✓ Penerbitan majalah pariwisata Jawa Timur
- 5. Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) seperti Mandala Wisata Jawa Timur, dengan sasaran antara lain penyiapan kelembagaan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain.

2. Program Pengembangan Produk Wisata

Program pengembangan produk pariwisata Jawa Timur diarahkan untuk meningkatkan pelayanan wisatawan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk wisata yang ada serta diversifikasi produk wisata sesuai permintaan pasar, kegiatannya meliputi:

1. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu yang berbasis pada obyek wisata alam, budaya dan minat khusus, diprioritaskan pada obyek-obyek wisata yang mempunyai nilai jual di luar negeri, antara lain:

- KPP VI Jember, obyek wisata andalannya Kawah Ijen, TN Meru Betiri, TN Blauran, TN Alas Purwo, (Bandeng Sadengan, Pantai Plekung, Grajakan, Trianggulasi, Sukamade, Agrowisata, Kaliklatak, dan lain-lain)
 - KPP V Malang, obyek wisata andalannya adalah Gunung Bromo, *Resort* Batu Malang, Tretes Pasuruan, Gunung Kawi, Agrowisata kebun The Lawang-Air Terjun Madakaripura-Probolinggo, Kakek Bodo Pasuruan, wisata Budaya Tengger dan lain-lain
 - KPP II Surabaya, memiliki obyek wisata andalan yaitu wisata konvensi Surabaya, koridor wisata ziarah makam Walisongo, wisata Budaya Trowulan, *Resort* Trawas Mojokerto, dan lain-lain
 - Sub KPP pacitan memiliki obyek wisata andalan kawasan pantai dan minat khusus.
2. Pengembangan produk pariwisata yang mampu mendorong perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata melalui pola pariwisata dan Kesenian Inti Rakyat (PIR).
 3. Pembinaan LSM-LSM guna meningkatkan pelayanan dan pengembangan produk, sehingga kehidupan seni budaya dan pariwisata dapat tumbuh berkembang dan saling mengisi, menunjang dan memperoleh manfaat secara bersama-sama.
 4. Pembinaan terminal pesinggahan dan pembinaan wisata proses produksi sepanjang perjalanan wisata andalan dalam rangka diversifikasi produk pariwisata, sesuai dengan tuntutan pasar (*to create demand*), seperti pembinaan sentra industri kecil kerajinan topeng khas Malang (Tumpang), pembuatan gamelan di Magetan, pembuatan border tas di Sidoarjo, kerajinan emas dan perak di Pasuruan, kerajinan bamboo tempurung di Magetan serta pembuatan brem di Madiun.

LAMPIRAN V

PUSAT KEGIATAN SEKTOR PARIWISATA

3) Pusat Kegiatan Sektor Pariwisata

Kegiatan pariwisata diarahkan menjadi salah satu andalan kegiatan yang dapat menyumbang perkembangan perekonomian di Kota Batu. Jenis kegiatan wisata yang akan direncanakan untuk dikembangkan meliputi :

☐ **Pariwisata Buatan**

- Selecta, Taman Rekreasi Songgoroti, Taman Rekreasi Tirta Nirwana Taman rekreasi *Jatim Park I dan II*, serta *Batu Night Spectacular (BNS)*.
- *Miniatur World* yang ada di Desa Oro-oro Ombo
- Taman Rekreasi Selektia dan Pemandian Air Panas Songgoriti
- Rencana pengembangan arena Pacuan Kuda di Kecamatan Bumiaji



LAMPIRAN VI

RENCANA STRUKTUR WILAYAH KOTA BATU

No	BWK	Wilayah BWK	Pusat Pelayanan Kota		Sub Pusat Pelayanan Kota		Pusat Lingkungan	
			Pusat Pelayanan	Fungsi Kegiatan	Pusat Pelayanan	Fungsi Kegiatan	Pusat Pelayanan	Fungsi
1	BWK I (Kec. Batu)	- Desa Oro-oro Ombo - Kehurahan Temas - Kehurahan Sisir - Kehurahan Ngaglik - Desa Pesanggrahan - Kehurahan Songgokerto - Desa Sumberejo - Desa Sidomulyo	Pesanggrahan	- pusat pelayanan pemerintahan Kota, - pusat kegiatan perdagangan modern dan jasa komersial			- Desa Sidomulyo - Desa Oro-Oro Ombo	- Pusat pelayanan sosial skala lokal - Pendukung pemerintahan Dilengkapi : 1. Fasilitas kesehatan skala lingkungan, 2. Perdagangan pendukung pariwisata khususnya perdagangan bunga, pendukung akomodasi wisata berupa vila dan rumah makan - Pusat pemerintahan skala desa - Pusat perdagangan pendukung pariwisata - Pusat kegiatan wisata modern Dilengkapi dengan : 1. Kawasan perdagangan pendukung pusat pariwisata buatan 2. Jasa pendukung pariwisata berupa villa 3. Terminal transportasi wisata
2	BWK II (Kec. Junrejo)	- Desa Tlekung - Desa Junrejo - Desa Mojorejo - Desa Torongrejo - Desa Beji			Desa junrejo	Sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan	Desa Tlekung	- Pusat pelayanan pemerintahan desa dan kesehatan, Dilengkapi dengan : 1. Fasilitas kesehatan yang

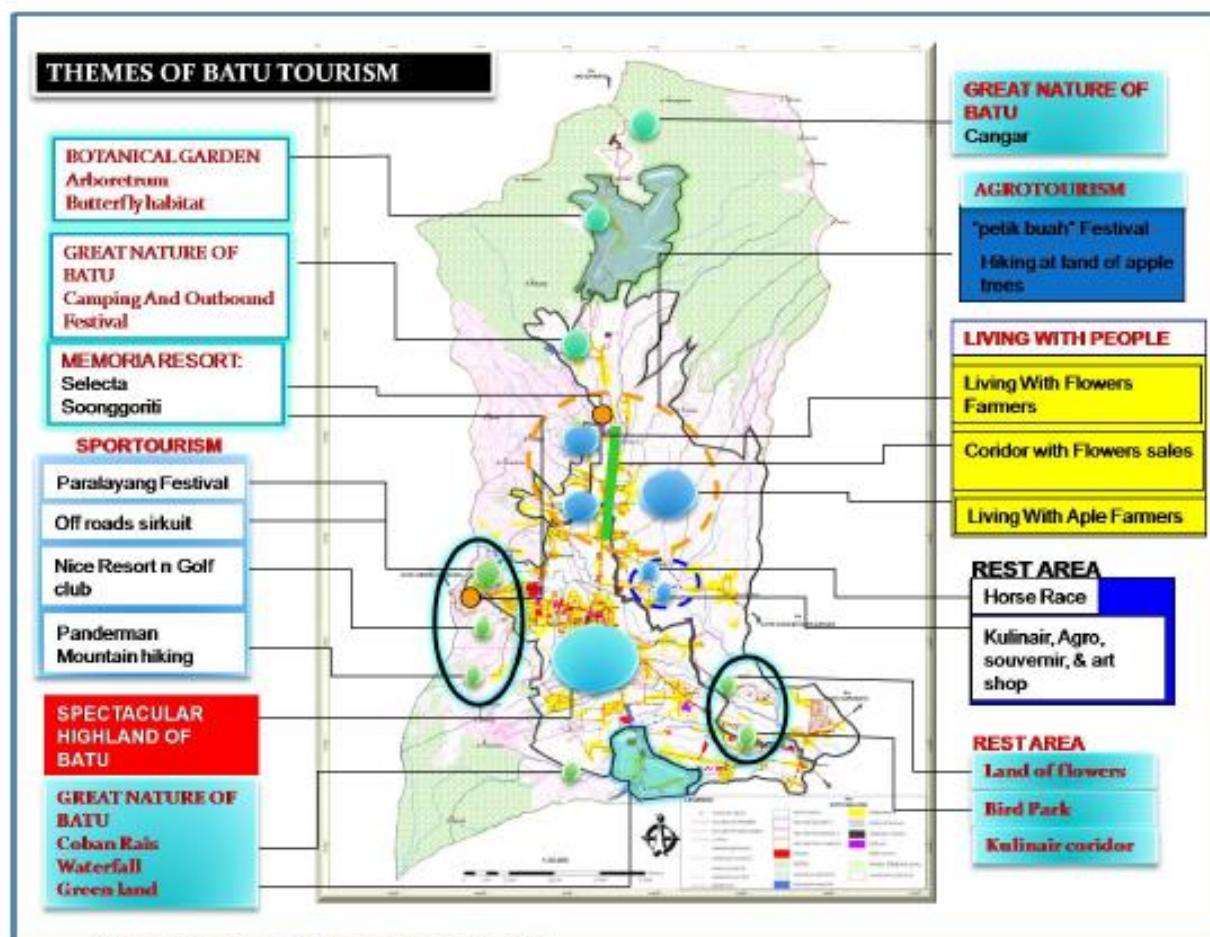


		- Desa Pendem - Desa Dadaprejo				dan atau pendukung pemerintahan kota, - Pusat pelayanan pendidikan tinggi, - Pusat perdagangan kecamatan 1	Desa Mojorejo	dikembangkan untuk pelayanan regional, 2. Fasilitas pendidikan dasar 3. Fasilitas pusat pengembangan pertanian - Pusat pemerintahan skala desa - Pusat perdagangan dan jasa skala lokal, Dilengkapi dengan : 1. Pelayanan pendidikan dasar hingga tingkat atas, 2. Fasilitas kesehatan skala lokal, 3. Koridor perdagangan dan jasa komersial pendukung wisata kuliner
3	BWK III (Kec. Bumiaji)	- Desa Pandanrejo - Desa Bumiaji - Desa Bulukerto - Desa Gunungsari - Desa Puntan - Desa Tulungrejo - Desa Sumbergondo - Desa Giripumo - Desa Sumberbrantas			Desa Puntan	- Sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan - Pusat kegiatan agribisnis - Pelayanan pendidikan menengah	- Desa Bumiaji - Desa Tulungrejo	- Pusat perdagangan dan jasa skala lokal - Pusat kegiatan agrowisata Dilengkapi dengan : 1. Fasilitas jasa pendukung pariwisata berupa villa, 2. Pusat perdagangan tradisional lokal 3. Fasilitas pendidikan dasar dan menengah. - Pusat pelayanan sosial - Perdagangan dan jasa komersial skala lokal Dilengkapi dengan - Pasar tradisional, - Fasilitas pendidikan dasar hingga tingkat menengah, - Fasilitas penunjang wisata alam berupa



LAMPIRAN VII

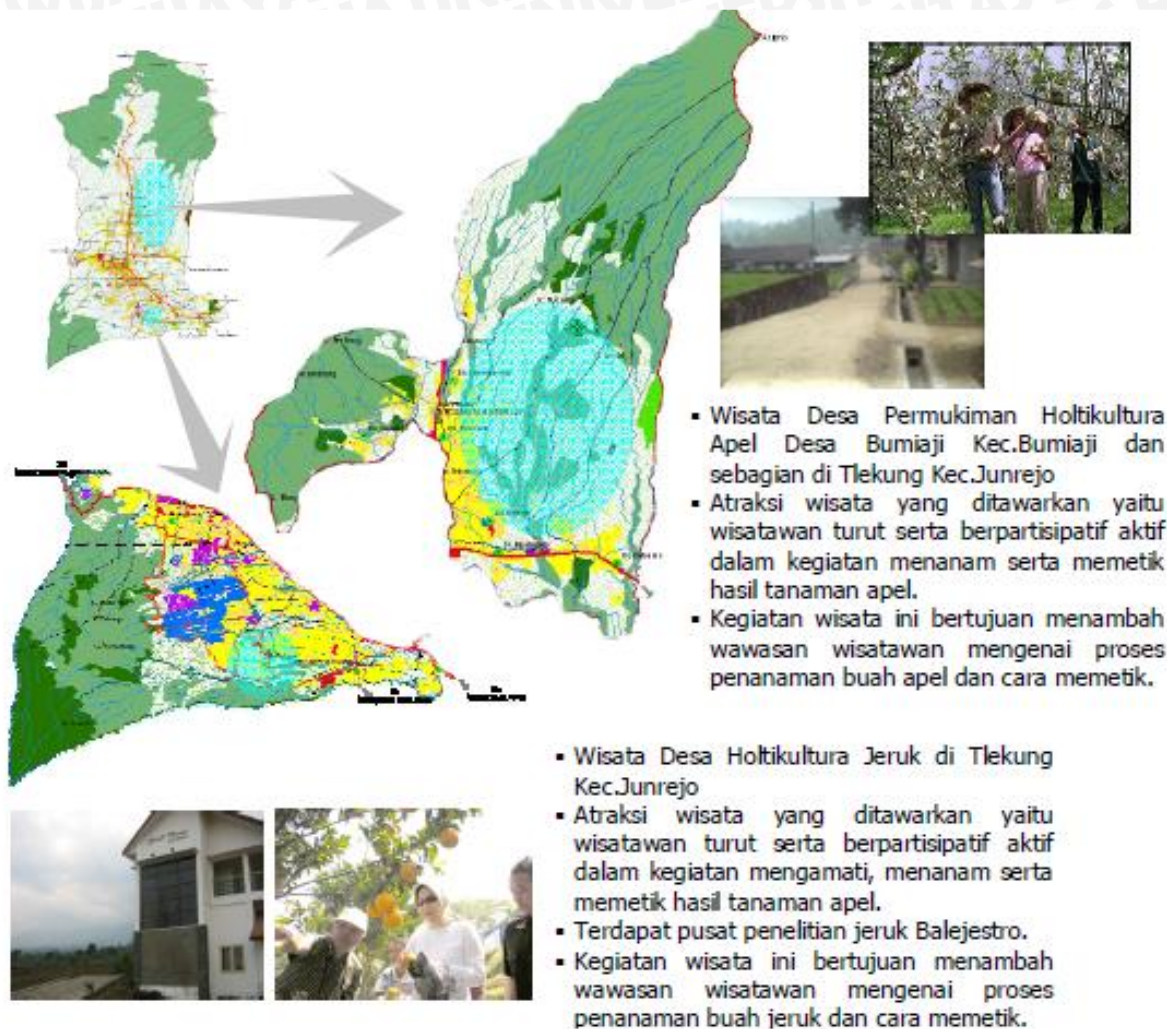
PERSEBARAN DAYA TARIK WISATA



Sumber : Hasil RIRW Kota batu 2009

LAMPIRAN VIII

RENCANA WISATA DESA HOLTOKULTURA APEL



Sumber : Hasil RTRW Kota Batu 2008

LAMPIRAN IX

RENCANA KAWASAN STRATEGIS SEKTOR UNGGULAN PERTANIAN

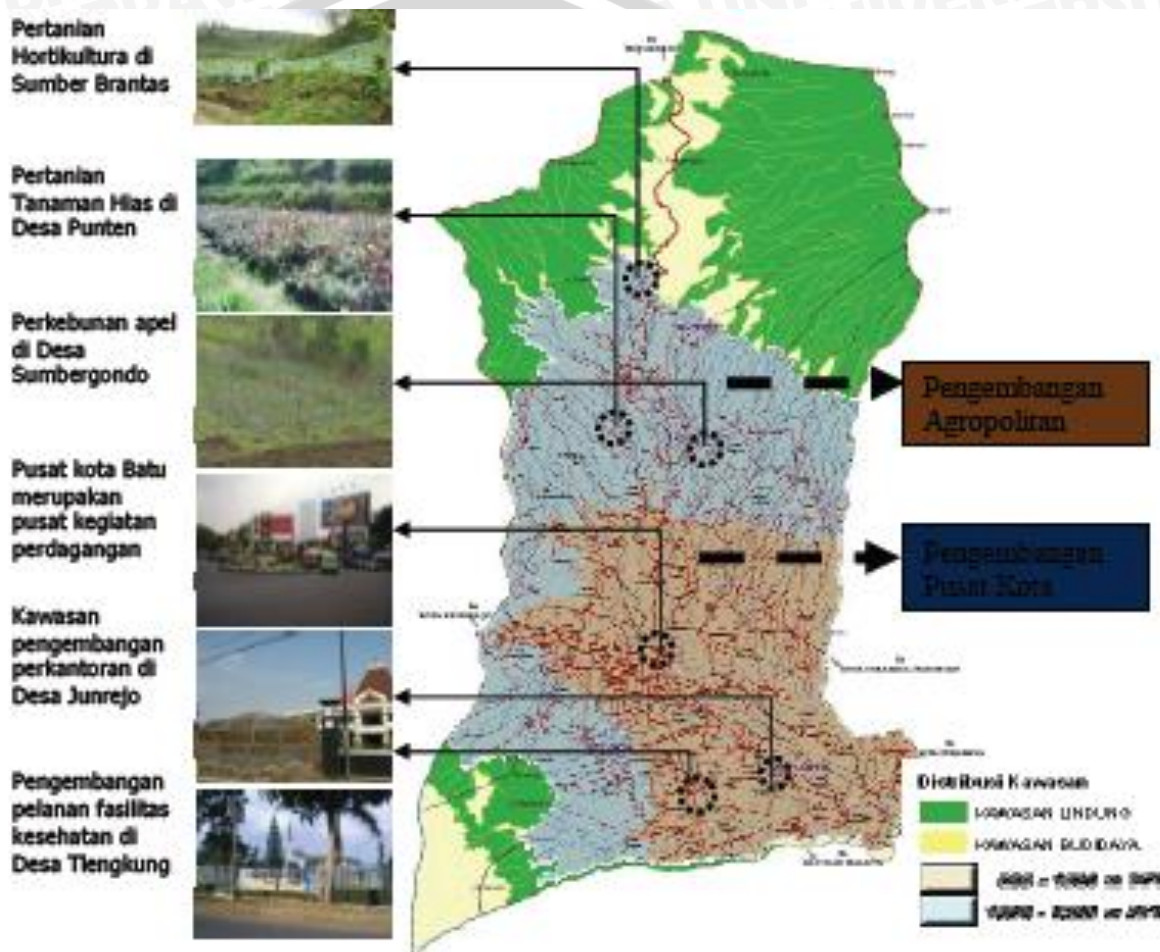
No.	Kegiatan Pertanian	Komoditas Unggulan	Arah Pengembangan	Wilayah Pengembangan Kegiatan
1.	Sub Sektor Tanaman Holtikultura	Sayur mayur	Diarahkan membentuk sentra	Desa Tulungrejo, Gunungsari, Puntan dan Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, serta Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan di Kecamatan Batu
2.	Sub sektor holtikultura	Apel, jeruk dan alpukat	Diarahkan membentuk kawasan	Holtikultura apel memusat di Kecamatan Bumiaji dan sebagian terdapat di Tlengkung Kecamatan Junrejo; holtikultura jeruk memusat di Tlengkung dan Oro-oro Ombo, dengan terdapatnya pusat penelitian jeruk Balejestro ; dan Holtikultura alpukat terdapat di Tlengkung dan Desa Torongrejo
3.	Sub Sektor Tanaman Hias	bunga potong – gladiol, mawar, antorium, krisan	Diarahkan membentuk sentra	Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, dan Desa Puntan, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji

Sumber : Hasil Rencana, 2008



LAMPIRAN X

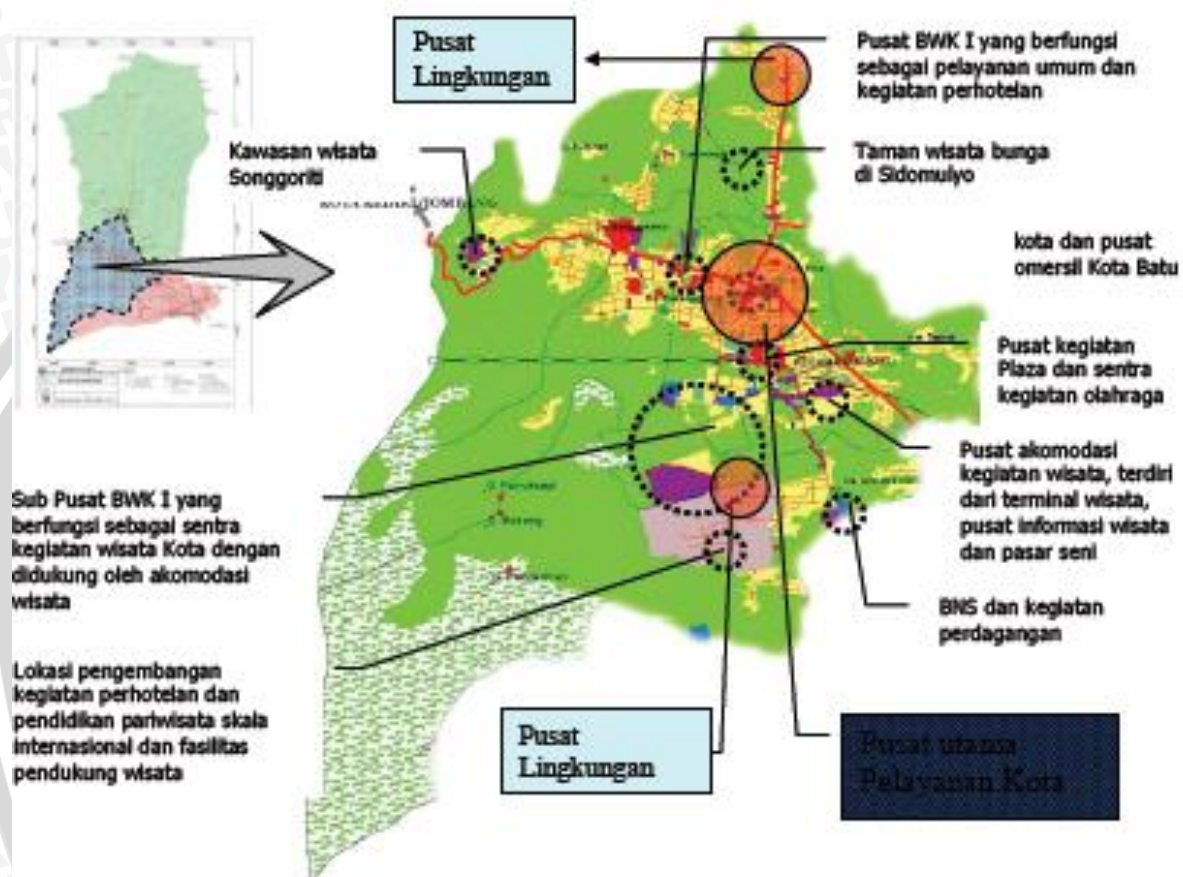
RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PERKOTAAN DAN AGROPOLITAN



Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010

LAMPIRAN XI

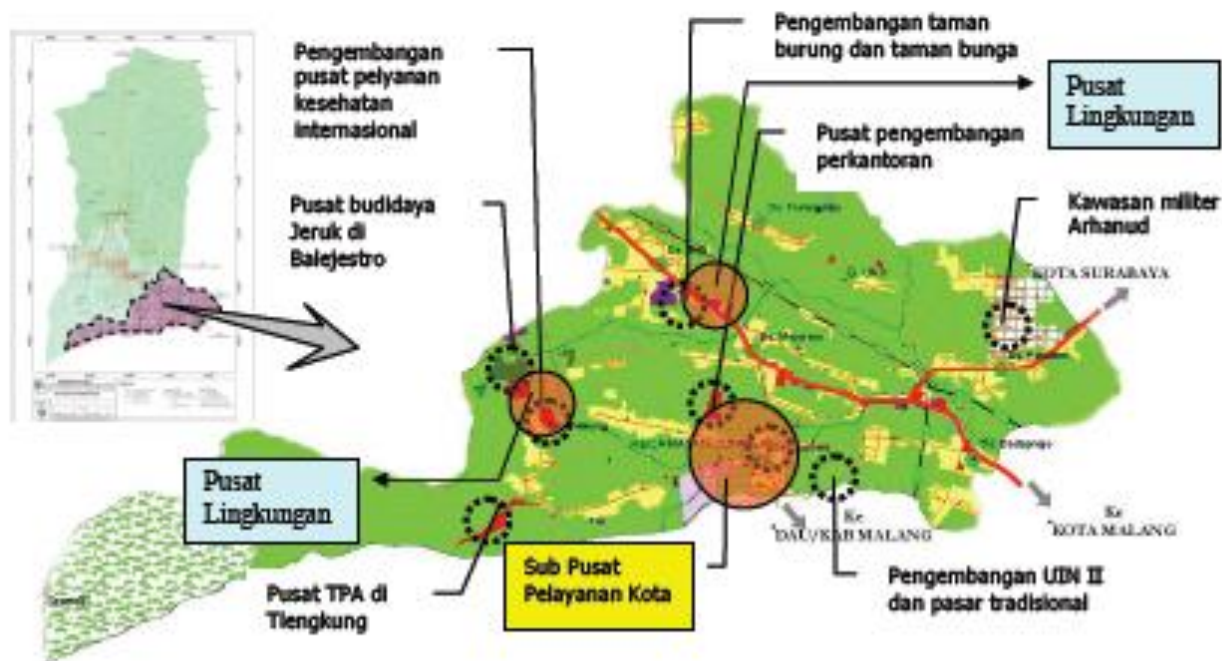
RENCANA SISTEM DAN FUNGSI PERWILAYAHAN BWK I KECAMATAN BATU (PUSAT PEMERINTAHAN)



Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010

LAMPIRAN XII

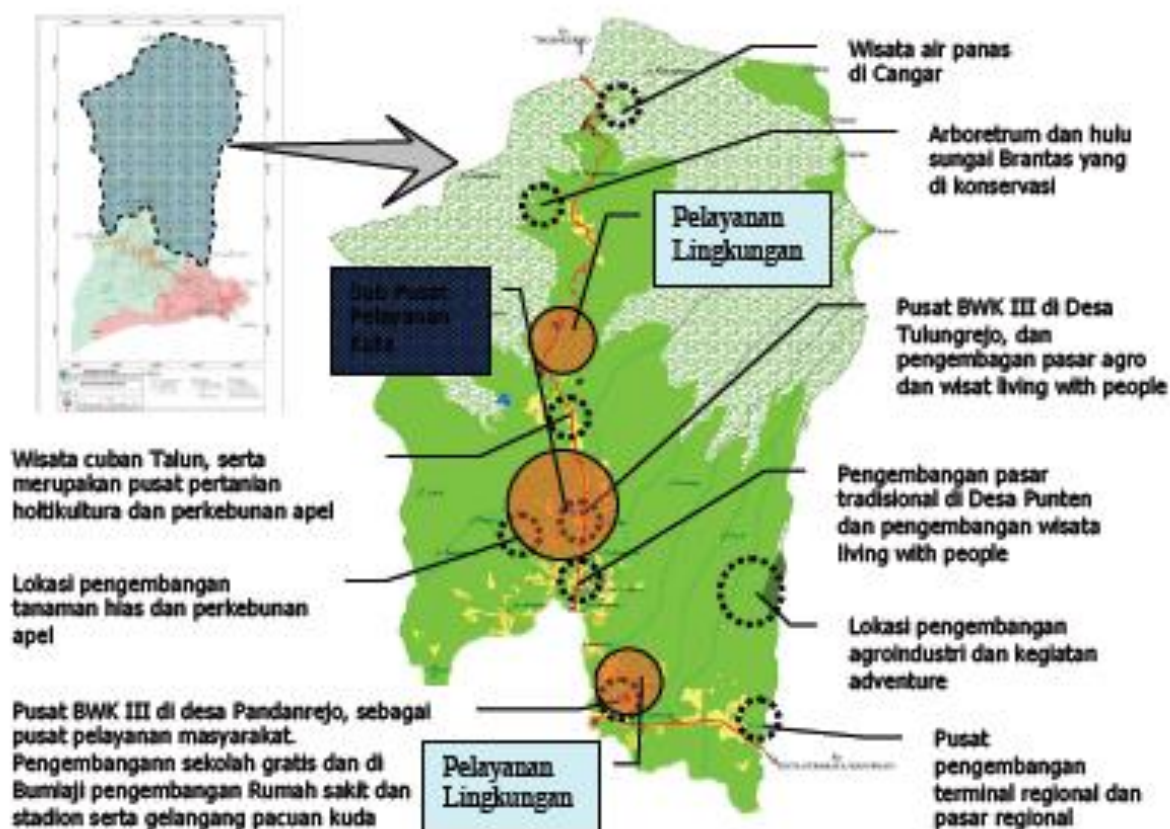
RENCANA SISTEM DAN FUNGSI PERWILAYAHAN BWK II KECAMATAN JUNREJO (PENGEMBANGAN PEMUKIMAN KOTA)



Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010

LAMPIRAN XIII

RENCANA SISTEM DAN FUNGSI PERWILAYAHAN BWK III KECAMATAN BUMIAJI (PENGEMBANGAN AGROPOLITAN DAN AGROTURISM)



LAMPIRAN XIV

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Peneliti dengan Petugas Penyuluh Lapangan Desa Sumbergondo



**Wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
BAPPEDA Kota Batu**



Wisata Petik Buah Kusuma Agrowisata Convention Center



Kebun Jeruk Desa Sumbergondo



Kebun Jeruk Desa Bumiaji



Wisata Petik Apel Kelompok Tani Makmur Abadi

LAMPIRAN XV

PEDOMAN WAWANCARA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATU,
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BATU, KANTOR
DESA BUMIAJI, KANTOR DESA SUMBERGONDO, KUSUMA
AGROWISATA CONVENTION CENTER**

1. Apakah pengembangan agrowisata Kota Batu mengacu pada visi misi pemerintah daerah Kota Batu? Jika iya, pada point berapa?
2. Apakah terdapat perbedaan fokus dalam pengembangan agrowisata dari setiap periode kepemimpinan kepala dinas terkait?
3. Bagaimana hubungan dan pembagian peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pengembangan agrowisata? Serta bagaimana mekanisme kerjasamanya? (Misalnya pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat serta swasta dengan masyarakat)
4. Apakah pengembangan agrowisata dapat memberikan manfaat bagi semua pihak secara menyeluruh? Apa manfaat yang diperoleh dari masing-masing pihak? (Pemerintah, swasta, masyarakat)
5. Bagaimana strategi pemerintah dalam mengembangkan produk agrowisata?
6. Bagaimana sistem pemasaran yang dijalankan pemilik agrowisata bersama pemerintah dalam memasarkan produk agrowisata?
7. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah serta pemilik agrowisata kepada masyarakat?
8. Apa saja regulasi yang menjadi dasar dalam pengembangan agrowisata? Apakah pelanggaran terhadap regulasi pernah terjadi? Jika iya, bagaimana bentuknya?
9. Seberapa besar retribusi yang diberikan oleh pemilik agrowisata kepada pemerintah dalam hal pengembangan agrowisata?

10. Apa yang mendasari pengembangan agrowisata berada pada tiga desa (Desa Punten, Desa Sumbergondo, serta Desa Bumiaji)?
11. Apakah pemerintah memfasilitasi sarana prasarana seperti alat-alat produksi serta infrastruktur agar masyarakat dapat mengoptimalkan pengembangan agrowisata di daerah mereka?
12. Bagaimana strategi yang digunakan pemerintah untuk mempromosikan kawasan agrowisata ke masyarakat umum?
13. Bagaimana cara pemerintah menjaga komitmen terhadap pengembangan agrowisata yang mana pengembangan agrowisata tersebut harus memberikan manfaat kepada setiap pihak?



PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT DESA WISATA

A. PUBLIC GOODS

1. Apakah dengan adanya pengembangan agrowisata, bapak/ibu mendapatkan fasilitas yang baru? Seperti pembangunan jalan baru dan sebagainya oleh pemerintah maupun pihak pengelola agrowisata?
2. Apakah bapak/ibu dengan mudah mengakses fasilitas yang diberikan pemerintah/pihak pengelola agrowisata dalam pengembangan agrowisata? Jika tidak, mengapa?
3. Bagaimana sistem pembagian lahan yang dipergunakan antara pengembangan agrowisata dengan lahan masyarakat sendiri?
4. Apakah dalam sistem pembagian lahan tersebut tidak mengalami penyimpangan? Seperti lahan untuk wilayah agrowisata lebih banyak dibanding lahan masyarakat asli?
5. Apakah dalam pengembangan agrowisata ini banyak pihak swasta atau perusahaan yang turut mengelolanya? Jika iya, apakah mereka memberikan fasilitas bagi masyarakat desa untuk ikut serta dalam proses pengembangan?
6. Apakah pihak swasta atau pemerintah memberikan kompensasi berupa pembangunan fasilitas seperti jalan, masjid dan sebagainya kepada masyarakat karena telah berkontribusi dalam pengembangan agrowisata di daerah tersebut?

B. EKSTERNALITAS

1. Apakah pengembangan agrowisata memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar? Jika iya, apa saja dampak yang ditimbulkan dari pengembangan agrowisata?
2. Apakah bapak/ibu merasa diuntungkan dengan adanya pembangunan agrowisata ini? Jika iya, apa saja dan apa penyebabnya?
3. Apakah bapak/ibu merasa dirugikan dengan adanya pembangunan agrowisata ini? Jika iya, apa saja dan apa penyebabnya?

C. INFORMASI

1. Bagaimana alur komunikasi dari pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat ketika akan mengelola agrowisata?
2. Apakah sebelum pengembangan agrowisata dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat? Bagaimana caranya serta bagaimana reaksi masyarakat?
3. Apakah ada pro dan kontra dalam pengembangan agrowisata di Kota Batu ini?
4. Apakah menurut bapak/ibu sosialisasi yang dilakukan dalam pengembangan agrowisata ini sudah merata dalam arti apakah semua masyarakat mengetahui pengembangan agrowisata di Kota Batu ini?
5. Kepada siapa masyarakat dapat menyampaikan jika ada keluhan terkait pengembangan agrowisata?
6. Jika terjadi keluhan dari masyarakat, apakah dengan cepat pihak pemerintah maupun swasta dapat mengakomodir keluhan dan ditindaklanjuti? Dan bagaimana hasilnya?

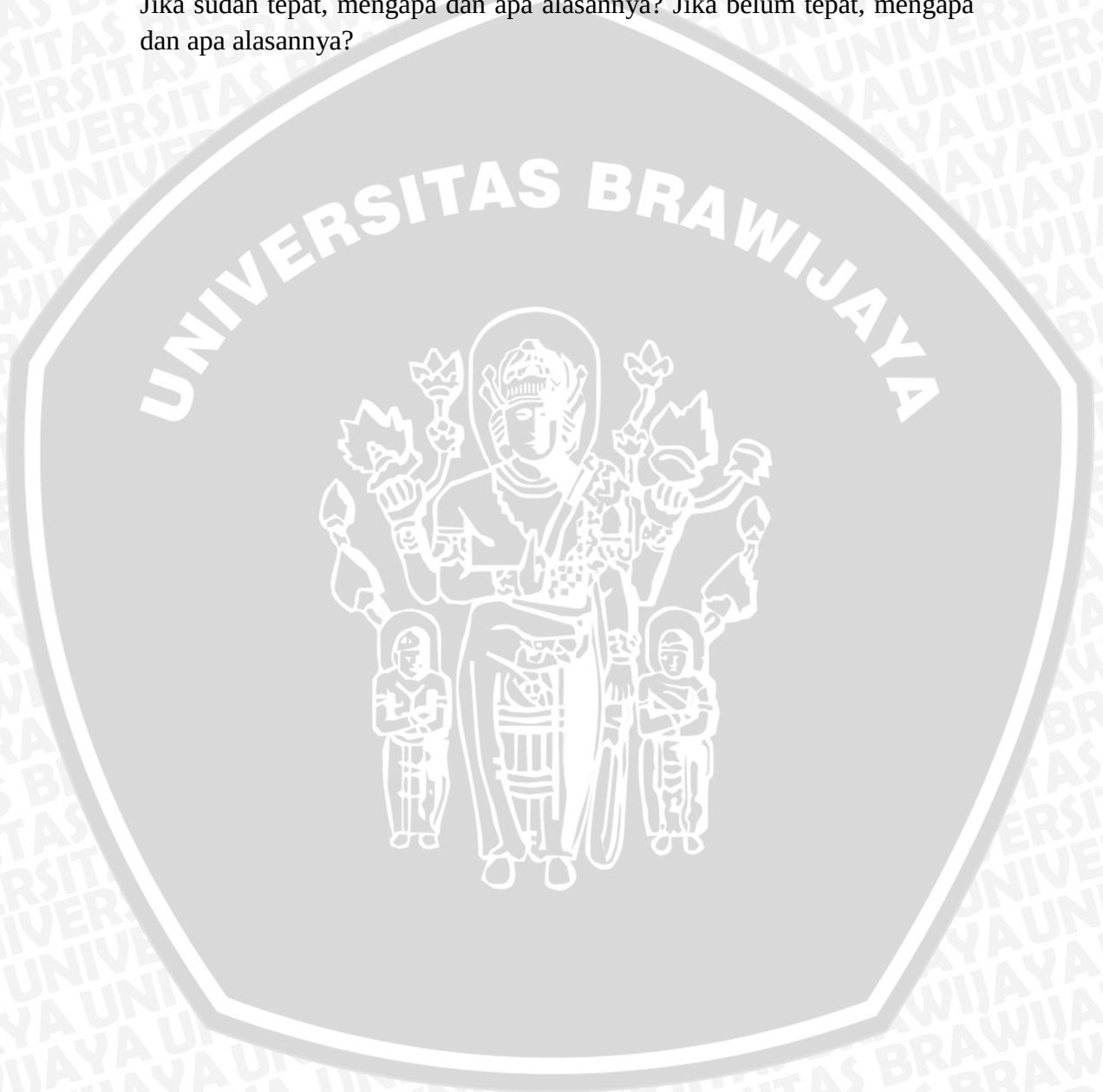
D. DAYA BELI MASYARAKAT

1. Apakah dengan adanya pengembangan agrowisata ini dapat menambah lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar?
2. Apakah dengan adanya pengembangan agrowisata ini pendapatan masyarakat meningkat?
3. Apakah ada dominasi dari pihak pengelola atau pemerintah terkait agrowisata berkenaan dengan manfaat yang didapatkan dari pengembangan agrowisata, sehingga masyarakat tidak dapat menikmati hasilnya secara optimal serta tidak dapat turut berpartisipasi dalam pengembangan agrowisata?

E. PENILAIAN INDIVIDU

1. Apakah dengan adanya pengembangan agrowisata masalah-masalah publik menjadi berkurang? Jika iya, apa saja masalah yang dapat diminimalisir dengan adanya pengembangan agrowisata tersebut?

2. Atau kah sebaliknya, muncul masalah-masalah baru yang disebabkan oleh pengembangan agrowisata tersebut? Seperti sengketa lahan dan sebagainya.
3. Apakah menurut bapak/ibu pengembangan agrowisata ini sudah tepat? Jika sudah tepat, mengapa dan apa alasannya? Jika belum tepat, mengapa dan apa alasannya?



CURRICULUM VITAE PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Cintantya Andhita Dara Kirana
 Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 1 September 1993
 Umur : 21 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat di Malang : Jl. Veteran 6B Griya Brawijaya Blok A, Malang
 Alamat Asal : Jl. Golf 1 / 73 Gunungsari, Surabaya
 NIM : 115030601111004
 Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Administrasi / Administrasi Publik
 Universitas : Universitas Brawijaya
 No. Telepon : 081217693392
 Alamat E-mail : ca.darakirana@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	SD Hang Tuah 7 Surabaya	1999-2005
2.	SMPN 22 Surabaya	2005-2008
3.	SMAN 15 Surabaya	2008-2011
4.	S-1 Minat Perencanaan Pembangunan, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	2011-2015

C. Pengalaman Berorganisasi

No.	Posisi	Organisasi	Tahun
1.	Staff Muda	Himpunan Mahasiswa Jurusan Adminsitasi Publik (HUMANISTIK)	2011

2.	Staff Muda	Badan Eksekutif Mahasiswa FIA UB	2011
3.	Staff Minat Bakat PSDM	Himpunan Mahasiswa Jurusan Adminsitasi Publik (HUMANISTIK)	2012-2013
3.	Staff Kementrian Sospol	Badan Eksekutif Mahasiswa FIA UB	2012-2013
4.	Ketua Divisi Fund Rising	Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK)	2013-2014
5.	Dirjen Pemberdayaan Perempuan	Badan Eksekutif Mahasiswa FIA UB	2013-2014
6.	Wakil Ketua	Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK)	2014-2015

D. Pengalaman Kepanitiaan

No.	Posisi	Kepanitiaan	Tahun
1.	Bendahara Pelaksana	Persembahan Untuk Negeri (PUN)	2012
2.	<i>Steering Commite</i>	Temu Administrator Muda Indonesia	2013
3.	Staff Divisi Kesekretariatan	ASPA Indonesia International Seminar and IAPA Annual	2012

		Conference 2012 in “Innovative Governance”	
4.	Co. Konsumsi	Workshop IT “The Social Network Story What Next?” dan MeetUp Start Up Se-Indonesia	2012
5.	Panitia Lokal	Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemira) UB	2011

